



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2016-2021**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2016**

TAHUN 2016



**BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI-SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021**

*“ MASYARAKAT BULUKUMBA YANG SEJAHTERA DAN TERDEPAN MELALUI
OPTIMALISASI POTENSI DAERAH DENGAN PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN
YANG DILANDASI PADA PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DAN RELIGIUS”*

**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2016**



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 243);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2009 Nomor 6);

W 911

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 7).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 8).
16. Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 - 2023

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba yang memuat penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi.

7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdayasaing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Visi Daerah adalah rumusan umum tentang arah yang akan dituju melalui upaya yang akan dilaksanakan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2021.
11. Misi Daerah adalah rumusan kebijakan umum sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya visi daerah.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk 1 (satu) tahun anggaran atau disebut rencana pembangunan tahunan daerah.
16. Rencana Strategis yang disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja yang disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD. *M 21 1*

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyusunan RPJMD, dimaksudkan untuk:
 - a. menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan oleh legislatif, eksekutif dan masyarakat.
 - b. mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten;
 - c. menjadi pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD;
 - d. menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD.
- (2) RPJMD disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan daerah sebagai penjabaran dari visi Pemerintah Daerah, yakni "Mewujudkan Masyarakat Bulukumba Yang Sejahtera dan terdepan Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Yang Dilandasi Pada Pemerintahan yang Demokratis dan Religius".

BAB IV SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

- (1) RPJMD Tahun 2016-2021 memuat visi, misi, strategi, dan arah pembangunan, serta program prioritas daerah, berpedoman pada RPJP Daerah, serta memperhatikan RPJPM Nasional dan RPJMD Provinsi.
- (2) Sistematika RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Bab I	: Pendahuluan
Bab II	: Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab III	: Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
Bab IV	: Analisis Isu Strategis
Bab V	: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Bab VI	: Strategi dan Arah Kebijakan Umum
Bab VII	: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Bab VIII	: Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Bab IX	: Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Bab X	: Penutup
- (3) Rincian dari rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD dengan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (3) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD.
- (4) Musrenbang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJM Daerah.
- (5) Rancangan akhir RPJM Daerah dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.

Pasal 6

- (1) Dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD, DPRD melakukan konsultasi dengan masyarakat ataupun pihak yang berkepentingan.
- (2) Bupati dan DPRD menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu
Pengendalian
Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a. perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 8

- (1) Pengendalian oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Kepala SKPD melakukan pengendalian program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pengendalian Keseluruhan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan

sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

- (4) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (5) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
- (6) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 10

- (1) Evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan; dan
 - b. menghimpun, menganalisis, dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah yang diperlukan

Pasal 11

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) kepada masyarakat. *n m l*

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan dan tindak lanjut pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam peraturan bupati.

BAB VIII
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 13

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - c. merugikan kepentingan provinsi dan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan provinsi dan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan provinsi dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila bertentangan dengan kebijakan provinsi dan nasional.
- (4) RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjalankan pemerintahan pada tahun terakhir, wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya. *N g m a*

- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan RPJMD hingga tahun 2021 terdapat kebijakan Pemerintah yang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD ini maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada Dokumen RKPD yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkenaan dengan pengaturan dan implementasi penyelenggaraan kewenangan/urusan pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kebijakan dibidang keuangan terkait alokasi dana transfer ke Daerah.
- (5) Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka ketentuan mengenai perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba wajib disesuaikan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba.
pada tanggal 19 September 2016

BUPATI BULUKUMBA

A.M.SUKRINA.SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

A.B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 NOMOR 7

NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.7.106.16

mga

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA 2016-2021

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan berpedoman pada kepad Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Janga Panjang Nasional (RPJP Nasional) 2005-2025. Dokumen RPJMD ini merupakan kewajiban yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yang telah melakukan Pemilihan Bupati secara langsung dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

RPJMD ini bukan hanya penjabaran ke dalam program-program pembangunan sektor yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tetapi juga merupakan program pembangunan wilayah yang akan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan di Kabupaten Bulukumba. Artinya RPJMD ini merupakan perwujudan komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Dengan Peraturan Daerah ini memuat gambaran kondisi Kabupaten Bulukumba saat ini serta harapan akan terwujudnya Kabupaten Bulukumba yang sejahtera dimasa yang akan datang dan dituangkan ke dalam visi misi Kabupaten Bulukumba yang dijabarkan ke dalam beberapa agenda kebijakan yang akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bulukumba sebagai Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan Terdepan Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Dilandasi pada Pemerintahan yang Demokratis dan Religius.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas

Handwritten signature or initials

Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 7 TAHUN 2016

Handwritten signature

DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
	1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Lainnya.....	4
	1.4 Sistematika Penyusunan.....	4
BAB II	Gambaran Umum Kondisi Daerah	
	2.1 Aspek Geografi dan Demografi	6
	2.2 Aspek Kesejahteraan Rakyat	17
	2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	21
	2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	39
BAB III	Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan	
	3.1 Kinerja Keuangan Daerah	52
	3.2 Kinerja Keuangan Kab. Bulukumba 2011-2015.....	53
	3.3 Proyeksi Pendapatan Kab. Bulukumba.....	63
	3.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	66
BAB IV	Analisis Isu-isu Strategis	
	4.1 Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah.....	68
	4.2 Isu Strategis.....	72
BAB V	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	
	5.1 Visi.....	78
	5.2 Misi.....	79
	5.3 Tujuan dan Sasaran	83
BAB VI	Strategi dan Arah Kebijakan	
	6.1 Strategi	87
	6.2 Arah Kebijakan.....	92
BAB VII	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.....	107
BAB VIII	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	
	8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas.....	130
BAB IX	Penetapan Indikator Kinerja Daerah	173
BAB X	Penutup	
	10.1 Pedoman Transisi.....	185
	10.2 Kaidah Pelaksanaan.....	185

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Bulukumba.....	6
Tabel 2.2	Persentase Ketinggian Tiap Kecamatan di Kabupaten Bulukumba.....	7
Tabel 2.3	Nama Sungai Untuk Pengairan di Kabupaten Bulukumba.....	8
Tabel 2.4	Rincian Tata Guna Lahan.....	9
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Kab. Bulukumba menurut jenis kelamin Tahun 2015.....	15
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Kab. Bulukumba Tahun 2010-2015.....	15
Tabel 2.7	Jenis Kelamin dan rasio penduduk kab. Bulukumba tahun 2015.....	16
Tabel 2.8	Rata-rata kepadatan penduduk per km tahun 2015.....	17
Tabel 2.9	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bulukumba tahun 2011-2015.....	18
Tabel 2.10	Persentase kontribusi PDRB setiap sektor ekonomi atas dasar harga berlaku tahun 2011-2015.....	19
Tabel 2.11	PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bulukumba dan Sulawesi-selatan tahun 2011-2015.....	20
Tabel 2.12	Realisasi Penyaluran Kredit Perbankan Tahun 2011-2015.....	20
Tabel 2.13	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Tahun 2012-2015	21
Tabel 2.14	Banyaknya Fasilitas Kesehatan yang Dikelolah Pemerintah Menurut Kecamatan Tahun 2011-2015.....	22
Tabel 2.15	Fasilitas Kesehatan Non Pemerintah menurut Kecamatan Di Kab. Bulukumba Tahun 2015.....	22
Tabel 2.16	Jumlah Tenaga Kesehatan Kab. Bulukumba Tahun 2015.....	23
Tabel 2.17	Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi Tahun 2015..	23
Tabel 2.18	Sepuluh Penyakit Terbanyak yang Diderita Masyarakat Tahun 2015.....	23
Tabel 2.19	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun.....	24
Tabel 2.20	APM dan APK menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015.....	24
Tabel 2.21	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid pada Sekolah Dasar di Kab. Bulukumba Tahun 2011-2015.....	25
Tabel 2.22	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Pada SLTP di Kab. Bulukumba Tahun 2011-2015	25
Tabel 2.23	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Pada SLTA di Kab. Bulukumba Tahun 2011-2015.....	25
Tabel 2.24	Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Pada PAUD di Kab. Bulukumba Tahun 2015.....	26
Tabel 2.25	Jumlah guru PNS dan non PNS Negeri/swasta tahun 2015.....	26
Tabel 2.26	Jumlah Sekolah yang Berbasis Keagamaan, Guru dan Murid di Kab. Bulukumba Tahun 2015.....	26
Tabel 2.27	Jumlah Mahasiswa dan Dosen Perguruan Tinggi Swasta di Kab. Bulukumba Tahun 2015.....	27
Tabel 2.28	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kab. Bulukumba Tahun 2011-2015.....	27
Tabel 2.29	Banyaknya Tempat Ibadah menurut Kecamatan, Kabupaten Bulukumba Tahun 2015.....	28
Tabel 2.30	Panjang Jalan Negara dan Provinsi Dirinci menurut Kondisi Jalan dan Konstruksi Jalan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2015.....	30
Tabel 2.31	Panjang Jalan Kabupaten dirinci Menurut Kondisi Jalan dan Konstruksi jalan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015.....	30
Tabel 2.32	Arus Bongkar Muat Barang dan Penumpang pada Pelabuhan Dermaga Leppe'e dirinci Perbulan Tahun 2012-2015.....	31
Tabel 2.33	Lalu Lintas Penumpang dan Barang Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) di Pelabuhan Bira	31
Tabel 2.34	Daftar Daerah Irigasi di Kabupaten Bulukumba tahun 2015.....	32
Tabel 2.35	Jumlah Anggota DPRD menurut partai politik dan jenis kelamin tahun 2015.....	37

Tabel 2.36	Banyaknya Kasus Kriminalitas Menurut Jenisnya di Kabupaten Bulukumba periode 2010-2014.....	38
Tabel 2.37	Jumlah Tindak Pidana menurut Polsek Periode 2013-2015.....	38
Tabel 2.38	Luas Lahan Sawah perKecamatan di Kabupaten Bulukumba 2011-2015.....	40
Tabel 2.39	Luas Lahan Sawah Menurut Irigasi perKecamatan di Kabupaten Bulukumba 2011-2015.....	40
Tabel 2.40	Luas Lahan Bukan Sawah perKecamatan di Kabupaten Bulukumba 2011-2015.....	41
Tabel 2.41	Luas Panen dan Produksi Padi Sawah (GKG) perKecamatan di Kabupaten Bulukumba tahun 2011-2015.....	41
Tabel 2.42	Luas Panen dan Produksi Jagung (Pipilan Kering) perKecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015.....	42
Tabel 2.43	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya dan Jenis Budidaya perKecamatan di Kabupaten Bulukumba tahun 2011-2015.....	43
Tabel 2.44	Produksi Perikanan Hasil Budidaya (Ton) Kabupaten Bulukumba tahun 2011-2015.....	44
Tabel 2.45	Jumlah Populasi Ternak perKecamatan di Kabupaten Bulukumba tahun 2011-2015 (ekor).....	45
Tabel 2.46	Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Penetapan Surat Keputusan Menteri Kehutanan.....	46
Tabel 2.47	Luas Areal Produksi dan Banyaknya Petani Komoditi Kelapa dalam PerKecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015.....	46
Tabel 2.48	Luas Areal Produksi dan Banyaknya Petani Komoditi Tembakau perKecamatan di Kabupaten Bulukumba tahun 2011-2015.....	46
Tabel 2.49	Luas Areal Produksi dan Banyaknya Petani Komoditi Kakao perKecamatan di Kabupaten Bulukumba tahun 2011-2015.....	47
Tabel 2.50	Luas Areal Produksi dan Banyaknya Petani Komoditi Karet dalam Perkecamatan Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015 (Diluar yang Dikelola PT. Lonsum)	47
Tabel 2.51	Luas Areal Produksi dan Banyaknya Petani Komoditi Kapas perKecamatan di Kabupaten Bulukumba tahun 2011-2015.....	48
Tabel 2.52	Jumlah Wisatawan Asing dan Domestik Yang Datang KeKabupaten Bulukumba Tahun 2010-2015.....	50
Tabel 3.1	Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015.....	54
Tabel 3.2	Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015.....	58
Tabel 3.3	Kinerja Pembiayaan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015.....	60
Tabel 3.4	Kondisi Neraca Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2015.....	61
Tabel 3.5	Pendapatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021.....	65
Tabel 5.1	Penjelasan Pokok-Pokok Visi dan Penjelasan Visi.....	78
Tabel 5.2	Keterkaitan Misi RPJPD dengan RPJMD.....	80
Tabel 5.3	Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional....	81
Tabel 5.4	Keterkaitan Program Prioritas dengan Misi RPJMD.....	82
Tabel 5.5	Hirarki Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan RPJMD	84
Tabel 6.1	Strategi Pembangunan RPJMD.....	87
Tabel 6.2	Arah Kebijakan.....	97
Tabel 7.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.....	108
Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan.....	130
Tabel 9.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah.....	174

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 2.1	Persentase Jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Kecamatan tahun 2015.....	16
Gambar 2.2	Persentase Jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015.....	17
Gambar2.3	Persentase Pertumbuhan PDRB Kab.Bulukumba Tahun 2011-2015...	18
Gambar2.4	Persentase Kontribusi PDRB ADHB tahun 2015.....	19
Gambar 2.5	PDRB Perkapita Kab.Bulukumba dan Prov Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015.....	20
Gambar 2.6	Persentase 10 Penyakit Terbanyak.....	24
Gambar 2.7	Persentase Jumlah Penduduk berdasarkan Agama Tahun 2015.....	28
Gambar 2.8	Persentase Jalan nasional, provinsi dan kabupaten berdasarkan kondisi jalan tahun 2015.....	31
Gambar 2.9	Persentase Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba.....	37
Gambar 2.10	Persentase Kriminalitas Berdasarkan Jenis Kejahatan Tahun 2015.....	39
Gambar 2.11	Produksi padi Sawah dan Jagung di Kab.Bulukumba Tahun 2011-2015	42
Gambar 2.12	Produksi hasil Budidaya Perikanan Tahun 2011-2015.....	44
Gambar 2.13	Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak di Kab.Bulukumba Tahun 2012-2015.....	45
Gambar 2.14	Produksi Sektor Perkebunan Unggulan Kab.bulukumba Tahun 2011-2015.....	48
Gambar 2.15	Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2010-2015.....	51
Gambar 2.16	Persentase Wisatawan berdasarkan Asal di Kab.Bulukumba Tahun 2015.....	51
Gambar 3.1	Grafik Pendapatan Daerah Kab.Bulukumba Tahun 2011-2015.....	55
Gambar 3.2	Pendapatan Kab.Bulukumba Tahun 2011-2015 Berdasarkan Jenis Kelompok Pendapatan.....	56
Gambar 3.3	Grafik Rata-Rata Belanja Daerah Kab.Bulukumba Tahun 2011-2015.....	59
Gambar 3.4	Grafik Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kab.Bulukumba Tahun 2011-2015.....	61
Gambar 3.5	Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015.....	66

KATA PENGANTAR

RPJMD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang menjadi acuan dan sebagai arahan dalam pelaksanaan pembangunan. Dokumen RPJMD disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang selanjutnya dijabarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah kedalam Rencana Strategi (Renstra) SKPD. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanahkan penyusunan RPJMD sebagai pedoman pembangunan lima tahunan.

Dalam penyusunan RPJMD ini telah memperhatikan aspirasi masyarakat dan merupakan konsekuensi dari terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati, juga tetap memperhatikan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang dan menengah Nasional dan provinsi serta dokumen perencanaan lainnya

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana yang tersebut diatas, pendekatan penyusunan RPJMD harus bersifat teknokratik yang menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta bersifat partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholder. Dokumen RPJMD ini diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan seluruh lapisan masyarakat Bulukumba untuk mencapai visi **"MASYAKAT BULUKUMBA YANG SEJAHTERA DAN TERDEPAN MELALUI OPTIMALISASI POTENSI DAERAH DENGAN PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN YANG DILANDASI PADA PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DAN RELIGIUS"**

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulukumba sesuai tujuan yang kita cita-citakan bersama. Amin

Bulukumba, September 2016


BUPATI BULUKUMBA
A.M. SUKRIA SAPPEWALI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan rencana pembangunan daerah dimaksud dirumuskan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, dan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 23 ayat (2) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama kurun waktu 5 tahun.

RPJMD Kabupaten Bulukumba merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba periode Tahun 2016-2021 yaitu Bupati Bulukumba A.M. Sukri A.Sappewali dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto yang dilantik oleh Gubernur Sulawesi-Selatan An. Menteri Dalam Negeri RI pada rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi-Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Pebruari 2016 di Makassar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-532 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bulukumba berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032, sebagai pedoman penyelenggaraan tata cara dan tahapan pelaksanaan pembangunan daerah yang terdiri dari proses penyusunan kebijakan, penyusunan program, penyusunan alokasi pembiayaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan rencana program dan alokasi pembiayaan program.

RPJMD Kabupaten Bulukumba merupakan dasar pembangunan selama kurun waktu 5 tahun dimana pada setiap tahunnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra SKPD, Renja SKPD, KUA dan PPAS yang merupakan pedoman awal penyusunan APBD tahun berjalan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan serta memperhitungkan tantangan yang akan dihadapi selama periodisasi RPJMD tersebut sehingga pada akhirnya dapat melahirkan perubahan positif bagi masyarakat Kabupaten Bulukumba.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

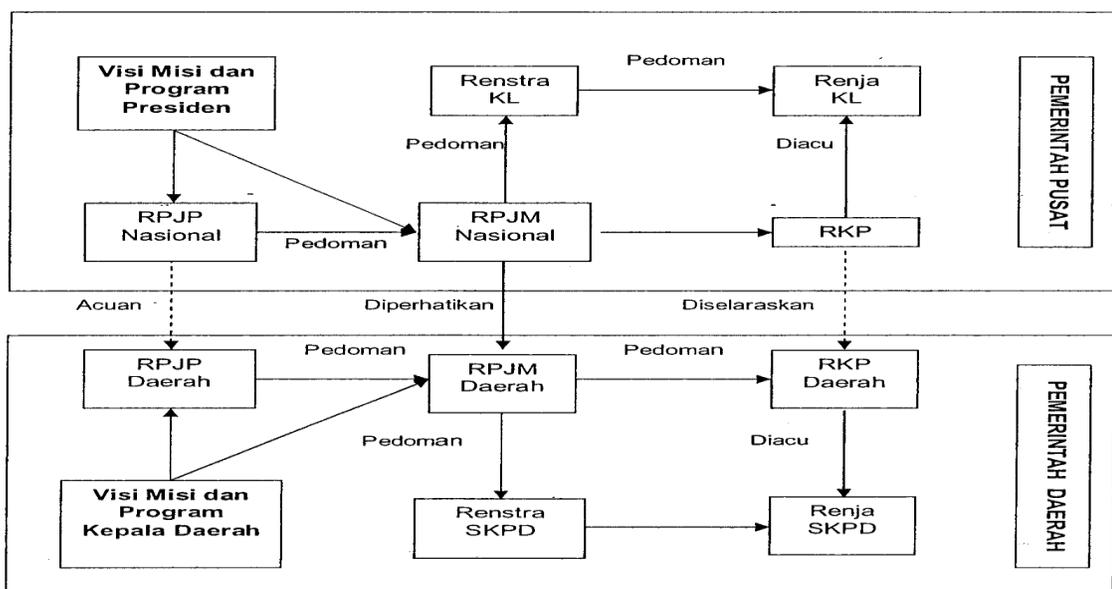
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-532 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 9);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 6);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 11);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Tehnis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 Nomor 8);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 12);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 13);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 5);

1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Lainnya

Dilihat dari fungsi dan kedudukannya maka RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 mempunyai posisi strategis dalam menjamin pembangunan Kabupaten Bulukumba dalam kurun waktu 5 tahun, dimana RPJMD tersebut merupakan induk dari perencanaan lima tahunan di Kabupaten Bulukumba yang akan menjadi acuan bagi satuan kerja pemerintah daerah dalam kerangka pembangunan yang sifatnya indikatif dan terukur. Secara keterkaitan maka hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 terdiri dari 10 bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penyusunan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 yang terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Lainnya, Sistematika Penulisan serta Maksud dan Tujuan Penyusunan.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan dan menyajikan Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Bulukumba beberapa tahun terakhir, yang meliputi Aspek

Geografi dan Demografi Daerah, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.

BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan

Pada Bab ini menguraikan tentang hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Kinerja Keuangan Periode Sebelumnya, dan Kebijakan Keuangan Periode Sebelumnya.

BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis

Bab ini berisi penyajian isu-isu strategis permasalahan pembangunan daerah dengan memperhatikan isu global, dan perumusan isu strategis daerah.

BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini menggambarkan visi, misi tujuan dan sasaran kepala daerah terpilih dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Bulukumba

BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan

Pada Bab ini menguraikan terkait strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bulukumba terkait fokus pembangunan tahun berjalan selama periode tahun 2016-2021.

BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Pada bab ini menggambarkan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Bulukumba selama periode bersangkutan yang memuat arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi, serta implementasi kebijakan umum kedalam program pembangunan daerah.

BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Pada bab ini menggambarkan rencana program prioritas dengan kerangka pendanaan yang memuat target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan terhadap target kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Bab ini menggambarkan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran terukur terhadap keberhasilan kepala daerah dalam menjalankan visi, misi selama periode masa jabatan

BAB X Penutup

Bab ini menguraikan tentang keberadaan RPJMD dalam penyusunan RKPD serta posisi RPJMD terhadap Renstra SKPD dalam pelaksanaan dan penerapan RPJMD oleh seluruh pemangku kepentingan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografis

Kondisi daerah merupakan hal yang penting dalam mendukung secara fisik dalam pengembangan suatu daerah. Faktor fisik memberikan penilaian tentang kemampuan lahan dan kesesuaian lahan yang dijadikan lokasi perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, maupun penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

2.1.1.1 Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Bulukumba secara geografis terletak di antara 05°20'-05°40' Lintang Selatan (LS) dan 119°58'-120°28' Bujur Timur (BT) dengan batas-batas administrasi:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Teluk Bone dan Kepulauan Selayar

Secara administratif Kabupaten Bulukumba berada dalam daerah Provinsi Sulawesi Selatan, terbagi dalam 10 kecamatan yang meliputi 136 desa/kelurahan terdiri dari 27 kelurahan dan 109 desa. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba meliputi; darat seluas 1.154,67 km² dan laut. Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki kewenangan sejauh 4 mil laut dari garis pantai ke arah laut = 237,67 km², dengan panjang garis pantai = 128 km yang berada pada 7 kecamatan pesisir, yaitu: Kecamatan Gantarang, Ujungbulu, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Herlang, dan Kecamatan Kajang.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Bulukumba

	Luas (km ²)	Persentase Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa/ Kelurahan
Gantarang	173,51	15,03	21
Ujungbulu	14,44	1,25	9
Ujung Loe	144,31	12,50	13
Bontobahari	108,60	9,40	8
Bontotiro	78,34	6,78	13
Herlang	68,79	5,96	8
Kajang	129,06	11,18	19
Bulukumpa	171,33	14,84	17
Rilau Ale	117,53	10,18	15
Kindang	148,76	12,88	13
Jumlah	1.154,67	100,00	136

Sumber: Bulukumba Dalam Angka Tahun 2016

2.1.1.2 Ketinggian

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28 persen maka dataran tinggi mencapai 49,72 persen.

Tabel 2.2
Persentase Ketinggian Tiap Kecamatan di Kabupaten Bulukumba

NO	Kecamatan	KETINGGIAN					TOTAL (mdpl)
		0 - 25 (mdpl)	25 - 100 (m dpl)	100 - 500 (mdpl)	500 - 1000 (mdpl)	>1000 (mdpl)	
1	Gantarang	39	38	23	-	-	100,00
2	Ujungbulu	100	-	-	-	-	100,00
3	Ujung Loe	35	65	-	-	-	100,00
4	Bontobahari	30	45	25	-	-	100,00
5	Bontotiro	6	36	58	-	-	100,00
6	Herlang	6	57	36	-	-	100,00
7	Kajang	21	49	30	-	-	100,00
8	Bulukumpa	-	8	71	22	-	100,00
9	Rilau Ale	-	24	58	18	-	100,00
10	Kindang	-	-	40	26	34	100,00
BULUKUMBA		24	32	34	7	3	100,00

Sumber: Bulukumba Dalam Angka 2016

2.1.1.3 Klimatologi

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82°C-27,68°C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis *Smith-Ferguson* (tipe iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembab atau agak basah.

Kabupaten Bulukumba berada di bagian Timur, musim gadu antara Oktober-Maret dan musim rendengan antara April-September. Terdapat 8 buah stasiun penakar hujan yang tersebar di beberapa kecamatan yakni: Stasiun Bettu, Stasiun Bontonyeleng, Stasiun Kajang, Stasiun Batukaropa, Stasiun Tanah Kongkong, Stasiun Bontobahari, Stasiun Bulu-Bulu, dan Stasiun Herlang.

Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah Barat Laut dan Timur sedangkan pada daerah Tengah memiliki curah hujan sedang dan pada bagian Selatan curah hujannya rendah. Adapun data curah hujan sebagai berikut:

1. Curah hujan antara 800-1.000 mm/tahun meliputi Kecamatan Ujungbulu, sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian besar Kecamatan Bontobahari.
2. Curah hujan antara 1.000-1.500 mm/tahun meliputi sebagian Kecamatan Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian Kecamatan Bontotiro.
3. Curah hujan antara 1.500-2.000 mm/tahun meliputi Kecamatan Gantarang, sebagian Rilau Ale, sebagian Ujung Loe, sebagian Kindang, sebagian Bulukumpa, sebagian Bontotiro, sebagian Herlang, dan Kecamatan Kajang.
4. Curah hujan diatas 2.000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, Rilau Ale, Bulukumpa, dan Kecamatan Herlang.

2.1.1.4 Jenis Tanah

Tanah di Kabupaten Bulukumba didominasi jenis tanah Latosol yang lebih dikenal dengan tanah dalam tekstur lempung, dan Mediteran yang merupakan hasil pelapukan batuan kapur keras dan batuan sedimen. Secara spesifik terdiri atas tanah *Alluvial Hidromorf* atau jenis tanah yang bersifat hidromorf dan berwarna kelabu, coklat dan hitam dengan bahan induk endapan liat pasir terdapat dipesisir pantai dan sebagian di daratan bagian utara. Sedangkan tanah regosol dan mediteran terdapat pada daerah-daerah bergelombang sampai berbukit di wilayah bagian barat.

2.1.1.5 Hidrologi

Sungai di Kabupaten Bulukumba ada 43 aliran dengan panjang keseluruhan 772,5 km dan debit 57,668 m³/dtk yang mampu mengairi lahan sawah 23.151 ha meskipun ada beberapa sungai yang belum disurvei debitnya.

Tabel 2.3
Nama Sungai untuk Pengairan di Kabupaten Bulukumba

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Luas Lahan Sawah yang Diairi (Ha)	Debit (M ³ /Det)	Hulu	Muara
1	Maesa	10,30	150	0,230	Banyorang	Jampue/S.Bialo
2	Bialo	54,50	6.251	14,153	G.Lompobatang	Laut Flores
3	Biangkeke	19,20	411	1,296	Borongrappoa	Dampng/S.Bialo
4	Balibo	5,00	110		Balibo	S.Biangkeke
5	Borongloe	11,50	195	0,096	Bungi	S.Bangkeke
6	Laumang	7,00	60		Borong Rappoa	S.Biangkeke
7	Kalamassang	11,50	495		Ompoe	Laut Flores
8	Bontosuggu	21,00	575	0,92	Dampang	Laut Flores
9	Bijawang	49,20	1.282	7,527	G.Lompobatang	Laut Flores
10	Anruling	13,30			Sapaya	Oro/S. Bijawang
11	Matilu	10,60			Latai	S. Bijawang
12	Bilng Rea	15,50	80	0,349	Bukit Harapan	S. Bijawang
13	Bilang Parusu	12,00	35	0,157	Bukit Harapan	S. Bilangrea
14	Palioi	11,00	495	0,885	Garuntungan	S. Bijawang
15	Kirasa	30,40	618	1,667	Anrihua	S. Bijawang
16	Balikonrong	8,40	100		Borongparring	S. Kirasa
17	Bintanaja	8,00	297	0,606	Uluarang	S. Kirasa
18	Tuli	6,50	166		Palioi	Ponci/ S. Kirasa
19	Balangtieng	56,00	4.628	13,336	G.Bawakaraeng	Laut Flores
20	Kahaya	9,50			G.Bawakaraeng	S. Balangtieng
21	Oddungen	6,90	80	0,080	Bulu Sapaya	S. Balangtieng
22	Hisang	12,90	439	0,790	Sapaya	S. Balangtieng
23	Latai	6,20			Anruling	Latai/S. Hisang
24	Pasimbungan	7,50			Bulu Leppa	S. Balangtieng
25	Llli	6,50	150	0,264	Dusun Batu	S. Balangtieng
26	Balangtiengkeke	10,00	275	0,869	Panaikang	S. Balangtieng
27	Sampeang	8,00	35		Batupangka	S. Balangtieng
28	Topanda	17,80	375	0,719	Talle-talle	S. Balangtieng
29	Anyorang	56,00	2.339	6,478	Dusun Batu	Laut Flores
30	Kambuno	9,00	315	0,304	Kambuno	S. Anyorang
31	Oro/Ereminya	7,00	145	0,56	Jennae	S. Kambuno
32	Serre	6,50	95		Mattunggaleng	S. Kambuno
33	Balangkessi	65,30	1.061	2,931	Mattoanging	Laut Flores
34	Salo Dua	19,00	295	0,434	Mannyaha	S. Balombisi
35	Pakombong	20,30	525	1,014	Barugae	S. Balombisi
36	Bikatala	19,70	75	0,120	Sarajoko	Jojjolo/S. Galoggo
37	Galoggo	17,20	105	0,567	Salajuang	S. Balombisi
38	Ta'getung	7,50	195	0,500	Enrulamung	S. Aparang
39	Lolisang	34,30	369	0,376	Waepeje	Teluk Bone
40	Bobo	12,50	40	0,152	Balangriri	Sapaya/S. Lolisang
41	Raowa	18,50	80	0,144	Malleleng	Kassi/Teluk Bone
42	Jelepeng	20,00	80	0,144	Tanah Toa	S. Raowa
43	Kanaria	13,50	130		Bontotiro	S. Bampang
JUMLAH		772,5	23.151	57.668		

Sumber: Bulukumba Dalam Angka 2016

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Pola tata guna lahan pada dasarnya adalah merupakan gambaran ruang dari hasil kegiatan manusia, tingkat teknologi dan keadaan fisik daerah. Pola tata guna lahan pada suatu daerah merupakan cermin kegiatan manusia yang bermukim di daerah tersebut dalam mengusahakan dan memanfaatkan lahan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah guna memenuhi kebutuhan hidup.

Wilayah Kabupaten Bulukumba memiliki luas 1.154,67 km², berdasarkan peta penggunaan lahan hasil interpretasi citra satelit, peta penggunaan lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bulukumba.

Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Bulukumba sebagian besar didominasi oleh lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Untuk konservasi lahan di daerah ini masih terdapat beberapa lokasi kawasan hutan yang tersebar di 6 kecamatan dengan luas keseluruhan 8.453,25 hektar. Akan tetapi di kecamatan tersebut masih terdapat beberapa lahan kritis yang sebagian besar terdapat di 2 kecamatan yaitu Bontobahari dan Kindang.

Tata guna lahan setiap tahun selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam memenuhi kegiatan perekonomian atau pembangunan sarana fisik oleh Pemerintah Daerah. Kecenderungan yang terjadi dan harus mendapatkan perhatian adalah perubahan tata guna lahan pertanian yang berubah menjadi lahan non pertanian serta perubahan lahan hutan menjadi lahan pertanian, permukiman atau aktifitas yang lain yang dapat mengganggu esistensi hutan. Tata guna lahan untuk pertanian adalah, pemanfaatan lahan untuk aktifitas pertanian, seperti sawah, ladang, tegalan, kebun, hutan dan tambak, sedangkan tata guna lahan untuk non pertanian dapat berupa permukiman, industri, kantor, pusat perbelanjaan dan lain-lain.

Tiga kecamatan yang mengalami perubahan penggunaan lahan dari pertanian menjadi non pertanian antara lain terdapat di wilayah Kecamatan Bulukumpa, Kajang, dan Kindang. Kegiatan lain yang diperoleh adalah adanya pertambangan tanah liat di lahan persawahan, sebagai bahan baku bata merah, seperti di wilayah Kecamatan Ujungloe. Dari sub sektor pertanian, pertambangan tanah liat tersebut dapat merugikan, karena mengurangi luas lahan produksi dan menyisakan tanah dengan kualitas kesuburan tanah yang lebih rendah.

Penurunan luas lahan pertanian jelas akan memperbesar angka kepadatan penduduk agraris di Kabupaten Bulukumba. Kepadatan penduduk agraris yang semakin besar menggambarkan semakin besarnya jumlah penduduk yang harus ditanggung kehidupannya oleh setiap luas lahan pertanian. Informasi lain yang diperoleh pada saat inventarisasi data lapangan, adalah adanya perubahan tata guna lahan yang lain yang juga dapat mempunyai dampak buruk karena adanya aktivitas pembukaan hutan sebagai ladang berpindah, jenis tanaman semusim atau untuk pertanian tanaman perkebunan. Dampak dari perubahan fungsi hutan, saat ini telah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kejadian longsor dan banjir yang terjadi di bagian hilir sungai dan dataran rendah di Kabupaten Bulukumba.

Pada intinya bahwa, wilayah Kabupaten Bulukumba terdiri dari dua bagian utama yaitu; kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung luas ± 11.833,47 Ha (10,25 persen) dan kawasan budidaya luas ± 103.633,53 Ha (89,75 persen) dari luas wilayah Kabupaten Bulukumba. Wilayah budidaya sudah diperuntukan untuk kepentingan pembangunan sektoral antara lain di sektor pertanian, industri, dan sosial lainnya. Luas dan letak masing-masing peruntukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Rincian Tata Guna Lahan di Kabupaten Bulukumba

No.	Jenis Peruntukan	Luas (Ha)	Lokasi
1	Pemukiman	3.502,81	Tersebar disemua kecamatan, terutama kecamatan Ujung Bulu yang wilayahnya merupakan

No.	Jenis Peruntukan	Luas (Ha)	Lokasi
			ibukota Kabupaten Bulukumba
2	Persawahan	20.737,06	Kecamatan Gantarang, Ujung Bulu, Rilau ale dan Bulukumpa
3	Kebun campur	22.229,39	Tersebar di semua Kecamatan, kecuali Kecamatan Ujung Bulu
4	Tegalan / Kawasan Perikanan	26.105,29	Kec. Gantarang, bagian selatan, Kec. Ujung Bulu, bagian timur, Kec. Ujung Loe, bagian barat, Kec. Bontobahari dan Kajang
5	Perkebunan	15.565,76	Diarahkan untuk semua kecamatan, kecuali Kecamatan Ujung Bulu.
6	Kawasan lindung	15.493,21	
	Kawasan yg memberi perlindungan terhadap kawasan bawahnya	6.394	Kecamatan Kindang dan Bulukumpa
	Kawasan perlindungan Setempat	107,5	Kecamatan Ganttarang
		118,7	Kecamatan Ujung Bulu
		121,9	Kecamatan Ujung Loe
		475	Kecamatan Bonto Bahari
		105,6	Kecamatan Bonto Tiro
		155,6	Kecamatan Herlang
		187,5	Kecamatan Kajang
	Kawasan suaka alam	3.475	Kecamatan bonto Bahari
		331,17	Kecamatan Kacang
	Hutan bakau	30	Kecamatan Ujung Bulu
		170	Kecamata Ujung Loe
		199	Kecamatan Kajang
		100	Kecamatan Herlang
		25	Kecamatan Bonto Tiro
		25	Kecamatan Gantarang
7	Penggunaan lain-lain	15.493,21	

Sumber: BPN Kab. Bulukumba, 2016

Pengembangan wilayah kabupaten bulukumba diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan Bulukumba sebagai pusat kegiatan wilayah dibidang agroindustri, pertanian, perikanan dan pariwisata

Arahan sistim jaringan struktur ruang wilayah nasional di Sulawesi Selatan, Bulukumba untuk sistim jaringan transfortasi nasional terdapat jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalur kereta api dan lintas penyeberangan antarpulau. Sedangkan arahan pola ruang wilayah nasional di Sulawesi Selatan Bulukumba untuk kawasan lindung nasional terdapat taman hutan raya Bontobahari dan kawasan budidaya strategis adalah kawasan andalan Bulukumba adalah pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan dan kawasan laut teluk bone untuk perikanan dan pariwisata.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bulukumba yang diklasifikasi sesuai dengan penetapan kawasan dalam RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 yang memiliki potensi pengembangan wilayah dibagi terhadap beberapa kawasan yang secara eksplisit dapat dilihat sebagai berikut:

a. Kawasan Lindung, yang terdiri atas:

- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yang ditetapkan dengan tujuan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan. Secara spesifik kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dibagi atas dua kawasan yakni kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air dimana untuk kawasan hutan lindung dengan luas 7.850 Ha yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sedangkan kawasan resapan air ditetapkan di wilayah Kecamatan Kindang, dan sebagian wilayah Kabupaten Bulukumba.
- Kawasan perlindungan setempat;
Kawasan perlindungan setempat terdiri atas kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau, kawasan sekitar mata air, kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal serta ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya terbagi atas tiga kawasan yakni kawasan pantai berhutan bakau, kawasan taman hutan raya, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Untuk kawasan pantai berhutan bakau, ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Gantarang dengan luasan 30 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu dengan luasan 50 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe dengan luasan 170 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari dengan luasan 5 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Bonto Tiro dengan luasan 25 Ha sebagian wilayah Kecamatan Herlang dengan luas 100 Ha, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang dengan luasan 100 Ha. Untuk Kawasan Taman Hutan Raya Bontobahari ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, dengan luasan 3.475 Ha, sedangkan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan di kawasan puncak Pua Janggo Kecamatan Bonto Bahari, Kawasan Makam Datu Tiro di Kecamatan Bontobahari, Kawasan makam Karaeng Ambibia di Kecamatan Bontotiro, dan kawasan makam Karaeng Sapohatu juga di Kecamatan Bontotiro.

b. Kawasan Rawan Bencana Alam

Untuk kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Bulukumba dibagi menjadi dua yaitu kawasan rawan banjir dan kawasan rawan tanah longsor, yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe; dan Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang.

c. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung Geologi di Kabupaten Bulukumba terbagi menjadi dua kawasan yaitu kawasan cagar alam geologi dan kawasan rawan bencana alam geologi. Kawasan cagar alam geologi merupakan kawasan dengan keunikan batuan dan fosil meliputi hampir diseluruh kawasan Kecamatan di Kabupaten Bulukumba,

d. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan Lindung Lainnya ditetapkan untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya dimana untuk kawasan lindung lainnya di Kabupaten Bulukumba merupakan kawasan konservasi laut dengan luasan 733 Ha yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari.

e. Kawasan Budidaya

Berdasarkan jenis peruntukannya, kawasan budidaya di Kabupaten Bulukumba terdiri atas sembilan jenis kawasan peruntukan yaitu sebagai berikut:

- Kawasan peruntukan Hutan Produksi
Kawasan hutan produksi di Kabupaten Bulukumba dengan luas kawasan 1.972 Ha ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, Bontobahari, Bontotiro, dan sebagian Kecamatan Ujungbulu.
- Kawasan peruntukan Hutan Rakyat
Untuk kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Bulukumba dengan luas mencapai 22.273 Ha ditetapkan di sebagian wilayah pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba.
- Kawasan peruntukan Pertanian
Berdasarkan klasifikasi jenisnya, maka kawasan pertanian di Kabupaten Bulukumba terbagi atas empat jenis kawasan peruntukan pertanian yakni, kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan pertanian hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, dan kawasan peruntukan peternakan. Untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan luasan 62.975 Ha yang terdiri dari beberapa komoditas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, untuk kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan dan sayur-sayuran ditetapkan pada sebagian wilayah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba dengan luas area sebesar 2.700 Ha, kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 23.916 Ha juga tersebar di sebagian wilayah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, sedangkan untuk kawasan peruntukan peternakan juga tersebar di sebagian wilayah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba dengan berbagai jenis spesies ternak.
- Kawasan peruntukan Perikanan
Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Bulukumba berdasarkan jenis klasifikasi peruntukannya terbagi atas tiga yaitu kawasan peruntukan perikanan tangkap yang ditetapkan pada tujuh Kecamatan yang memiliki wilayah pesisir dan laut, Kecamatan Gantarang, Ujungbulu, Ujung Loe, Bonto, kawasan peruntukan budidaya perikanan di tetapkan di sebagian wilayah pada delapan Kecamatan di Kabupaten Bulukumba yakni Kecamatan Ujungbulu, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Herlang, Kajang dan Kecamatan Gantarang, sedangkan untuk kawasan pengolahan ikan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, Gantarang, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro dan Kecamatan Herlang. Untuk kawasan peruntukan perikanan yang akan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi sebagai kawasan minapolitan ditetapkan di Kecamatan Kajang sebagai pusat pengembangan dan sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu, Gantarang, Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Bontotiro, dan Kecamatan Herlang ditetapkan sebagai zona penyanggah.
- Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan terdiri atas usaha pertambangan mineral dan batubara yang ditetapkan di sebagian wilayah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, sedangkan pertambangan minyak dan gas bumi ditetapkan di wilayah perairan laut Kabupaten Bulukumba yang meliputi sebagian wilayah Kajang, Bontobahari, Bontotiro, Herlang dan Kecamatan Gantarang.

- Kawasan peruntukan industri
Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Bulukumba terdiri atas tiga jenis kawasan peruntukan yaitu kawasan peruntukan industri besar yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang dengan jenis industri pengolahan kapas dan pengolahan kayu, Kecamatan Ujung Loe, dan Bulukumpa dengan jenis industri pengolahan karet, kawasan peruntukan industri sedang yang merupakan pembuatan industri kapal ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sedangkan kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, Ujung Loe, Ujungbulu, Bontotiro, Herlang, Kindang, Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa.
- Kawasan peruntukan pariwisata
Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Bulukumba dibagi atas tiga jenis kawasan peruntukan yaitu:
 1. Kawasan Peruntukan Wisata Budaya, terdiri atas:
 - Kawasan adat Amma Toa Kajang, di Kecamatan Kajang.
 - Kawasan makam Samparaja Karaeng Sapo Batu, di Desa Tri Tiro Kecamatan Bontotiro.
 - Kawasan situs Pua Jango, di Desa Bira Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan situs Karangpuang, di Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa.
 - Kawasan makam Al-Maulana Khatib Bungsu (Dato Tiro), di Hila-hila Kecamatan Bontotiro.
 - Kawasan makam Launru Daeng Biasa (Karaeng Ambibia) di Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro.
 2. Kawasan Peruntukan Wisata Alam, terdiri dari:
 - Kawasan Gua Passohara, di Desa Ara Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Gua Malukua, di Desa Bira Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Gua Liukang Panikia, di Desa Bira Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Perkebunan Karet, di Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Kajang, dan Kecamatan Bulukumpa.
 - Kawasan Pantai Pasir Putih Tanjung Bira, di Desa Bira Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Pantai Pasir Putih Lemo-lemo di Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Pantai Mandala Ria, di Desa Ara Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Pantai Samboang, di Samboang Kecamatan Bontotiro.
 - Kawasan Pulau Liukang Loe, di Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Permandian alam Limbua, di Kecamatan Bontotiro.
 - Kawasan Permandian Sumur Panjang, di Hila-hila Kecamatan Bontotiro.
 - Kawasan Permandian Alam Bravo di Kelurahan Borong Rappoa di Kecamatan Kindang.
 - Kawasan Danau Buhung Tujuh Kahayya, di Desa Kindang Kecamatan Kindang.
 - Kawasan Pantai Panrang Luhu, di Desa Bira Kecamatan Bontobahari

- Kawasan Pantai Marumasa, di Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Pantai Kasuso, di Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Permandian Alam Seppenge' di Desa Bontomate'ne Kecamatan Rilau Ale.
 - Kawasan Permandian Alam Bombang Tellue di Kecamatan Rilau Ale. dan
 - Kawasan Permandian Alam Kantang, Jodoh di Desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale.
 -
3. Kawasan Peruntukan Pariwisata Buatan, terdiri dari:
- Kawasan Agrowisata di Kecamatan Bulukumpa dan Rilau Ale
 - Kawasan Pembuatan Perahu Phinisi, di Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Agrowisata Tambak di Kecamatan Ujung Loe.
 - Kawasan Dermaga Leppe'E di Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujungbulu.
- Kawasan peruntukan permukiman
Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas dua jenis peruntukan permukiman yaitu kawasan peruntukan permukiman perkotaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya, dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan Adapun kawasan perkotaan di tetapkan sebagai berikut:
 - Kawasan peruntukan lainnya
- f. Kawasan Strategis Kabupaten
- Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan di:
- a. Kawasan pengembangan perkotaan *water front city* di Kecamatan Ujungbulu dan Kecamatan Gantarang;
 - b. Kawasan pengembangan minapolitan merupakan kawasan *marine politan center*, terdiri dari:
 - 1. kawasan minapolitan untuk pengembangan komoditas budidaya perikanan laut ditetapkan pada kawasan pesisir dan laut Kecamatan Gantarang, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Ujungbulu, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Ujung Loe, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontobahari, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontotiro, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Herlang, dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Kajang; dan
 - 2. kawasan minapolitan untuk pengembangan komoditas perikanan tangkap ditetapkan di seluruh wilayah Kecamatan pesisir dan dipusatkan di Kecamatan Kajang.
 - 3. kawasan pusat pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Gantarang;
 - 4. kawasan agrowisata di Desa Bululohe Kecamatan Rilau Ale;
 - 5. kawasan pusat pengembangan pariwisata di Kecamatan Bontobahari; kawasan perdagangan di Kecamatan Ujungbulu dan Kecamatan Gantarang;
 - 6. kawasan Bandar Udara Pengumpan di Kecamatan Bontobahari; dan
 - 7. kawasan ekowisata Tabbuakkang di Kecamatan Kindang.
 - c. KSK dengan sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan di Kawasan pembuatan Perahu Pinisi di Kecamatan Bontobahari;

- d. KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup ditetapkan di Kawasan Danau Kahaya di Kecamatan Kindang
- e. Kawasan pusat pengembangan agropolitan ditetapkan akan dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

2.1.2 Aspek Demografi

2.1.2.1 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Bulukumba tahun 2015 mencapai 410.485 jiwa, dengan kepadatan penduduk 355 jiwa per km. Ini berarti mengalami peningkatan 0,66 persen dari tahun 2014.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Bulukumba menurut jenis kelamin 2015

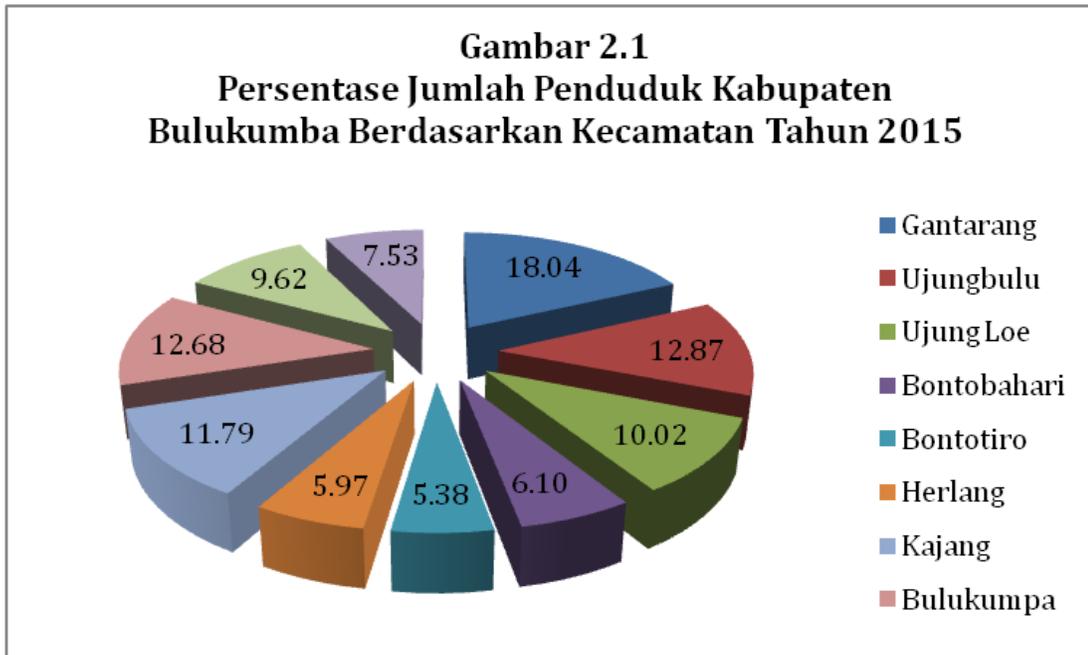
KODE	KECAMATAN	JENIS KELAMIN				PENDUDUK n(Jiwa) (%)	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		n(Jiwa)	(%)	n(Jiwa)	(%)		
730201	GANTARANG	41.005	9,41	40.128	9,21	81.133	18,62
730202	UJUNG BULU	25.577	5,87	25.384	5,82	50.961	11,69
730203	BONTO BAHARI	14.689	3,37	14.711	3,38	29.400	6,75
730204	BONTOTIRO	14.333	3,29	14.745	3,38	29.078	6,67
730205	HERLANG	14.262	3,27	14.630	3,36	28.892	6,63
730206	KAJANG	22.993	5,28	23.106	5,30	46.099	10,58
730207	BULUKUMPA	25.922	5,95	26.418	6,06	52.340	12,01
730208	KINDANG	16.015	3,67	15.650	3,59	31.665	7,27
730209	UJUNG LOE	22.727	5,21	22.878	5,25	45.605	10,46
730210	RILAU ALE	20.094	4,61	20.543	4,71	40.637	9,32
7302	KAB. BULUKUMBA	217.617	49,93	218.193	50,07	435.810	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2016

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Kabupaten Bulukumba 2010-2015

No	Kecamatan	2010 (jiwa)	2011 (jiwa)	2012 (jiwa)	2013 (jiwa)	2014 (jiwa)	2015 (jiwa)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gantarang	71.158	71.741	72.183	72.891	73.545	74.061
2	Ujungbulu	48.126	48.518	48.816	49.298	51.916	52.832
3	Ujung Loe	39.533	39.859	40.105	40.496	40.834	41.114
4	Bontobahari	23.976	24.180	24.328	24.561	24.848	25.040
5	Bontotiro	22.808	23.004	23.146	23.365	22.237	22.075
6	Herlang	24.128	24.332	24.481	24.717	24.452	24.507
7	Kajang	47.080	47.467	47.764	48.227	48.188	48.411
8	Bulukumpa	50.835	51.252	51.568	52.073	51.861	52.059
9	Rilau Ale	37.809	38.121	38.358	38.730	39.174	39.473
10	Kindang	29.815	30.057	30.241	30.542	30.720	30.913
	BULUKUMBA	395.268	398.531	400.990	404.900	407.775	410.485

Sumber: Bulukumba Dalam Angka 2011-2016



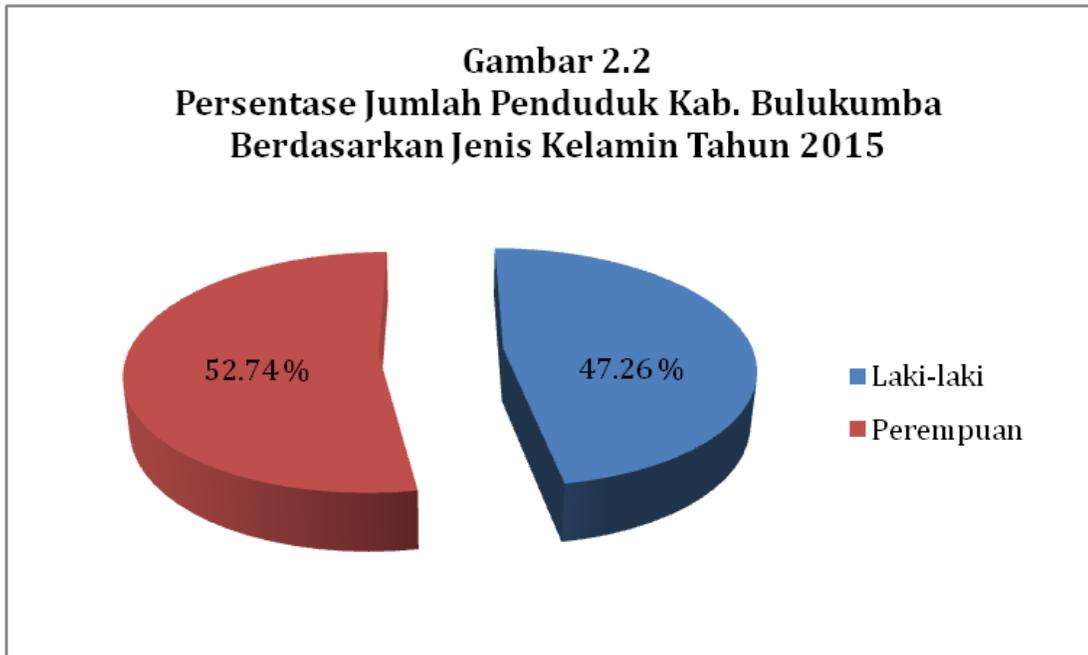
2.1.2.2 Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki, yakni: 216.472 jiwa penduduk perempuan, lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki yakni: 194,013 jiwa. Sementara itu, kelompok umur 10-14 tahun menjadi kelompok umur penduduk terbanyak dengan jumlah 38.622 jiwa.

Tabel 2.7
Jenis Kelamin dan Rasio Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2015

No	Kelompok Umur (Tahun)	Penduduk		Jumlah (Jiwa)
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	
1	2	3	4	5
1	0-4	19.222	18.665	37.887
2	5-9	19.475	19.019	38.494
3	10-14	19.496	19.126	38.622
4	15-19	17.944	17.807	35.751
5	20-24	14.737	16.207	30.944
6	25-29	14.270	16.618	30.888
7	30-34	13.797	16.624	30.421
8	35-39	14.411	16.753	31.164
9	40-44	13.447	15.605	29.052
10	45-49	11.884	14.248	26.132
11	50-54	9.885	12.355	22.240
12	55-59	7.987	9.344	17.331
13	60-64	6.120	7.413	13.533
14	65+	11.338	16.688	28.026
BULUKUMBA		194,013	216,472	410,485

Sumber: Bulukumba Dalam Angka 2016



2.1.2.3 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kabupaten Bulukumba pada tahun 2015 yaitu rata-rata 355 jiwa per km². Kecamatan Ujungbulu mempunyai kepadatan yang tinggi dikarenakan sebagai ibukota kabupaten dan aktivitas yang tinggi dengan jumlah penduduk yang besar dan luas daerah relatif kecil jika dibandingkan kecamatan lainnya.

Tabel 2.8
Rata-rata Kepadatan Penduduk Kabupaten Bulukumba per km² Tahun 2015

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	
1	2	3	4	5	
1	Gantarang	173.51	74.061	427	
2	Ujungbulu	14.44	52.832	3.659	
3	Ujung Loe	144.31	41.114	285	
4	Bontobahari	108.60	25.040	231	
5	Bontotiro	78.34	22.075	282	
6	Herlang	68.79	24.507	356	
7	Kajang	129.06	48.411	375	
8	Bulukumpa	171.33	52.059	304	
9	Rilau Ale	117.53	39.473	336	
10	Kindang	148.76	30.913	208	
BULUKUMBA		2015	1,156.67	410.485	355
		2014	1,156.67	407.775	353
		2013	1,156.67	404.900	351
		2012	1,156.67	400.990	347
		2011	1,156.67	398.531	345

Sumber: Bulukumba Dalam Angka 2011-2016

2.2 Aspek Kesejahteraan Rakyat

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Bulukumba telah menunjukkan peningkatan walaupun perkembangannya belum optimal. Berbagai program yang telah dilaksanakan mampu memberikan hasil yang cukup baik, hal ini ditandai dengan

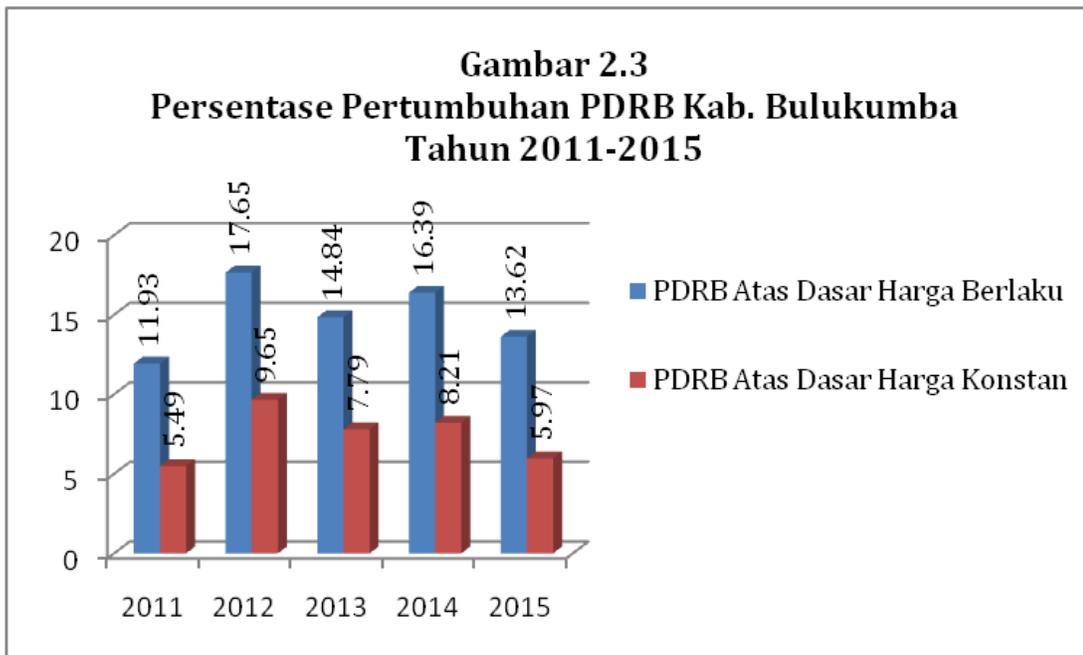
pertumbuhan PDRB Kabupaten Bulukumba. Tabel di bawah ini menyajikan pertumbuhan PDRB Kabupaten Bulukumba tahun 2011-2015.

Tabel 2.9
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bulukumba
Tahun 2011-2015

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan	
	Jumlah	Pertumbuhan (%)	Jumlah	Pertumbuhan (%)
2011	5.306.438,46	11,93	5.000.759,77	5,49
2012	6.243.256,28	17,65	5.483.244,72	9,65
2013	7.170.121,62	14,84	5.910.218,41	7,79
2014	8.345.258,97	16,39	6.395.647,81	8,21
2015	9.482.420,10	13,62	6.777.428,70	5,97
Rata-Rata		14,89		7,42

Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2016

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bulukumba lima tahun terakhir (2011-2015) menunjukkan harga berlaku rata-rata mencapai 14,89 persen dan harga konstan mencapai 7,42 persen. Distribusi persentase sumbangan sektor lapangan usaha terhadap Total PDRB Kabupaten Bulukumba lima tahun terakhir masih didominasi sektor pertanian.



2.2.2 Struktur Ekonomi

Bila melihat perhitungan PDRB Kabupaten Bulukumba, selain dapat diketahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi, juga dapat diketahui peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB Kabupaten Bulukumba. Peranan dari masing-masing lapangan usaha ini menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Bulukumba. Semakin besar peranan suatu lapangan usaha maka semakin besar pula pengaruhnya dalam perkembangan perekonomian di daerah ini.

Kontribusi PDRB tertinggi tahun 2015 terletak pada lapangan usaha yang terdiri atas pertanian, kehutanan, dan perikanan 42,46 persen, yang diikuti dengan Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 14,72 persen kemudian konstruksi 8,88 persen. Untuk lebih lengkapnya tabel berikut akan menggambarkan persentase kontribusi PDRB setiap lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku.

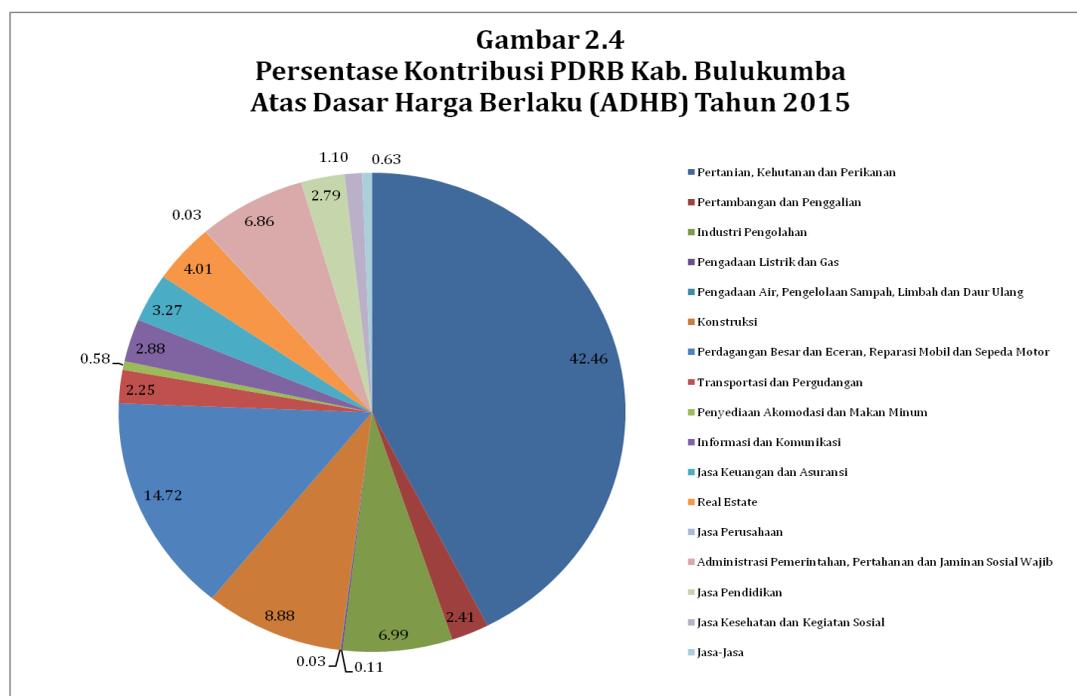
Dengan demikian perekonomian Kabupaten Bulukumba masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian karena sektor ini mempunyai peranan lebih besar dari lapangan usaha lainnya termasuk didalamnya penyerapan tenaga kerja. Secara detail tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Persentase Kontribusi PDRB Setiap Sektor Ekonomi atas dasar Harga Berlaku di Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015*
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	44,80	45,43	44,94	45,64	42,46
2. Pertambangan dan Penggalian	1,51	1,64	1,75	2,06	2,41
3. Industri Pengolahan	7,36	7,31	7,26	6,89	6,99
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03
6. Konstruksi	8,42	8,67	8,60	8,43	8,88
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,99	14,36	14,51	14,32	14,72
8. Transportasi dan Pergudangan	1,99	2,05	2,10	2,20	2,25
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,48	0,51	0,54	0,55	0,58
10. Informasi dan Komunikasi	2,47	2,76	3,17	3,13	2,88
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,98	3,33	3,30	3,26	3,27
12. Real Estate	3,37	2,92	3,13	3,39	4,01
13. Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,98	6,91	6,46	5,96	6,86
15. Jasa Pendidikan	2,86	2,48	2,61	2,58	2,79
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	0,88	0,92	0,90	1,10
17. Jasa-Jasa	0,59	0,51	0,54	0,52	0,63
PDRB	100	100	100	100	100

Keterangan: *): Angka Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik 2016



2.2.3 Pendapatan Perkapita

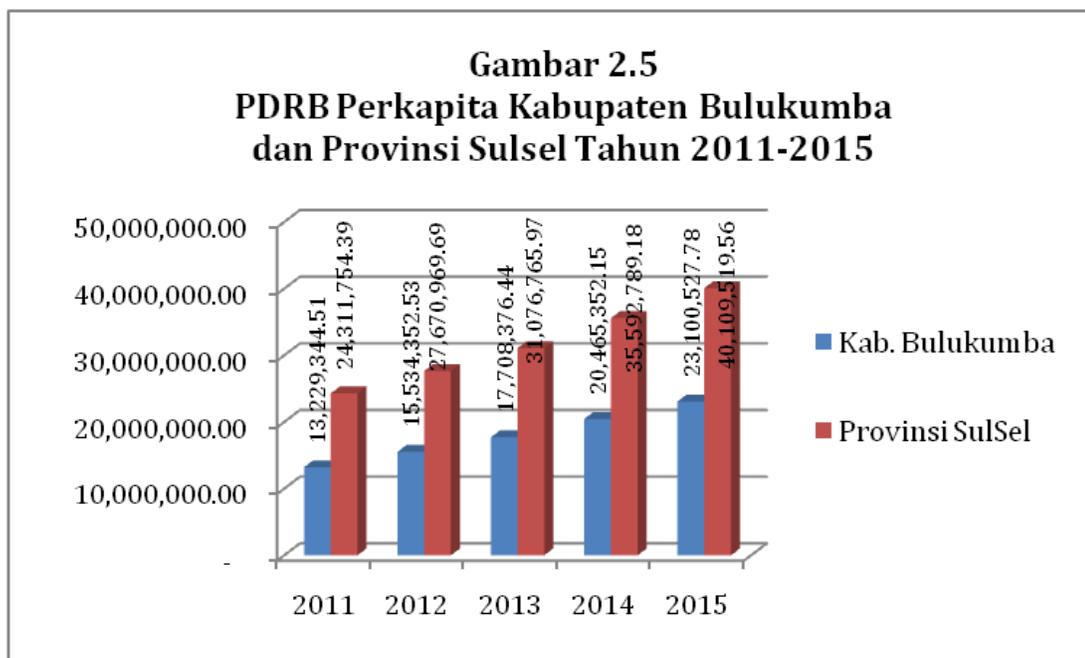
Seiring dengan pertumbuhan PDRB, maka PDRB perkapita di Kabupaten Bulukumba juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2011 angka PDRB perkapita baru mencapai Rp13.229.344,51 maka pada

tahun 2015 telah mencapai Rp23.100.527,78 jika dibandingkan dengan PDRB perkapita penduduk Sulawesi Selatan, maka PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bulukumba masih rendah. PDRB perkapita penduduk Sulawesi Selatan sudah mencapai Rp40.109.519,56 pada tahun 2015. Untuk lebih jelasnya perbandingan pendapatan perkapita tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
PDRB Perkapita Penduduk Kabupaten Bulukumba dan Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015 (Rupiah)

Tahun	Kabupaten Bulukumba	Sulawesi Selatan
2011	13,229,344.51	24,311,754.39
2012	15,534,352.53	27,670,969.69
2013	17,708,376.44	31,076,765.97
2014	20,465,352.15	35,592,789.18
2015	23.100.527,78	40.109.519,56

Sumber: Data Diolah.



Tabel 2.12
Realisasi Penyaluran Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi di Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian					
	- BRI	48.428	15.850	19.707	-	-
	- Bank Sulselbar	224	389	296	310	2.178
	- BNI 46	8.748	-	37.742	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian					
	- Bank Sulselbar	-	-	-	409	290
	- Bank Danamon	-	-	-	3.900	-
3	Industri Pengolahan					
	- Bank Sulselbar	5.206	700	614	7.308	8.025
	- BNI 46	3.490	-	13.451	10.450	-
4	Perdagangan					

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
	- BRI	82.269	151.066	154.321	190.558	-
	- Bank Sulselbar	74.933	98.844	101.784	52.121	48.754
	- BNI 46	60.229	-	48.314	80.050	-
	- Bank Danamon	36.515	-	-	46.000	-
	- Bank Mandiri	14.400	-	17.000	18.063	-
	- BNI Syariah	-	-	-	6.282	9.271
	- Bank Muamalat	-	-	-	-	4.661
5	Bangunan					
	- Bank Sulselbar	300	300	169	2.300	-
	- BNI 46	-	-	57.261	-	-
	- Bank Danamon	558	-	-	-	-
	- BTN	-	12.405	25.778	18.608	21.983
	- Bank Muamalat	-	-	-	-	620
6	Angkutan dan Komunikasi					
	- Bank Sulselbar	500	-	-	-	-
	- Bank Danamon	318	-	-	-	-
7	Jasa-Jasa					
	- BRI	2.183	-	-	-	-
	- Bank Sulselbar	2.600	800	1.218	1.100	-
	- BNI 46	7.725	3.500	10.925	15.123	-
	- Bank Danamon	1.852	-	-	-	-
	- BTPN	-	-	-	-	14.850
8	Lain-Lain					
	- BRI	113.961	116.695	120.794	-	-
	- Bank Sulselbar	255.023	168.194	188.382	270.213	-
	- BNI 46	17.137	27.494	8.635	10.781	-
	- Bank Danamon	807	480	-	-	-
	- Bank Syariah Mandiri	-	-	29.554	-	-
	- Bank Muamalat	-	-	-	-	4.609
	- BTPN	-	-	-	-	49.897
	Jumlah	737.406	596.717	835.610	753.283	160.529

Sumber: Bulukumba Dalam Angka 2011-2015

Tabel 2.13
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin
di Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2015

No	Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin	
					Jumlah (000)	%
1	2012	0.93	0.18	233.739	31,50	7.83
2	2013	1.01	0.17	249.131	36,70	9.04
3	2014	0.87	0.14	260.236	34,19	8.37
4	2015

Sumber: Bulukumba Dalam Angka 2016

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam upaya

pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3.1 Kondisi Kesehatan

Berbagai peningkatan derajat kesehatan masyarakat telah dicapai sebagai hasil dari pembangunan di bidang kesehatan. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan (SPPK) yang dikelola pemerintah adalah dukungan yang paling menentukan derajat kesehatan masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut meliputi:

Rumah sakit umum daerah klasifikasi tipe B (Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02. 03/1/0196/2015 tanggal 4 Februari 2015) dalam rangka mendukung operasional sebagai rumah sakit klasifikasi tipe B, dan dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum H. A. Sultan Dg. Radja menjadi rumah sakit tipe B, maka direncanakan pembangunan atau peningkatan fasilitas puskesmas menjadi rumah sakit pratama atau rumah sakit tipe C, serta melakukan berbagai upaya pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit, baik penambahan ruang, alat kesehatan (alkes), tenaga medis/para medis untuk meningkatkan pelayanan.

Puskesmas/Pustu sebanyak 79 unit yang tersebar di 10 kecamatan baik puskesmas, rawat inap maupun non perawatan dan 560 unit posyandu. Disamping itu terdapat klinik balai kesehatan 11 buah praktek dokter 70 serta 27 apotik yang dikelola oleh pihak swasta.

Tabel 2.14
Banyaknya Fasilitas Kesehatan yang dikelola Pemerintah menurut Kecamatan Tahun 2011-2015

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Pustu	Posyandu	Apotik
1	Gantarang	-	-	3	6	93	-
2	Ujungbulu	1	-	1	2	29	19
3	Ujung Loe	-	-	3	5	58	2
4	Bontobahari	-	-	1	3	27	1
5	Bontotiro	-	-	2	8	50	1
6	Herlang	-	-	2	6	36	-
7	Kajang	-	-	3	9	74	-
8	Bulukumpa	-	-	2	8	84	3
9	Rilau Ale	-	-	1	8	62	1
10	Kindang	-	-	2	4	47	-
BULUKUMBA	2015	1	0	20	59	560	27
	2014	1	0	19	59	544	25
	2013	1	0	19	59	539	25
	2012	1	0	19	59	528	31
	2011	1	5	19	60	506	23

Sumber: Dinas Kesehatan, 2016

Fasilitas kesehatan lainnya yang dikelola oleh non pemerintah.

Tabel 2.15
Fasilitas Kesehatan Non Pemerintah menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2015

No	Kecamatan	Klinik/Balai Kesehatan	Praktik Dokter	Apotik
1	Gantarang	-	5	-
2	Ujungbulu	5	32	19

No	Kecamatan	Klinik/Balai Kesehatan	Praktik Dokter	Apotik
3	Ujung Loe	1	7	2
4	Bontobahari	1	4	1
5	Bontotiro	-	1	1
6	Herlang	-	2	-
7	Kajang	1	9	-
8	Bulukumpa	1	6	3
9	Rilau Ale	-	4	1
10	Kindang	-	0	-
Bulukumba		11	70	27

Sumber: Dinas Kesehatan 2016

Tabel 2.16
Jumlah Tenaga Kesehatan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2015

No	Kecamatan	Tenaga Kesehatan				
		Tenaga Medis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan
1	Gantarang	10	34	12	3	29
2	Ujungbulu	34	160	40	24	164
3	Ujung Loe	9	22	8	4	26
4	Bontobahari	2	12	5	1	13
5	Bontotiro	2	13	3	1	16
6	Herlang	3	13	3	1	16
7	Kajang	7	20	7	2	25
8	Bulukumpa	6	22	11	1	25
9	Rilau Ale	5	12	11	4	15
10	Kindang	4	14	4	1	11
Bulukumba		82	322	104	42	340

Sumber: Bulukumba Dalam Angka 2016

Tabel 2.17
Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi menurut Sarana
Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2015

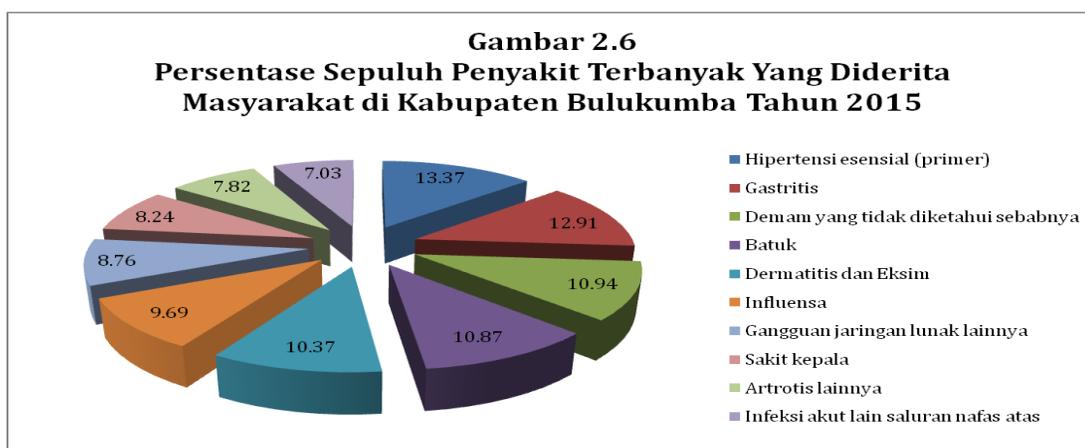
No	Unit Kerja	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi
1	Puskesmas	0	35	17
2	Rumah Sakit	17	10	3
Jumlah		17	45	20

Sumber: Bulukumba Dalam Angka 2016

Tabel 2.18
Sepuluh Penyakit Terbanyak
yang Diderita Masyarakat Tahun 2015

No	Nama Penyakit	Jumlah	%
1	Hipertensi esensial (primer)	33.083	13,37
2	Gastritis	31.936	12,9
3	Demam yang tidak diketahui sebabnya	27.066	10,9
4	Batuk	26.903	10,87
5	Dermatitis dan Eksim	25.671	10,37
6	Influenza	23.983	9,69
7	Gangguan jaringan lunak lainnya	21.679	8,76
8	Sakit kepala	20.392	8,24
9	Artrotis lainnya	19.341	7,82
10	Infeksi akut lain saluran nafas atas	17.387	7,03
Total		247.441	

Sumber: Bulukumba Dalam Angka 2016



2.3.2 Pendidikan

Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, maka peluang untuk lebih mengembangkan dirinya lebih besar. Untuk melihat sejauhmana kualitas sumberdaya manusia ditinjau dari latar belakang pendidikan, maka dapat dilihat pada presentase pendidikan penduduk pada tingkat SD dan SLTP. Keadaan prasarana dan sarana pendidikan di Kabupaten Bulukumba terdiri dari SD, SLTP, SLTA, serta perguruan tinggi.

Tabel 2.19
Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bulukumba Tahun 2015

No	Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Partisipasi Sekolah		
		Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
1	Laki-Laki			
	7-12	0	100	0
	13-15	1.14	92.86	6.00
	16-18	7.58	58.63	33.79
	19-24	61	65	65
2	Perempuan			
	7-12	3.33	96.67	0
	13-15	2.93	92.33	4.75
	16-18	1.33	62.34	36.32
	19-24	7.26	5.92	86.81
3	Laki-Laki + Perempuan			
	7-12	1.70	98.30	0
	13-15	1.89	92.64	5.48
	16-18	4.22	60.63	35.15
	19-24	2.43	14.08	83.49

Sumber: Bulukumba Dalam Angka 2016

Tabel 2.20
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2015

No	Jenjang Pendidikan	APM	APK
1	SD/MI	97.82	108.29
2	SMP/MTs	77	84.41
3	SMA/SMK/MA	56	71.12

Sumber: Bulukumba Dalam Angka 2016

Tabel 2.21
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid
pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015

No	Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid	RMTG
1	Gantarang	46	597	7.311	12.25
2	Ujungbulu	22	321	5.903	18.39
3	Ujung Loe	34	347	5.431	15.65
4	Bontobahari	26	250	3.284	13.14
5	Bontotiro	39	333	2.967	8.91
6	Herlang	37	340	3.413	10.04
7	Kajang	45	404	6.047	14.97
8	Bulukumpa	48	473	5.562	11.76
9	Rilau Ale	27	293	4.140	14.13
10	Kindang	25	229	3.188	13.92
Bulukumba	2015	349	3.587	47.246	13.17
	2014	348	3.760	48.450	12.89
	2013	350	2.099	50.518	24
	2012	349	2.091	50.732	9
	2011	343	2.513	51.510	20

Sumber: Bulukumba Dalam Angka 2011-2016

Tabel 2.22
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid
pada SLTP di Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015

No	Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid	RMTG
1	Gantarang	9	185	2.119	11.45
2	Ujungbulu	6	153	2.257	14.75
3	Ujung Loe	6	108	1.683	15.58
4	Bontobahari	6	120	1.408	11.73
5	Bontotiro	4	76	806	10.61
6	Herlang	7	128	1.469	11.48
7	Kajang	9	148	2.308	15.58
8	Bulukumpa	9	162	2.000	12.35
9	Rilau Ale	6	128	1.912	14.94
10	Kindang	9	108	845	7.82
Bulukumba	2015	71	1.316	16.805	12.77
	2014	64	1.547	16.259	1.051
	2013	63	806	15.416	19
	2012	62	1.695	14.893	9
	2011	59	1.364	17.027	126

Sumber: Bulukumba Dalam Angka 2011-2016

Tabel 2.23
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid
pada SLTA di Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015

No	Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid	RMTG
1	Gantarang	1	21	41	1.95
2	Ujungbulu	5	230	2.363	10.27
3	Ujung Loe	2	99	1.050	10.61
4	Bontobahari	2	84	935	11.13
5	Bontotiro	2	86	1.032	12.00
6	Herlang	1	68	817	12.01
7	Kajang	3	124	1.510	12.18
8	Bulukumpa	2	110	1.209	10.99

No	Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid	RMTG	
9	Rilau Ale	2	102	972	9.53	
10	Kindang	2	98	959	9.79	
	Bulukumba	2015	22	1.022	10.888	10.65
		2014	29	1.095	12.906	11.79
		2013	25	857	12.143	14
		2012	24	888	12.895	15
		2011	22	805	9.421	124

Sumber: Bulukumba Dalam Angka 2011-2016

Tabel 2.24
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid
pada PAUD di Kabupaten Bulukumba Tahun 2015

No	Kecamatan	TK Negeri		TK Swasta		Klp. Bermain		TPA Swasta	
		Guru	Siswa	Guru	Siswa	Guru	Siswa	Guru	Siswa
1	Gantarang	9	73	270	2.371	3	10	1	10
2	Ujungbulu	25	267	205	1.991	5	33	1	8
3	Ujung Loe	0	0	121	1.053	0	0	0	0
4	Bontobahari	0	0	69	809	2	7	0	0
5	Bontotiro	0	0	87	944	0	0	0	0
6	Herlang	0	0	135	1.316	4	0	0	0
7	Kajang	3	21	57	609	2	0	0	0
8	Bulukumpa	3	22	120	1.250	6	52	2	9
9	Rilau Ale	0	0	104	1.002	1	10	0	0
10	Kindang	0	0	76	673	0	0	0	0
Bulukumba		40	383	1.244	12.018	23	112	4	27

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

Tabel 2.25
Jumlah Guru PNS dan Non PNS Negeri/Swasta
Kabupaten Bulukumba Tahun 2015

No	Jenjang Sekolah	Jumlah Guru		Jumlah Keseluruhan
		PNS	Non PNS	
1	SD	1.726	1.704	3.430
2	SMP	787	752	1.539
3	SMA	405	423	828
4	SMK	186	231	417
Jumlah		3.104	3.110	6.214

Sumber: Dinas Pendidikan

Tabel 2.26
Jumlah Sekolah yang Berbasis Keagamaan,
Guru, Murid, di Kab. Bulukumba Tahun 2015

No	Jenjang Sekolah	Sekolah	Murid	Guru
1	RA/ BA			
2	Min	7	944	148
	MIS	29	2.276	322
3	MTs Neg	6	1.924	177
	MTs Swa	74	6.522	532
4	MAN	2	1.206	94

	MAS	19	1.489	261
5	Madrasah Diniyah	33	1.830	188
6	Pondok Pesantren	4	933	58

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2016

Tabel 2.27
Jumlah Mahasiswa dan Dosen
Perguruan Tinggi di Kabupaten Bulukumba Tahun 2015

No	Nama Perguruan Tinggi	Mahasiswa		Dosen	Ket
		L	P		
1	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) MUHAMMADIYAH	410	1.001	56	Swasta
2	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL-GAZALI	225	450	35	Swasta
3	STIKES Panrita Husada	125	712	30	Swasta
4	Akademi Keperawatan	103	201	52	Milik Pemda
5	Akademi Kebidanan	0	214	44	Swasta

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, 2016

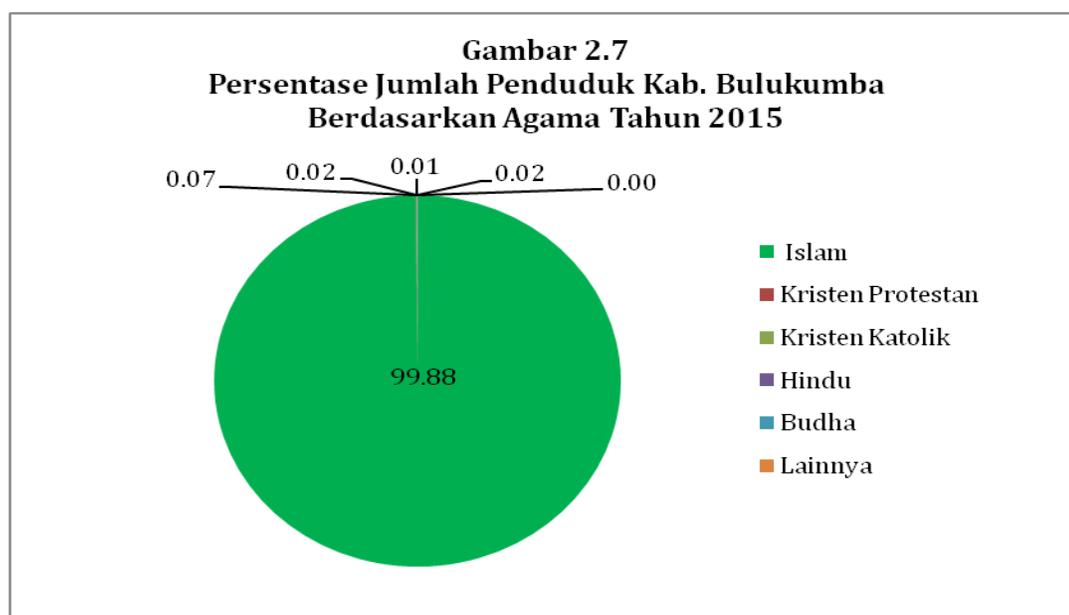
2.3.3 Agama

Kehidupan beragama di Kabupaten Bulukumba merupakan kondisi yang mantap, ditandai dengan tingginya kerukunan hidup antarumat beragama, baik antarumat dalam satu agama, maupun antarumat beragama, dan antarumat beragama dengan pemerintah. Kondisi ini harus tetap dijaga dan dipelihara, agar kondisi keamanan dapat tercapai, sehingga semua pihak dapat terus melakukan aktivitas dalam rangka pembangunan daerah.

Tabel 2.28
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Islam	397.751	400.205	404.359	407.266	409.977
2	Kristen Protestan	153	164	334	303	302
3	Kristen Katolik	452	454	74	74	74
4	Hindu	17	17	48	51	51
5	Budha	152	153	81	81	81
6	Lainnya	6	6	0	0	0

Sumber: Bulukumba Dalam Angka 2012-2016



Tabel 2.29
Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Kecamatan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2015

No	Kecamatan	Masjid/Musholah	Gereja	Jml
1	Gantarang	187	-	187
2	Ujungbulu	70	1	71
3	Ujung Loe	85	-	85
4	Bontobahari	57	-	57
5	Bontotiro	95	-	95
6	Herlang	77	-	77
7	Kajang	98	-	98
8	Bulukumpa	155	-	155
9	Rilau Ale	86	-	86
10	Kindang	114	-	114
	Bulukumba	1.024	1	1.025

Sumber: Kementerian Agama RI Kab. Bulukumba, 2016

2.3.4 Generasi Muda

Pembinaan dan pengembangan terhadap berbagai organisasi generasi muda merupakan wadah penampungan dan penyaluran aspirasi dan aktualisasi diri para pemuda. Organisasi tersebut diantaranya seperti OSIS, Pramuka, Karang Taruna, PMR, KNPI, AMPI dan organisasi-organisasi pemuda lainnya.

Pembangunan generasi muda di Kabupaten Bulukumba telah menunjukkan indikasi keberhasilan yang tercermin dari semakin berkembangnya dinamika dan kreativitas generasi muda, baik melalui jalur pendidikan formal, non formal, sehingga dapat mewujudkan sikap dan perilaku keteladanan, kepeloporan, rasa tanggungjawab serta menunjang persatuan dan kesatuan bangsa. Walaupun disadari wadah generasi muda belum dapat banyak berbicara di tingkat nasional khususnya dalam meraih penghargaan melalui wadah pemuda.

2.3.5 Olahraga

Pembangunan olahraga di Kabupaten Bulukumba merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan daerah keseluruhan, baik yang berkaitan dengan olahraga prestasi maupun olahraga masal.

Dalam pembinaan olah raga telah dilakukan berbagai jenis olahraga antara lain meliputi olahraga masal bagi seluruh lapisan masyarakat, olahraga

pendidika terutama dikalangan siswa dan mahasiswa dan penataran penilik/guru olahraga atau pembina olahraga.

Pembinaan olahraga di Kabupaten Bulukumba, terdiri dari olahraga sepak bola, bola voli, sepak takraw, tennis meja, bulutangkis, dan lainnya. Pengembangan olahraga dengan menggunakan sarana pembinaan pemuda melalui olahraga yakni gelanggang pemuda di setiap kecamatan.

2.3.6 Pemberdayaan Wanita

Peningkatan peranan wanita dalam pembangunan selama lima tahun sebelumnya sudah memperlihatkan kemajuan. Bidang-bidang yang menjadi salah satu indikator peningkatan tersebut yakni gerakan PKK, angka harapan hidup wanita, dan lainnya.

Peningkatan partisipasi wanita dalam bidang ketenagakerjaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan dalam pertumbuhannya angkatan kerja wanita lebih tinggi dibandingkan dengan angkatan kerja laki-laki. Wanita juga telah meningkat peran sertanya dalam pemerintahan seperti dapat dilihat dari peningkatan jumlah pegawai negeri wanita, jumlah paramedis wanita, guru, dokter, dan bidang lainnya.

Adanya emansipasi wanita dalam pembangunan ini harus diimbangi dengan peranannya sebagai ibu rumah tangga dan ibu dari anak-anaknya, yang merupakan tugas utama seorang wanita.

2.3.7 Kebudayaan/Kesenian

Potensi lain yang dimiliki Kabupaten Bulukumba yakni kebudayaan masyarakat yang masih menjunjung semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Semangat gotong royong dalam proses pembangunan ini cenderung semakin meningkat baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, maupun mendorong dalam upaya yang konkrit dan memperkaya khasanah kebudayaan nasional. Hal itu tergambar dalam slogan "*mali siparappe, tallang sipahua*" yang merupakan sebuah ungkapan perpaduan dari dua dialek bahasa Bugis Makassar yang menggambarkan sikap batin Masyarakat Bulukumba untuk mengembangkan amanat persatuan di dalam mewujudkan keselamatan bersama demi terciptanya tujuan pembangunan lahir dan batin, material dan spiritual, dunia dan akhirat.

Masyarakat di Kabupaten Bulukumba juga masih menghidupkan beberapa kesenian, seperti dengan adanya kelompok-kelompok kesenian. Adanya kelompok-kelompok seni ini diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan akan kesenian daerah yang akan dijadikan potensi unggulan bersama dengan potensi lainnya.

2.3.8 Keluarga Berencana

Sebagaimana telah tertuang dalam RPJM Nasional, revitalisasi keluarga berencana mutlak dilaksanakan dengan sasaran fokus prioritas pada peningkatan pelayanan KB-KR terutama bagi masyarakat miskin, daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan (galciltas), *Total Fertility Rate* (TFR) tinggi, unmet need tinggi, dan CBR rendah. Di Kabupaten Bulukumba, pada tahun 2015 terdapat jumlah pasangan usia subur sebanyak 27.154 dengan peserta KB aktif sebanyak 46.602 akseptor.

Prasarana dan Sarana Daerah

2.3.9 Prasarana Transportasi Darat

Transportasi merupakan hal yang vital dalam mendukung perekonomian suatu daerah. Tersedianya suatu jaringan dan sistem transportasi yang baik akan meningkatkan interaksi antar pelakunya yang pada kelanjutannya akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Jalan merupakan angkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Usaha pembangunan yang makin meningkat menuntut adanya transportasi untuk menunjang mobilitas penduduk dan kelancaran distribusi barang dan jasa dari dan menuju suatu daerah.

Panjang jalan Kabupaten Bulukumba selama lima tahun mengalami peningkatan baik jalan aspal, kerikil, beton, maupun paving blok, setiap tahun mengalami perubahan, walaupun masih ada jalan yang masih belum dilakukan peningkatan.

Tabel 2.30
Panjang Jalan Negara dan Provinsi dirinci menurut Kondisi Jalan dan Konstruksi Jalan Kabupaten Bulukumba Tahun 2015

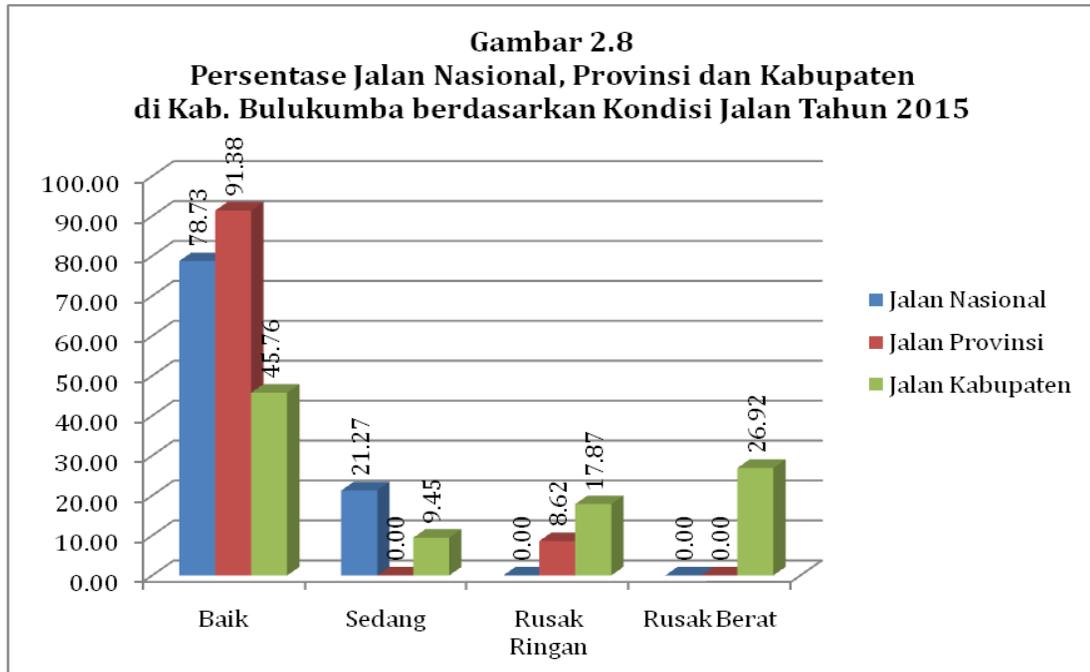
NO	konstruksi	Jalan Nasional				Jalan Provinsi		
		BTG - BLK	BLK-Tondong	BLK - BIRA	JML	TNT - TANAH BERU	KJG-SINJAI	JML
1	Konstruksi(Km):							
	1 Aspal	12,80	36,20	39,66	88,66	57,29	10,42	67,71
	2 Kerikil	-	-	-	-	-	-	-
	3 Tanah	-	-	-	-	-	-	-
	4 Lainnya	-	-	-	-	0,08	0,10	0,18
	Jumlah	12,80	36,20	39,66	88,66	57,36	10,52	67,88
2	Kondisi Jalan							
	1 Baik	12,80	36,20	20,80	69,80	51,51	10,52	62,03
	2 Sedang	-	-	18,86	18,86	-	-	-
	3 Rusak Ringan	-	-	-	-	5,85	-	5,85
	4 Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	12,80	36,20	39,66	88,66	57,36	10,52	67,88

Sumber: Dinas Bina Marga Prov. Sulsel (Sub. UPTD Wil V Kab. Bulukumba) 2016

Tabel. 2.31
Panjang Jalan Kabupaten Dirinci Menurut Kondisi dan Konstruksi Jalan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Konstruksi					
	1 Aspal	1.023,2	1.046,7	1.046,8	1.095,1	706,9
	2 Kerikil	249,3	231,5	206,1	168,0	226,5
	3 Tanah	14,3	14,3	15,1	14,2	11,2
	4 Beton	56,7	51,1	57,5	66,2	96,7
	Jumlah	1.343,5	1.343,5	1.343,5	1.343,5	1.041,3
2	Kondisi Jalan					
	1 Baik	596,5	621,6	632,9	650,9	476,5
	2 Sedang	509,2	252,1	227,8	187,4	98,4
	3 Rusak	69,1	228,1	218,7	209,3	186,1
	4 Rusak Berat	68,6	241,8	264,2	295,9	280,3
	Jumlah	1.343,5	1.343,5	1.343,5	1.343,5	1.041,3

Sumber: Dinas Bina Marga, 2015



Peningkatan jalan tersebut untuk mengakomodir pergerakan dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan sehingga aksesibilitas ke setiap wilayah dapat dijangkau.

2.3.10 Prasarana Transportasi Jalan dan Laut

Sebagai daerah yang memiliki kawasan pesisir maka keberadaan transportasi laut sangat penting, ini ditunjang dengan keberadaan pelabuhan. Pelayanan pergerakan manusia dan barang dengan menggunakan transportasi laut terlayani oleh pelabuhan laut, yaitu pelabuhan LeppeE dan Pelabuhan Bira.

Tabel 2.32
Arus Bongkar Muat Barang dan Penumpang pada Pelabuhan Dermaga LeppeE dirinci Perbulan Tahun 2012-2015

No	Bulan	Barang		Penumpang	
		Bongkar (ton/m ³)	Muat (ton/m ³)	Bongkar (Orang)	Muat (Orang)
1	Januari	139	3.912	-	-
2	Februari	132	2.353	-	-
3	Maret	147	5.160	-	-
4	April	180	4.111	-	-
5	Mei	113	2.010	-	-
6	Juni	121	2.592	1.117	952
7	Juli	76	2.676	205	249
8	Agustus	121	971	-	-
9	September	111	1.031	-	-
10	Oktober	161	1.136	-	-
11	November	147	953	-	-
12	Desember	161	1.053	-	-
JUMLAH	2015	1.609	27.958	-	-
	2014	1.759	29.599	1.322	1.201
	2013	949	28.927	-	-
	2012	961	34.275	-	-

Sumber: Kantor UP. Pelabuhan Kelas III Bulukumba, 2016

Tabel 2.33
Lalu Lintas Penumpang dan Barang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) di Pelabuhan Bira Perbulan Tahun 2012-2014

Bulan/ Month	2013		2014		2015	
	Penumpang (Orang)	Barang (Ton)	Penumpang (Orang)	Barang (Ton)	Penumpang (Orang)	Barang (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	13.400	2.840	12.756	1.011	15.206	7.246,6
Februari	13.400	2.528	20	2.746	12.721	5.643,6
Maret	14.405	2.183	15.784	1.905	16.908	5.898,2
April	16.455	2.023	16.127	4.465	19.565	3.946,0
Mei	17.624	2.194	12.776	0	19.124	6.593,4
Juni	35.425	2.681	6.684	0	15.989	5.506,4
Juli	17.314	1.932	2.434	40.254	20.645	5.610,2
Agustus	16.603	2.711	12.801	40.733	18.837	6.173,7
September	16.950	1.699	6.588	159.197	17.492	7.479,5
Oktober	15.063	3.913	11.943	84.828	22.077	7.233,9
November	17.103	4.058	12.909	144.683	19.392	7.863,7
Desember	14.776	4.347	7.527	237.020	19.299	7.639,9
Jumlah	208.518	33.109	118.349	716.842	217.255	76.835

Sumber: Kantor UP. Pelabuhan Kelas III Bulukumba, 2016

Selain kedua pelabuhan tersebut terdapat pula 30 buah Pelabuhan Rakyat (tanpa dermaga) yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bulukumba.

2.3.11 Air Minum

Potensi air minum di Kabupaten Bulukumba sementara ini masih dalam pengembangan terutama pada sektor perkotaan. Jumlah pelanggan selama lima tahun mengalami peningkatan terutama pada rumah tangga dan perusahaan.

Dengan adanya sumber air bersih tersebut belum memenuhi seluruh masyarakat perkotaan di Kabupaten Bulukumba, untuk itu sangat diharapkan adanya tambahan instalasi air bersih khususnya masyarakat perkotaan.

2.3.12 Prasarana Sungai untuk Irigasi

Lahan persawahan di Kabupaten Bulukumba sebahagian mengandalkan sumber air dari 43 aliran sungai, sungai-sungai ini telah diusahakan untuk Daerah Irigasi yang dikelola langsung oleh Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Kabupaten Bulukumba.

Tabel 2.34
Daftar Daerah Irigasi di Kabupaten Bulukumba Tahun 2015

No	Daerah Irigasi	Lokasi / Wilayah		Luas Potensi (Baku) (Ha)
		Kecamatan	DAS	
1	2	3	4	5
<i>I. Daerah irigasi pemerintah (kewenangan pusat) dengan luas areal diatas 3.000 ha</i>				
<i>Jumlah Luas Areal</i>				<i>8.860</i>
1	D. I. Bayang-Bayang	Kindang	Bialo	5.030
2	D. I. Bontomanai	Rilau Ale	Balantieng	3.830
<i>II. Daerah irigasi pemerintah (kewenangan propinsi) dengan luas areal 1.000 s/d 3.000 ha</i>				
<i>Jumlah Luas Areal</i>				<i>4.709</i>
1	D. I. Bettu	Gantarang	Bialo	1.817
2	D. I. Bontonyeleng	Gantarang	Bijawang	1.096
3	D. I. Bongki-Bongki	Kindang	Bijawang	1.796
<i>III. Daerah irigasi pemerintah (kewenangan kabupaten) dengan luas areal kurang dari 1.000 ha</i>				

No	Daerah Irigasi	Lokasi / Wilayah		Luas Potensi (Baku) (Ha)
		Kecamatan	DAS	
1	2	3	4	5
1	D. I. Anisia	Bulukumba	S. Balang Bessi	150
2	D. I. Aho Lagading	Bulukumba	S. Anyorang	189
3	D. I. Batu Lohe	Bulukumba	S. Balang Bessi	30
4	D. I. Balibutta	Bulukumpa	S. Salajueng	30
5	D. I. Bara Batu	Bulukumpa	S. Anyorang	67
6	D. I. Bandu	Sda	S. Anyorang	90
7	D. I. Balang Bessi	Sda	S. Balang Bessi	425
8	D. I. Balang Riri	Sda	S. Balang Bessi	448
9	D. I. Bole-Bole	Sda	S. Anyorang	65
10	D. I. Bollie	Sda	S. Balang Bessi	75
11	D. I. Bonto Manipi	Sda	S. Serre	85
12	D. I. Bongkasae	Sda	S. Balang Bessi	90
13	D. I. Bonto Pao	Sda	S. Anyorang	122
14	D. I. Cilellang	Sda	S. Oro	60
15	D. I. Cinrae	Bulukumpa	S. Salo Dua	175
16	D. I. Galung Lohe	Sda	S. Anyorang	369
17	D. I. Hulo	Sda	S. Anyorang	84
18	D. I. Illi	Sda	S. Illi	165
19	D. I. Jammu	Sda	S. Salo Dua	58
20	D. I. Jannae	Sda	S. Anyorang	78
21	D. I. Kalle'e	Sda	S. Anyorang	65
22	D. I. Kassi Buleng	Sda	S. Balongbisi	75
23	D. I. Kampenni	Sda	S. Balang Bessi	100
24	D. I. Kaseseng II	Sda	S. Oro	100
25	D. I. Kaseseng	Sda	S. Oro	145
26	D. I. Kullenge	Sda	S. Salajueng	80
27	D. I. Latambang	Sda	S. Anyorang	54
28	D. I. Labutakkang	Sda	Sda	90
29	D. I. Lembang Nyorang	Sda	Sda	200
30	D. I. Maremme	Sda	Sda	158
31	D. I. Matunggaleng	Sda	Sda	197
32	D. I. Munte Rilau	Sda	S. Oro	50
33	D. I. Palipi	Sda	S. Salajueng	30
34	D. I. Pakanre Lembang	Sda	S. Anyorang	45
35	D. I. Pao Cani	Sda	S. Anyorang	88
36	D. I. Paenre Lompoa	Sda	S. Oro	195
37	D. I. Pakombong I	Sda	S. Balombisi	87
38	D. I. Paradae	Sda	S. Serre	100
39	D. I. Pattoengan	Sda	S. Pattoengan	95
40	D. I. Pao Lohe	Sda	S. Boddie	91
41	D. I. Pakombong II	Sda	S. Pakombong	148
42	D. I. Pulanting	Sda	S. Anyorang	50
43	D. I. Sarrae	Sda	S. Balombisi	25
44	D. I. Sapu Bonto Lakatoang	Sda	S. Illi	96
45	D. I. Sarajoko	Sda	S. Balang Bessi	50
46	D. I. Sarre	Sda	S. Sarre	60
47	D. I. Sumpang Ale	Sda	S. Salajueng	49
48	D. I. Tamarellang	Sda	S. Balang Riri	75
49	D. I. Taggettung	Sda	S. Anyorang	195
50	D. I. Tibona	Sda	S. Balang Bessi	75
51	D. I. Balla Pale	Sda	S. Balang Bessi	50
52	D. I. Pa'lelang	Sda	S. Salajueng	80

No	Daerah Irigasi	Lokasi / Wilayah		Luas Potensi (Baku) (Ha)
		Kecamatan	DAS	
1	2	3	4	5
53	D. I. Lembang Tinunung	Sda	S. Balang Bessi	50
Total Luas Areal Daerah Irigasi di Kecamatan Bulukumpa				5.903
54	D. I. Kadieng	Rilau Ale	S. Anyorang	403
55	D. I. Karangbulotong	Sda	S.Karambulotong	15
56	D. I. Manyoleng	Sda	S. Anyorang	25
57	D. I. Pa'lipungan/Bonto Haru	Sda	S. Sampeang	30
58	D. I. Palimpingan/Baji Minasa	Rilau Ale	S.Balangtieng Keke	37
59	D. I. Napenge	Sda	S.Balangtieng Keke	50
60	D. I. Garumbang II	Sda	S.Balangtieng Keke	70
61	D. I. Mangottong	Sda	S.Balangtieng Keke	70
62	D. I. Pasuru	Sda	S.Balangtieng Keke	75
63	D. I. Maddauleng	Sda	S.Balangtieng Keke	75
64	D. I. Capenge	Sda	S.Balangtieng Keke	95
65	D. I. Tabbangka	Sda	S. Balangtieng	117
66	D. I. Bonto Rihu	Sda	S. Balangtieng	135
67	D. I. Jalepeng	Sda	S. Anyorang	137
68	D. I. Pantontongan	Sda	S. Balangtieng Keke	140
69	D. I. Ma'jangka	Sda	S. Balangtieng Keke	150
70	D. I. Garumbang	Sda	S. Anyorang	175
71	D. I. Pandang-pandang	Sda	S. Balangtieng	222
72	D. I. Balakang	Sda	S. Balangtieng Keke	275
73	D. I. Batu Eja	Sda	S. Anyorang	350
74	D. I. Balantieng	Sda	S. Balangtieng	325
75	D. I. Barana	Sda	S. Anyorang	450
76	D. I. Memangan	Sda	S. Balangtieng	50
77	D. I. Toddoe	Sda	S. Balangtieng Keke	50
78	D. I. Borong Kondo	Sda	S. Balangtieng Raji	50
79	D. I. Liku Miti	Sda	S. Balangtieng keke	50
80	D. I. Tanah Illi	Sda	S. Balangtieng Keke	45
81	D. I. Bantilang	Sda	S. Anyorang	100
Total Luas Areal Daerah Irigasi di Kecamatan Rilau Ale				3.766
82	D. I. Baji Areng	Gantarang	S. Bijawang	50
83	D. I. Batu Lapsi	Sda	S. Karisa	50
84	D. I. Borong Loe	Sda	S. Borong Loe	60
85	D. I. Bonto Ulu	Sda	S. Kirasa	85
86	D. I. Bonto Mate'ne	Gantarang	S. Bialo	125
87	D. I. Bonto Raja	Sda	S. Bialo	151
88	D. I. Bokong	Sda	S. Bialo	100
89	D. I. Binta Naja	Sda	S. Bintanaja	197
90	D. I. Cambang Boko	Sda	S. Bintanaja	100
91	D. I. Donggo	Sda	S. Ponre	20
92	D. I. Galung Beru	Sda	S. Bonto Sunggu	80
93	D. I. Jampue	Sda	S. Kirasa	95
94	D. I. Katimbang	Sda	S. Kalumeme	145
95	D. I. Kirasa	Sda	S. Kirasa	70
96	D. I. Laumang	Sda	S. Laumang	40
97	D. I. Maesa	Sda	S. Maesa	206
98	D. I. Pagentungan	Sda	S. Bialo	226
99	D. I. Punranga	Sda	S. Punranga	330
100	D. I. Tanah Kongkong	Sda	S. Bialo	699
101	D. I. Tombong	Sda	S. Kirasa	50

No	Daerah Irigasi	Lokasi / Wilayah		Luas Potensi (Baku) (Ha)
		Kecamatan	DAS	
1	2	3	4	5
102	D. I. Tuli	Sda	S. Tuli	175
103	D. I. Pamborong	Sda	S. Kalumassang	70
Total Luas Areal Daerah Irigasi di Kecamatan Gantarang				3.124
104	D. I. Hisang II	Kindang	S. Hisang	250
105	D. I. Buakan Tangaya	Sda	S. Biangkeke	30
106	D. I. Bonto Bontoa	Sda	S. Baingkeke	30
107	D. I. Bangsalayya	Sda	S. Bilang Perusu	35
108	D. I. Kalimulasa	Sda	S. Kalimusala	40
109	D. I. Kalibbong	Sda		50
110	D. I. Balleangin	Sda	S. palioi	70
111	D. I. Oro	Sda	S. Bijawang	80
112	D. I. Oddungan	Sda	S. Oddungan	80
113	D. I. Bonto Rita	Sda	S. Kirasa	87
114	D. I. Pacollong	Sda	S. Kirasa	86
115	D. I. Bilang Rea	Sda	S. Bilangrea	120
116	D. I. Passimbungan	Sda	S. Biangkeke	120
117	D. I. Borong Parring	Sda	S. palioi	120
118	D. I. Hisang I	Sda	S. Oddungan	174
119	D. I. Panrioang Jarang	Sda	S. Panrioang Jarang	175
120	D. I. Kantisang	Sda	S. Kirasa	200
121	D. I. Bali Konrong	Sda	S. Balikonrong	200
122	D. I. Parigi	Sda	S. Biangkeke	150
123	D. I. Palioi	Sda	S. Palioi	375
124	D. I. Bongki	Sda	S. Bilangrea	60
Total Luas Areal Daerah Irigasi di Kecamatan Kindang				2.532
125	D. I. Babana	Ujung Loe	S. Topanda	448
126	D. I. Balang Tikeke	Sda	S. Balangtieng	704
127	D. I. Kalicompeng	Sda	S. Balangtieng	45
128	D. I. Panggilingan	Sda	S. Balangtieng	90
129	D. I. Lonrong	Sda	S. Balangtieng	870
Total Luas Areal Daerah Irigasi di Kecamatan Ujung Loe				2.157
130	D. I. Kanaria	Bontotiro	S. Panrioang Meong	40
131	D. I. Patompongan	Sda	S. Panrioang Meong	75
132	D. I. Panrioang Meong	Sda	S. Lolisang	45
Total Luas Areal Daerah Irigasi di Kecamatan Bontotiro				160
133	D. I. Batu Nilamung	Kajang	S. Lolisang	120
134	D. I. Bobo	Sda	S. Bobo	50
135	D. I. Danggarehan	Sda	S. Lolisang	50
136	D. I. Kabbung	Sda	S. Karosi	90
137	D. I. Sakku	Sda	S. Galoggo	30
138	D. I. Sapayya	Sda	S. Lolisang	75
139	D. I. Sangkala	Kajang	S. Sangkala	85
140	D. I. Toga	Sda	S. Jelepeng	90
141	D. I. Daloba	Sda	S. Daloba	45
142	D. I. Paku-paku	Sda	S. Paku-paku	65
143	D. I. Lambeang	Sda	S. Salajueng	90
144	D. I. Tinurung	Sda	S. Sangkala	80
145	D. I. Kabibing	Sda	Cekdam	40
146	D. I. Tihele	Sda	S. Tuli	60
147	D. I. Pabbuaya	Sda	S. Pabbuaya	100
148	D. I. Karosi	Sda	S. Jelepeng	70
149	D. I. Bili	Sda	S. Bili	120

No	Daerah Irigasi	Lokasi / Wilayah		Luas Potensi (Baku) (Ha)
		Kecamatan	DAS	
1	2	3	4	5
150	D. I. Badu	Sda	S.Matoangin	80
151	D. I. Passorengan	Sda	S. Lolisang	80
152	D. I. Soppeng	Sda	S. Balang Bina	80
153	D. I. Balang Bina	Sda	S. Balang Bina	80
154	D. I. Batu Lassu	Sda	S. Galoggo	
Total Luas Areal Daerah Irigasi di Kecamatan Kajang				3.135
JUMLAH TOTAL LUAS AREAL				20.777

Sumber Data: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, 2016

2.3.13 Sanitasi

Sanitasi dilaksanakan melalui penataan dan pembangunan drainase kota serta drainase pada kecamatan dan desa rawan genangan air, telah disediakan 2 Tempat Pembuangan Akhir dengan dukungan 4 buah dumptruk, 5 buah amrol, 4 minitruk pengangkut sampah, dan 23 buah kontainer sampah.

2.3.14 Pemerintahan Umum

Sesuai dengan kewenangan daerah, pemerintah Kabupaten Bulukumba mengeluarkan beberapa peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bulukumba, yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 6);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 11);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Tehnis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 13);

2.3.15 Politik

Pembangunan politik di Kabupaten Bulukumba secara umum sudah semakin baik, hal ini ditandai dari proses demokratisasi telah berjalan ke arah yang benar. Demikian pula antusias masyarakat berpolitik melalui organisasi partai politik cukup tinggi, seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kritis, adanya tuntutan keterbukaan dalam wadah partisipasi politik rakyat yang ditandai dengan berlakunya sistem multipartai yang mengikuti

Pemilu serta munculnya berbagai bentuk asosiasi masyarakat sipil baik dalam bentuk organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat maupun forum-forum lainnya, kondisi ini menjadi model yang sangat penting dalam mewujudkan proses demokratisasi ke depan.

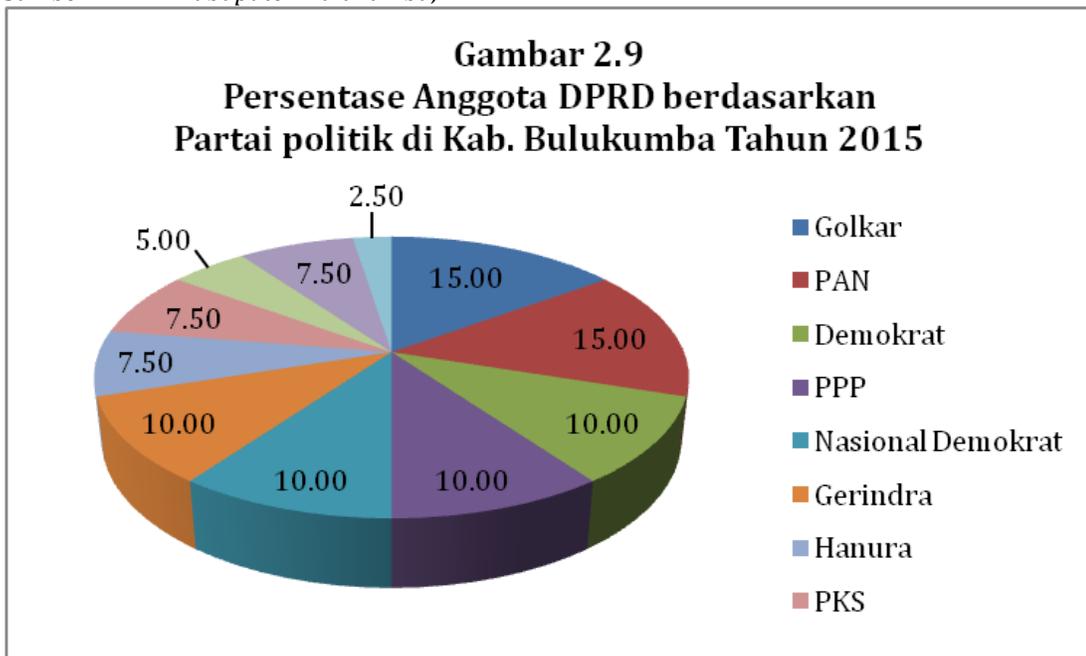
Secara umum pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden/wakil presiden, maupun pemilihan kepala daerah langsung, berlangsung aman dan tertib. Khusus untuk pemilukada, pemungutan suara yang aman akan turut menjamin kepala daerah yang representatif dan memiliki dukungan masyarakat. Masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat akan dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan menjadi tugas bersama sebagai langkah mempercepat masyarakat madani.

Berdasarkan hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 diperoleh komposisi anggota DPRD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.35
Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin
Kabupaten Bulukumba Tahun 2015

No	Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Golkar	5	1	6
2	PAN	5	1	6
3	Demokrat	3	1	4
4	PPP	4	0	4
5	Nasional Demokrat	3	1	4
6	Gerindra	4	0	4
7	Hanura	2	1	3
8	PKS	2	1	3
9	PKB	2	0	2
10	PBB	2	1	3
11	PDI	1	0	1
	Jumlah	33	7	40

Sumber : DPRD Kabupaten Bulukumba, 2016



2.3.16 Ketentraman dan Ketertiban Umum

Di bidang ketentraman dan ketertiban umum, berbagai masalah gangguan keamanan dan kejahatan yang timbul sebagai akibat krisis multi dimensi semakin dapat dikendalikan dan ditangani dengan baik sesuai dengan

hukum yang berlaku. Rasa aman di Kabupaten Bulukumba merupakan kebutuhan bersama dengan lebih mengedepankan peran masyarakat dan aparat keamanan, karena secara keseluruhan penanganan masalah kriminalitas dan tindak kejahatan masih menjadi kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat melalui lembaga Kepolisian. Sedangkan bagi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya harus menjaga dan mencegah peluang terjadinya konflik yang bernuansa pada disintegrasi sosial, sehingga masyarakat dalam beraktifitas dapat terayomi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bulukumba lebih meningkatkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dan mensosialisasikan pemahaman HAM serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak kejahatan.

Keberhasilan pembangunan dalam pencapaian pemantapan ketentraman dan ketertiban masyarakat salah satunya dapat dilihat dari besaran indeks kejahatan/kriminalitas, sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Banyaknya Kasus Kriminalitas Menurut Jenisnya
Di Kabupaten Bulukumba Periode 2010-2014

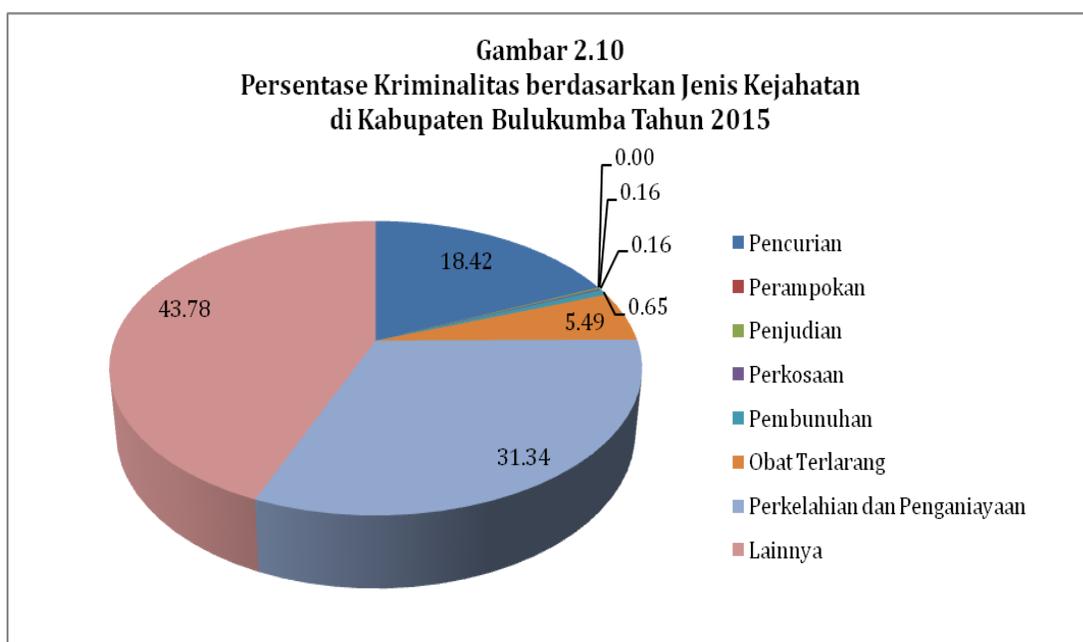
No.	Jenis Kejahatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pencurian	162	206	191	180	145	114
2	Perampokan	-	2	2	0	0	0
3	Penjudian	18	13	8	23	14	1
4	Perkosaan	7	8	3	2	5	1
5	Pembunuhan	6	8	7	6	6	4
6	Obat Terlarang	-	-	-	0	0	34
7	Perkelahian dan Penganiayaan	111	181	297	148	169	194
8	Pencucian Uang	-	-	-	0	0	0
9	Perdagangan Manusia	-	-	-	0	0	0
10	Lainnya	218	281	324	309	243	271
	Jumlah	522	699	832	668	582	619

Sumber: Polres Bulukumba, 2016

Tabel 2.37
Jumlah Tindak Pidana menurut Kepolisian Sektor
di Kabupaten Bulukumba Periode 2013-2015

No.	Kepolisian Sektor	2013	2014	2015
1	Gantarang	58	45	46
2	Ujungbulu	162	129	122
3	Ujung Loe	87	71	48
4	Bontobahari	20	16	36
5	Bontotiro	14	17	14
6	Herlang	26	28	38
7	Kajang	49	44	38
8	Bulukumpa	35	43	55
9	Rilau Ale	38	21	13
10	Kindang	16	18	25
	Jumlah	505	432	435

Sumber: Polres Bulukumba, 2016



Langkah-langkah yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba antara lain:

- Meningkatkan kerjasama dengan para penegak hukum dalam penegakan supremasi hukum;
- Meningkatkan kemampuan daya tangkal masyarakat yang tangguh baik di permukiman maupun di tempat kerja;
- Peningkatan kapasitas Polisi Pamong Praja;
- Membentuk wadah koordinasi seluruh kegiatan penanggulangan narkoba, alkohol, dan zat adiktif lain.

Produk hukum seperti peraturan daerah yang merupakan implementasi dari otonomi daerah ditingkatkan agar dapat mencerminkan aspirasi kebutuhan masyarakat Bulukumba, sehingga mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, atau dengan kata lain produk hukum daerah yang dihasilkan benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Langkah kebijakan yang telah diambil Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan kepastian hukum dan ketentraman dalam kehidupan yaitu dengan meningkatkan pelayanan di bidang hukum, menyelenggarakan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran dan budaya serta tertib hukum.

2.4 Aspek Daya saing Daerah

Potensi Unggulan

Gambaran penggunaan lahan tahun 2015 di daerah Kabupaten Bulukumba pada umumnya didominasi oleh pertanian seluas 104.321 ha meliputi: tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan lain-lain.

2.4.1 Pertanian

Kabupaten Bulukumba merupakan daerah di wilayah Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan andalan, yang memberikan kontribusi dalam mempekokoh Sulawesi Selatan sebagai lumbung padi nasional. Selain padi sebagai komoditas tanaman pangan andalan, tanaman pangan lain yang dihasilkan yakni jagung, kedelai, umbi-umbian, dan kacang-kacangan.

2.4.1.1 Potensi Lahan Sawah

Potensi Sumberdaya lahan pertanian sangat luas utamanya untuk lahan pertanian tanaman pangan. Potensi lahan sawah seluas 22.458 Ha yang tersebar di 10 kecamatan dan di antara 10 kecamatan tersebut Kecamatan Gantarang mempunyai lahan yang terluas yakni 35,67 persen sedangkan Kecamatan Bontobahari mempunyai lahan yang terkecil yakni 0,28 persen dari total lahan sawah yang ada.

Tabel 2.38
Luas Lahan Sawah Perkecamatan di Kabupaten Bulukumba
Tahun 2011-2015 (Ha)

No	Kecamatan	Diusahakan untuk Pertanian	Sementara Tidak Diusahakan	Jumlah	% Lahan
1	Gantarang	8.011	-	8.011	35,67
2	Ujungbulu	337	-	337	1,50
3	Ujung Loe	2.953	-	2.953	13,15
4	Bontobahari	63	-	63	0,28
5	Bontotiro	168	-	168	0,74
6	Herlang	338	-	338	1,51
7	Kajang	2.300	-	2.300	10,24
8	Bulukumpa	3.119	-	3.119	13,89
9	Rilau Ale	3.211	-	3.211	14,30
10	Kindang	1.958	-	1.958	8,72
BULUKUMBA	2015	22.458	-	22.458	100
	2014	22.458	-	22.458	100
	2013	22.458	-	22.458	100
	2012	22.458	-	22.458	100
	2011	22.458	-	22.458	100

Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2016

Luas lahan sawah menurut irigasi hingga tahun 2015 seluas 22.458 Ha. Yang terdiri dari sawah irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut, dan rawa lebak, dari luas tersebut sebesar 90,93 persen atau 20,423 Ha merupakan sawah irigasi sehingga lahan sawah di Kabupaten Bulukumba mayoritas mampu memproduksi 2 kali dalam setahun

Tabel 2.39
Luas Lahan Sawah menurut Irigasi Perkecamatan
di Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015

No	Kecamatan	Irigasi	Tadah Hujan	Rawa Pasang Surut	Rawa Lebak	Jumlah
1	Gantarang	8.005	6	-	-	8.011
2	Ujungbulu	310	27	-	-	337
3	Ujung Loe	2.771	182	-	-	2.953
4	Bontobahari	53	10	-	-	63
5	Bontotiro	25	143	-	-	168
6	Herlang	-	338	-	-	338
7	Kajang	1.517	783	-	-	2.300
8	Bulukumpa	3.073	46	-	-	3.119
9	Rilau Ale	2.814	397	-	-	3.211
10	Kindang	1.855	103	-	-	1.958
Bulukumba	2015	20.423	2.035	-	-	22.458
	2014	20.423	2.035	-	-	22.458
	2013	20.423	2.035	-	-	22.458
	2012	11.208	2.035	-	-	22.458
	2011	24.042	7.281	1.800,00	2.169,00	22.523

Sumber: Bulukumba Dalam Angka, 2016

Potensi lahan bukan sawah sampai tahun 2015 seluas 81,863 ha yang tersebar di 10 kecamatan. Kecamatan Bulukumpa mempunyai lahan yang terluas yakni sekitar 13,670 hektar sedangkan Kecamatan Ujungbulu mempunyai lahan yang terkecil sekitar 307 dari total lahan bukan sawah yang ada di Kabupaten Bulukumba.

Tabel 2.40
Luas Lahan Bukan Sawah Perkecamatan
di Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015

No	Kecamatan	Lahan Bukan Sawah				
		Tegal/Kebun/Ladang/Huma/Padang Rumput/Tambak/Kolam/Empang (ha)	Perkebunan (ha)	Hutan Rakyat (ha)	Sementara Tidak di Usahakan (ha)	Total (ha)
1	Gantarang	3.893	4.327	62	20	8.302
2	Ujungbulu	307	-	-	-	307
3	Ujung Loe	7.216	2.348	535	-	10.099
4	Bontobahari	4.569	1.180	1.200	20	6.969
5	Bontotiro	4.524	2.080	479	144	7.227
6	Herlang	3.864	2.214	-	-	6.078
7	Kajang	7.190	2.008	579	-	9.777
8	Bulukumpa	1.398	12.107	165	-	13.670
9	Rilau Ale	7.866	420	16	-	8.302
10	Kindang	11.132	-	-	-	11.132
Bulukumba	2015	51.959	26.684	3.036	184	81.863
	2014	51.959	26.684	3.036	184	81.863
	2013	51.959	26.684	3.036	184	81.863
	2012	64.405	1.942	3.020	-	69.367
	2011	71.335	1.942	3.020	-	76.297

Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2016

2.4.1.2 Potensi Tanaman Pangan

Tanaman pangan yang sangat potensial yakni tanaman padi dan merupakan bahan pangan utama masyarakat, terdapat pula tanaman bahan pangan lainnya seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang ijo, dan kedelai, yang merupakan tanaman sela atau tanaman antara yang ditanam oleh petani setelah sekali/dua kali panen tanaman padi, khususnya di lokasi lahan persawahan sedangkan pada lokasi lahan non persawahan tanaman tersebut diantaranya merupakan tanaman utama.

Tabel 2.41
Luas Panen dan Produksi Padi Sawah (GKG)
Perkecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015

No	Kecamatan	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)
1	Gantarang	15.949	14.303	97.695,15	68,30
2	Ujungbulu	644	574	3.763,33	65,56
3	Ujung Loe	5.685	5.908	36.218,43	61,30
4	Bontobahari	53	116	662,44	57,11
5	Bontotiro	251	184	915,31	49,75
6	Herlang	481	423	2.130,39	50,36
7	Kajang	4.598	3.257	19.488,61	59,84
8	Bulukumpa	6.077	5.231	32.868,39	62,83
9	Rilau Ale	6.180	5.573	36.575,73	65,63

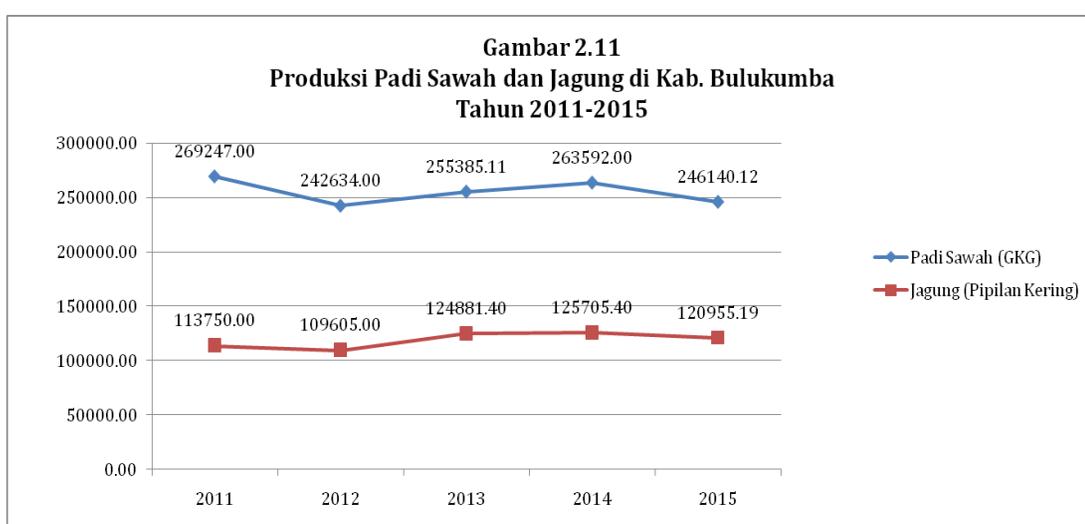
No	Kecamatan	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)
10	Kindang	3.832	2.635	15.822,35	60,05
Bulukumba	2015	43.750	38.204	246.140,12	64,43
	2014	40.489	42.980	263.592,00	61,33
	2013	44.319	43.774	255.385,11	58,41
	2012	42.374	43.669	242.634,00	55,52
	2011	40.736	47.208	269.247,00	57,03

Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2016

Tabel 2.42
Luas Panen dan Produksi Jagung (Pipilan Kering)
Perkecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015

No	Kecamatan	Luas Lahan (ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)
1	Gantarang	997	601	2.438,86	40,58
2	Ujungbulu	-	-	-	-
3	Ujung Loe	3.570	2.795	11.560,12	41,36
4	Bontobahari	3.007	3.786	15.628,61	41,28
5	Bontotiro	3.196	3.471	15.071,08	43,42
6	Herlang	5.650	6.111	33.421,06	54,69
7	Kajang	9.255	9.470	41.317,61	43,63
8	Bulukumpa	485	-	-	-
9	Rilau Ale	357	43	214,36	49,85
10	Kindang	388	375	1.303,50	34,76
Bulukumba	2015	26.905	26.652	120.955,19	45,38
	2014	27.127	29.687	125.705,40	42,34
	2013	29.215	31.490	124.881,40	39,66
	2012	30.274	27.555	109.605,00	39,78
	2011	36.293	29.587	113.750,00	38,45

Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2016



Selain data tersebut di atas, terdapat juga kawasan yang potensial yang bisa dikembangkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan yang terdapat di:

- a. Kawasan potensial budidaya padi, yakni Kecamatan Gantarang, Ujung Loe, Bulukumpa, Kajang, Rilau Ale, dan Kecamatan Kindang yaitu 22,458 ha.

- b. Kawasan potensil budidaya jagung, Mayoritas tersebar di 9 kecamatan yakni Kecamatan Kajang, Herlang, Bontotiro, Gantarang, dan Kecamatan Ujung Loe
- c. Ubi Kayu, yakni Kecamatan Kajang, Kindang, Bontotiro, dan Kecamatan Rilau Ale.
- d. Ubi Jalar, dengan luasan 3,200 Ha, ditetapkan di wilayah yakni Kecamatan Gantarang, Ujung Loe, Herlang, dan Kecamatan Kajang, Bontotiro, Bontobahari, Bulukumpa, Rilau Ale, Kindang.
- e. Kacang Tanah dengan luasan 4.203 Ha, yakni Kecamatan Gantarang, Ujung loe, Herlang, Rilau Ale, Kindang, Bontotiro, Kajang, Bulukumpa, dan Kecamatan Bontobahari.
- f. Kacang Ijo, dengan luasan 1,325 Ha, yakni Kecamatan Ujung Loe dan Kecamatan Gantarang, Bontobahari, Bontotiro, Herlang, Kajang, Bulukumpa, Rilau ale, Kindang.
- g. Kedelai dengan luasan 125 Ha, yakni Kecamatan Bontobahari dan Kecamatan Gantarang.
- h. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura, terdapat pada semua kecamatan.

2.4.2 Perikanan dan Kelautan

Potensi perikanan di Kabupaten Bulukumba terdiri dari perikanan tangkap (perikanan laut) dan perikanan budidaya (perikanan darat). Dari 10 kecamatan, 7 diantaranya mempunyai potensi kelautan sedangkan potensi perikanan darat terdapat di semua kecamatan.

Tabel 2.43
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya dan Jenis Budidaya
Perkecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015

No	Kecamatan	Jenis Perikanan Budidaya				Jumlah
		Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Mina Padi	
1	Gantarang	965	189	51	12	1.217
2	Ujungbulu	790	164	-	-	954
3	Ujung Loe	913	643	20	-	1.576
4	Bontobahari	487	54	-	-	541
5	Bontotiro	-	33	8	-	41
6	Herlang	-	19	8	-	27
7	Kajang	-	199	15	-	214
8	Bulukumpa	-	-	332	25	357
9	Rilau Ale	-	-	140	15	155
10	Kindang	-	-	92	10	102
Bulukumba	2015	3.155	1.301	666	62	5.184
	2014	3.125	1.282	666	62	5.135
	2013	3.037	1.296	660	62	5.055
	2012	3.204	1.296	660	62	5.222
	2011	2.311	1.097	644	62	4.114

Sumber: Bulukumba Dalam Angka 2014
Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016

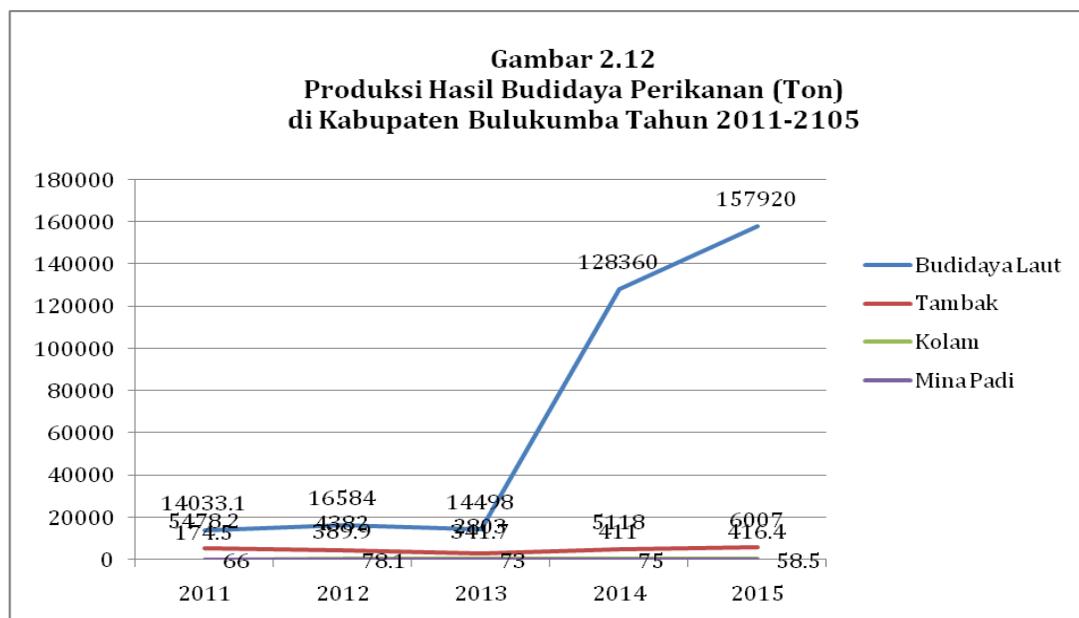
Selain perikanan laut, perikanan budidaya seperti tambak, laut, kolam, mina padi juga merupakan potensi yang dapat dikembangkan. Komoditas budidaya tambak mayoritas yakni Ikan Bandeng, Udang Windu, Udang *Vannamae*, dan Udang Api-api. Komoditas budidaya kolam mayoritas yakni ikan mas dan ikan mujair. Komoditas budidaya sawah (mina padi) mayoritas yakni ikan mas, mujair, dan ikan lele.

Selain usaha perikanan tersebut di atas juga terdapat komoditi rumput laut disepanjang pesisir pantai.

Tabel 2.44
Produksi Perikanan Hasil Budidaya (Ton) Kabupaten Bulukumba
Tahun 2011-2015

No	Kecamatan	Jenis Perikanan Budidaya				Jumlah	
		Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Mina Padi		
1	Gantarang	43.240	2.241	47,1	9	45.537	
2	Ujungbulu	38.184	261	2	-	38.447	
3	Ujung Loe	41.056	1.681	32,7	-	42.770	
4	Bontobahari	35.440	404	-	-	35.844	
5	Bontotiro	-	72	1,9	-	74	
6	Herlang	-	35	10,1	-	45	
7	Kajang	-	1.313	17,6	-	1.331	
8	Bulukumpa	-	-	129,7	20	150	
9	Rilau Ale	-	-	100,2	15	115	
10	Kindang	-	-	75,1	14,5	90	
Bulukumba		2015	157.920	6.007	416,4	58,5	164.402
		2014	128.360	5.118	411	75	133.963
		2013	14.498	2.803	341,7	73	17.716
		2012	16.584	4.382	389,9	78,1	21.434
		2011	14.033,1	5.478,2	174,5	66	19.751,8

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016



2.4.3 Peternakan

Potensi sumber daya peternakan di Kab. Bulukumba merupakan potensi yang ekonomis, ramah lingkungan serta mendukung ketahanan pangan. Hal ini karena pengembangan sektor peternakan tidak memerlukan lahan yang subur layaknya pertanian, akan tetapi lebih banyak memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif atau lahan tidur. Disamping itu, sektor peternakan memanfaatkan limbah-limbah pertanian sebagai pakan, memanfaatkan kotorannya sebagai sumber energi dan pupuk, serta produksi dari peternakan berupa daging dan telur merupakan sumber pangan yang berprotein tinggi untuk menjaga ketahanan pangan di Kab. Bulukumba.

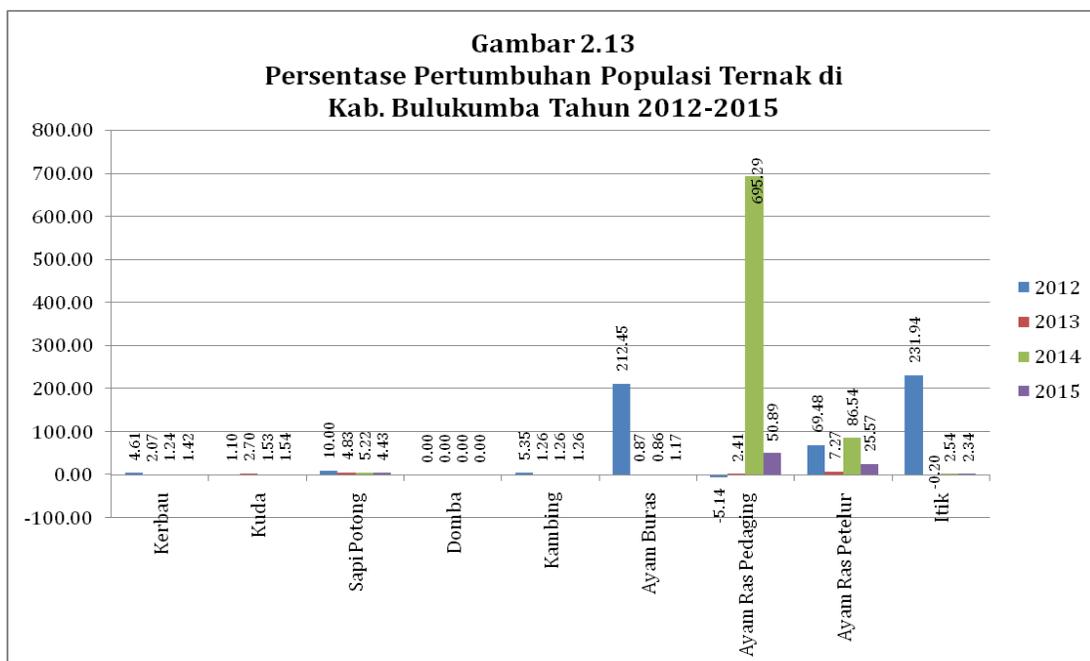
Sebagai gambaran, populasi ternak di Kab. Bulukumba tersebar di seluruh kecamatan dengan komoditas berupa ternak kerbau, kuda, sapi potong, domba, kambing, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik. Selama tahun 2010-2014, komoditas sapi merupakan komoditas dengan pertumbuhan yang paling tinggi diantara komoditas lainnya, yaitu dengan rata-

rata pertumbuhan 3,3 persen per tahun dan mencapai populasi tertinggi pada tahun 2014 (65.446 ekor). Selain sapi potong, komoditas yang merupakan potensi unggulan adalah ternak ayam ras pedaging dan petelur dengan rata-rata pertumbuhan per tahun masing-masing 9,26persen dan 3,35 persen.

Tabel 2.45
Jumlah Populasi Ternak Perkecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015 (ekor)

No.	Kecamatan	Kerbau	Kuda	Sapi Potong	Sapi Perah	Kambing	Ayam Buras	Ayam Ras Pedaging	Ayam Ras Petelur	Itik
1	Gantarang	230	7.786	10.940	-	4.506	87.366	494.900	51.974	27.045
2	Ujungbulu	8	359	983	-	1.296	37.284	286.700	104.793	3.279
3	Ujungloe	87	3.761	6.574	-	1.865	51.245	181.000	9.276	8.330
4	Bontobahari	7	966	2.679	-	4.113	28.889	249.000	1.447	1.938
5	Bontotiro	4	3.258	4.503	-	8.567	93.094	166.000	20.284	685
6	Herlang	10	2.778	4.762	-	4.693	67.405	58.900	14.490	2.895
7	Kajang	1.145	3.531	12.681	-	2.869	119.565	347.000	31.893	3.226
8	Bulukumpa	72	1.344	13.579	1	2.353	76.587	135.800	10.432	5.442
9	Rilauale	7	2.227	7.701	-	1.339	53.679	120.700	8.983	4.371
10	Kindang	-	1.236	3.942	-	529	36.206	-	4.350	2.123
Bulukumba	2015	1.570	27.246	68.344	1	32.130	651.320	2.040.000	257.922	59.334
	2014	1.548	26.834	65.446	-	31.730	643.804	1.352.000	205.405	57.976
	2013	1.529	26.430	62.198	-	31.336	638.298	170.000	110.114	56.540
	2012	1.498	25.735	59.331	-	30.947	632.805	166.000	102.655	56.652
	2011	1.432	25.454	53.935	-	29.375	202.528	175.000	60.571	17.067

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2016



Jumlah populasi akan mempengaruhi jumlah produksi sektor peternakan yaitu daging dan telur. Produksi daging tahun 2015 di Kab. Bulukumba yang tertinggi berasal dari sapi potong (68.334 ekor), ayam buras (651.320 ekor), serta ayam ras pedaging (2.040.000 ekor). Sedangkan produksi telur berasal dari ayam ras petelur (257.922 ekor), ayam buras (651.320 ekor) dan itik (59.334 ekor).

2.4.4 Kehutanan dan Perkebunan

Sektor Kehutanan memegang peranan penting untuk keseimbangan ekosistem lingkungan hidup dan menjaga kesinambungan sumberdaya air. Pembukaan hutan yang tidak terkontrol akibat penebangan liar, perladangan berpindah-pindah maupun pegelohan lahan tidak sesuai kaidah konservasi tanah menyebabkan terjadinya penambahan lahan kritis. Untuk lebih jelasnya

luas kawasan hutan dan lahan kritis di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Luas Kawasan Hutan Berdasarkan
Penetapan Surat Keputusan Menteri Kehutanan

No	Kawasan Hutan	Luas Areal Ha	Lokasi
1.	Lindung	4.843,46	Bulukumpa,Kindang, Gantarang
2.	Produksi	1.240,63	Gantarang, Rilau ale, Kindang
3.	Konservasi (TAHURA)	3,475	Bontobahari
4.	Produksi Terbatas	482,51	Kajang
Jumlah		10.041,60	Bulukumba

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2016

Salah satu areal terbesar tanaman kelapa berada di Kecamatan Kajang, produksi kelapa dalam tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2014. Tahun 2015 produksinya 1.656.00 ton sedangkan tahun 2014 mencapai 1.678.00 ton

Tabel 2.47
Luas Areal, Produksi, dan Banyaknya Petani Komoditi Kelapa Dalam
Perkecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015

No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Jumlah Petani (KK)	
		TBM	TM	TR/TM	JML			
1	Gantarang	80	287	13	380	117,30	127	
2	Ujungbulu	-	23	25	48	11,90	82	
3	Ujung Loe	96	617	424	1.137	220,80	1.901	
4	Bontobahari	-	501	424	925	112,70	1.525	
5	Bontotiro	89	561	411	1.061	85,50	1.470	
6	Herlang	328	490	17	835	157,70	1.180	
7	Kajang	214	1.140	1.252	2.606	789,00	3.057	
8	Bulukumpa	-	69	70	139	52,00	275	
9	Rilau Ale	1	135	124	260	86,50	400	
10	Kindang	-	43	21	64	23,10	87	
Bulukumba		2015	808	3.866	2.781	7.455	1.656,00	10.104
		2014	808	3.866	2.783	7.457	1.678,00	10.104
		2013	894	3.780	2.810	7.484	1.514,00	10.552
		2012	894	3.780	2.802	7.848	1.528,00	10.552
		2011	722	3.780	2.802	7.312	1.391,90	10.462

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2016

Tabel 2.48
Luas Areal, Produksi, dan Banyaknya Petani Komoditi Tembakau
Perkecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015

No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Jumlah Petani (KK)
		TBM	TM	TR/TM	JML		
1	Gantarang	-	-	-	-	-	-
2	Ujungbulu	-	-	-	-	-	-
3	Ujung Loe	-	-	-	-	-	-
4	Bontobahari	-	-	-	-	-	-
5	Bontotiro	-	22.35	-	22.35	9.80	82

6	Herlang	-	-	-	-	-	-
7	Kajang	-	-	-	-	-	-
8	Bulukumpa	-	40.70	-	40.70	21.30	65
9	Rilau Ale	-	-	-	-	-	-
10	Kindang	-	144.75	-	144.75	69.80	254
Bulukumba	2015	-	207.80	-	207.80	100.90	401
	2014	-	291.35	-	291.35	136.50	401
	2013	-	175.00	-	175.00	30.00	325
	2012	-	175.00	-	175.00	30.00	325
	2011	-	150.00	-	150.00	16.00	92

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2016

Tabel 2.49
Luas Areal, Produksi, dan Banyaknya Petani Komoditi Kakao
Perkecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015

No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Jumlah Petani (KK)
		TBM	TM	TR/TM	JML		
1	Gantarang	643	780	2	1.425	712,50	1.115
2	Ujungbulu	-	-	-	-	-	-
3	Ujung Loe	109	122	78	309	82,30	296
4	Bontobahari	19	96	5	120	41,50	234
5	Bontotiro	68	356	-	424	265,75	470
6	Herlang	439	1.010	-	1.449	836	1.833
7	Kajang	367	927	5	1.299	735	1.975
8	Bulukumpa	228	940	-	1.168	824	2.137
9	Rilau Ale	233	560	-	793	523	1.929
10	Kindang	121	1.094	22	1.237	965,50	1.583
Bulukumba	2015	2.228	5.885	112	8.224	4.984,70	11.572
	2014	2.227	5.885	112	8.224	4.882,10	11.572
	2013	1.875	5.763	34	7.671	5.187,70	11.272
	2012	1.294	6.263	34	7.590	6.101,70	11.272
	2011	1.134	6.238	59	7.431	6.026,00	10.822

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2016

Tabel 2.50
Luas Areal, Produksi, dan Banyaknya Petani Komoditi Karet
di Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015
(Diluar Yang Dikelola PT. Lonsum)

No	Area Produksi	Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Jumlah Petani (KK)
		TBM	TM	TR/TM	JML		
1	Gantarang	-	-	-	-	-	-
2	Ujungbulu	-	-	-	-	-	-
3	Ujung Loe	469	150	-	619	-	400
4	Bontobahari	-	-	-	-	-	-
5	Bontotiro	-	-	-	-	-	-
6	Herlang	-	-	-	-	-	-
7	Kajang	441	814	-	1.255	-	688
8	Bulukumpa	1.130	306	-	1.436	-	484
9	Rilau Ale	326	50	-	376	-	280
10	Kindang	-	-	-	-	-	-
Bulukumba	2015	2.366	1.320	-	3.686	-	1.852
	2014	2.366	1.320	-	3.686	2.183,00	1.852
	2013	1.750	820	-	2.570	1.354,00	1.294
	2012	1.500	820	-	2.320	1.214,40	1.294

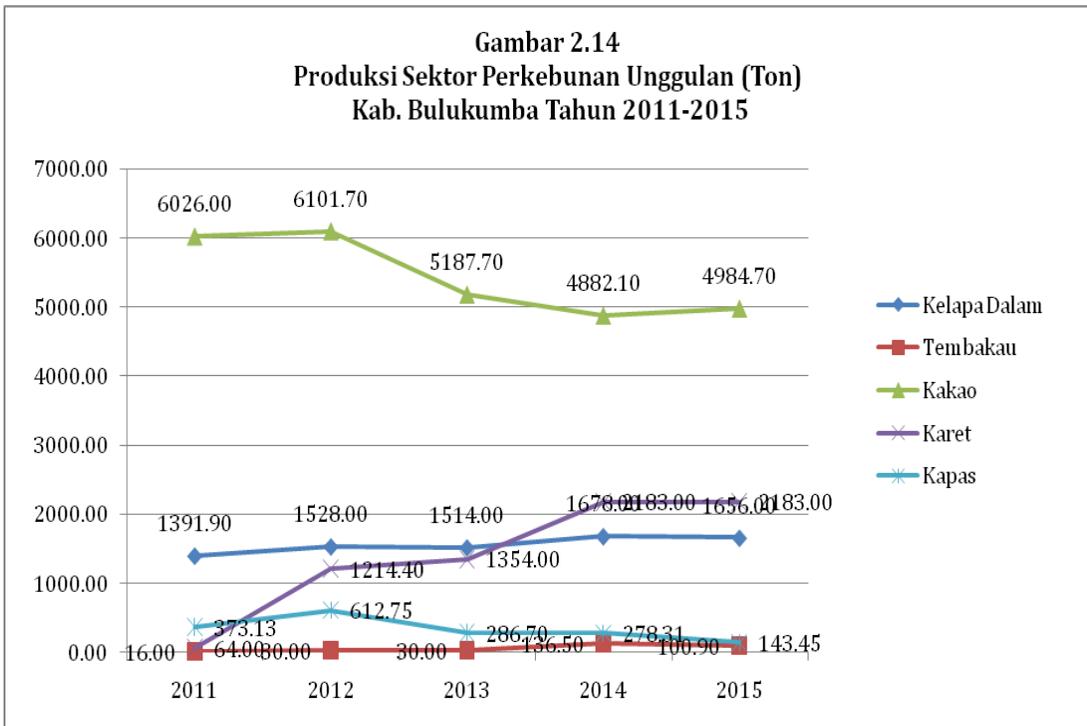
	2011	1.022	150	-	1.172	64,00	989
--	------	--------------	------------	---	--------------	--------------	------------

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2016

Tabel 2.51
Luas Areal, Produksi, dan Banyaknya Petani Komoditi Kapas
di Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015

No	Area Produksi	Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Jumlah Petani (KK)
		TBM	TM	TR/T M	JML		
1	Gantarang	-	-	-	-	-	-
2	Ujungbulu	-	-	-	-	-	-
3	Ujung Loe	-	258	-	258	33,64	253
4	Bontobahari	-	-	-	-	-	-
5	Bontotiro	-	190	-	190	13,92	190
6	Herlang	-	842	-	842	46,91	838
7	Kajang	-	710	-	710	48,97	677
8	Bulukumpa	-	-	-	-	-	-
9	Rilau Ale	-	-	-	-	-	-
10	Kindang	-	-	-	-	-	-
Bulukumba	2015	-	2.000	-	2.000	143,45	1.958
	2014	-	1.708,5	-	1.708,5	278,31	1.779
	2013	-	1.400	-	1.400	286,70	1.141
	2012	-	1.400	-	1.400	612,75	1.514
	2011	-	1.100	-	1.100	373,13	1.356

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2016



Kawasan peruntukan perkebunan, terdiri atas:

- Kawasan peruntukan perkebunan karet, dengan luasan 10.000 ha terdapat di Kecamatan Kajang, Bulukumpa, Rilau Ale, dan Kecamatan Ujungloe
- Kawasan peruntukan perkebunan kapas, terdapat pada kecamatan Gantarang, Ujungloe, Kajang, Herlang, Bontotiro, dan Bontobahari;
- Kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam & hibrida dengan luasan 5.769 ha, terdapat di semua kecamatan kecuali Kecamatan Ujungbulu;

- d. Kawasan peruntukan perkebunan kopi robusta, terdapat di semua kecamatan kecuali Kecamatan Ujungbulu dan Kecamatan Bontobahari;
- e. Kawasan peruntukan perkebunan kopi arabika, terdapat di Kecamatan Gantarang, Bulukumpa, dan Kecamatan Kindang;
- f. Kawasan peruntukan perkebunan kakao dengan luasan 1.008 ha terdapat di semua kecamatan kecuali Kecamatan Ujungbulu;
- g. Kawasan peruntukan perkebunan cengkeh dengan luasan 1.418 ha terdapat pada kecamatan Bulukumpa, Rilau Ale, Kindang, Gantarang, Ujungloe, Herlang, dan Kajang;
- h. Kawasan peruntukan perkebunan vanili, terdapat di Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan Bulukumpa;
- i. Kawasan peruntukan perkebunan lada, dikembangkan di Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan Herlang;
- j. Kawasan peruntukan perkebunan jambu mete, terdapat di semua kecamatan kecuali Kecamatan Ujungbulu;
- k. Kawasan peruntukan perkebunan kemiri, terdapat di Kecamatan Kajang;
- l. Kawasan peruntukan perkebunan kapuk, terdapat di Kecamatan Bontotiro;

2.4.5 Pariwisata

Salah satu daerah tujuan wisata utama di Sulawesi Selatan yakni Kabupaten Bulukumba. Daerah ini terletak di wilayah Selatan Sulawesi Selatan, mempunyai potensi obyek wisata yang dapat dijadikan unggulan di Sulawesi Selatan. Potensi obyek wisata di Kabupaten Bulukumba terdiri dari:

- I. Wisata Alam
 1. Pantai Bira
 2. Pantai Samboang
 3. Pantai Ujung Samboang
 4. Pantai/Tebing Apparalang
 5. Pantai Bara
 6. Pantai Pangalaiyya (Bira Timur)
 7. Pantai Lemo-Lemo
 8. Pantai Mandala Ria
 9. Pantai Panrang Luhu
 10. Pantai Marumasa
 11. Pantai Kasuso
 12. Pulau Kambing
 13. Pulau Liukang Loe
 14. Pantai Merpati
 15. Pantai Lolisang
 16. Danau Kahayya
 17. Gua Malukua
 18. Gua Pasohara
 19. Gua Liang Panikia
 20. Gua Passea
 21. Pemandian Alam Hila-Hila
 22. Pemandian Alam Limbua
 23. Pemandian Alam Bettu
 24. Air Terjun Bialo
 25. Air Terjun Bravo 45
 26. Sungai Balantieng

27. Puncak Karaeng Puang

II. Wisata Budaya

1. Puncak Pua' Janggo
2. Makam Dato Tiro
3. Makam Karaeng Sapo Hatu
4. Makam Karaeng Ambibia
5. Kawasan Adat Ammatoa
6. Pertenunan Tradisional Kajang
7. Pertenunan Sutra Bira
8. Kawasan Pembuatan Perahu Pinisi
9. Pasar Cekkeng
10. Rumah Adat Bola Lohea

III. Wisata Buatan (*man made*)

1. Perkebunan Karet
2. Kawasan Tambak Ikan Ujungloe
3. *Banana Boat* Bira/Samboang
4. Small Boat Bira/Samboang
5. Kolam Renang Taccorong/Bulukumba
6. Taman Kota Pasar Tua
7. Taman Cekkeng
8. Cekkeng Nursery

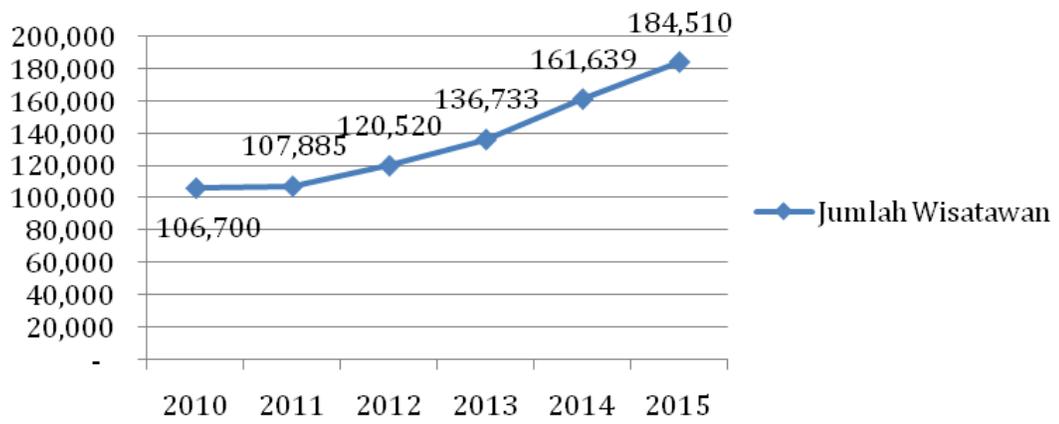
Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu tujuan wisata potensial di Provinsi Sulawesi Selatan telah menunjukkan perannya sebagai daerah dengan kunjungan wisatawan mancanegara dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jika dilihat perkembangan tiga tahun terakhir, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013, jumlah wisatawan sebanyak 133.063 orang, meningkat menjadi 157.441 orang pada tahun 2014, kemudian meningkat kembali menjadi 180.741 orang pada tahun 2015.

Tabel 2.52
Jumlah Wisatawan Asing dan Domestik yang Datang ke Bulukumba
Tahun 2010-2015

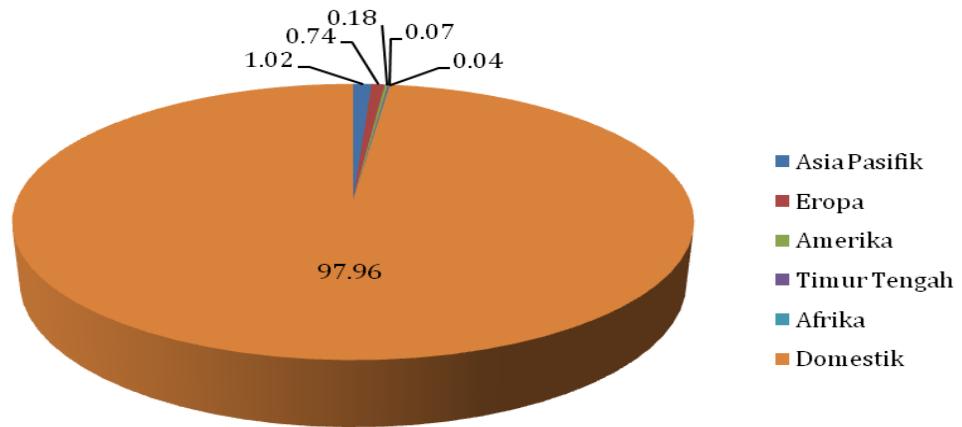
No	Asal	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Asia Pasifik	50	1.023	1.218	1.660	1.892	1.880
2	Eropa	2.222	1.150	1.278	1.386	1.565	1.361
3	Amerika	45	127	191	237	284	325
4	Timur Tengah	78	153	167	286	325	126
5	Afrika	5	47	86	101	132	77
6	Domestik	104.300	105.385	117.580	133.063	157.441	180.741
JUMLAH		106.700	107.885	120.520	136.733	161.639	184.510

Sumber: Bulukumba Dalam Angka 2011-2015

Gambar 2.15
Jumlah Kunjungan Wisatawan di
Kab. Bulukumba Tahun 2010-2015



Gambar 2.16
Persentase Wisatawan Berdasarkan Asal di
Kabupaten Bulukumba Tahun 2015



BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, maka sistem perencanaan dan penganggaran dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi pada seluruh Bentuk Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menganut prinsip efisiensi, proporsional dan terukur untuk selanjutnya diaplikasikan pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang pada akhirnya akan bermuara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kerangka pendanaan suatu daerah merupakan gambaran kemampuan keuangan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan analisis terhadap kemampuan dan kapasitas sumber-sumber pendapatan daerah yang bersifat indikatif namun terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tantangan yang mungkin dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. Selain itu, beban pembayaran pokok utang beserta bunga kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang berubah menjadi PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), setiap tahun perlu menjadi perhatian agar tidak mempengaruhi penganggaran program dan kegiatan strategis yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

3.1 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah adalah gambaran pengelolaan keuangan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan daerah yang memuat hak dan kewajiban daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Daerah
4. Pengeluaran Daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; serta
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau/ kepentingan umum.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah diikuti dengan sumber-sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dimaksudkan untuk menghindari disparitas pembangunan pada semua daerah.

3.2 Kinerja Keuangan Kabupaten Bulukumba 2011-2015

Dalam melakukan analisis terhadap kemampuan dan kapasitas keuangan Kabupaten Bulukumba selama kurun waktu 5 tahun kedepan maka salah satu cara melakukan proyeksi yakni dengan memperhatikan rasio kinerja keuangan periode sebelumnya selama 5 tahun terakhir yang memuat rasio pendapatan terhadap belanja, kemampuan fiskal terhadap prioritas daerah serta dengan mengevaluasi strategi yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Secara eksplisit, kinerja keuangan Kabupaten Bulukumba selama kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut meliputi:

3.2.1 Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba selama 5 tahun terakhir menunjukkan trend positif, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, komponen pendapatan daerah terdiri dari 3 komponen pendapatan yakni:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba menurut jenisnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan

Pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari dana perimbangan dibagi menurut beberapa jenis pendapatan meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Untuk pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau daerah lainnya.

Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut merupakan sumber pendanaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk mendanai belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Selain dari sumber pendapatan tersebut diatas, pembangunan di Kabupaten Bulukumba juga didukung melalui dana yang bersumber dari pemerintah pusat yakni dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan yang disalurkan melalui kementerian dan provinsi, pinjaman daerah serta dana pembangunan yang melibatkan partisipasi pihak ketiga berupa dana *Corporate Social Responcibility* (CSR) oleh perusahaan yang beraktivitas di Kabupaten Bulukumba. Kinerja pendapatan APBD Kabupaten Bulukumba selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2011 sebesar Rp 763.160.121.573,00 meningkat menjadi Rp 1.331.962.405.570,00 pada tahun 2015. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Bulukumba selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.1
Pendapatan Kab. Bulukumba Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
		Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah
Total Pendapapatan		763.160.121.573,00	754.862.197.527,32	918.248.587.468,00	1.088.477.944.376,00	1.331.962.405.570,00
I	Pendapatan Asli Daerah	59.539.616.755,00	33.170.905.325,32	44.147.305.700,00	91.456.622.534,00	112.996.638.470,00
I.1	Pajak Daerah	11.762.801.567,00	7.437.269.200,00	7.656.552.242,00	19.040.869.400,00	25.682.579.079,00
I.2	Hasil Retribusi Daerah	25.639.294.094,00	13.393.591.100,00	21.363.667.200,00	12.959.840.200,00	12.296.909.800,00
I.3	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	1.000.000.000,00	623.582.125,32	962.100.658,00	1.099.424.068,00	2.017.149.591,00
I.4	Lain-Lain PAD yang sah	21.137.521.094,00	11.716.462.900,00	14.164.985.600,00	58.356.488.866,00	73.000.000.000,00
II	Dana Perimbangan	526.559.388.646,00	604.491.921.920,00	685.896.923.788,00	750.370.474.202,00	901.115.999.000,00
II.1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	32.157.733.646,00	32.240.012.920,00	29.457.299.788,00	21.027.928.202,00	26.652.068.000,00
II.2	Dana Alokasi Umum	431.348.855.000,00	520.529.199.000,00	591.388.184.000,00	653.897.726.000,00	712.895.671.000,00
II.3	Dana Alokasi Khusus	63.052.800.000,00	51.722.710.000,00	65.051.440.000,00	75.444.820.000,00	161.568.260.000,00
III	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	177.061.116.172,00	117.199.370.282,00	188.204.357.980,00	246.650.847.640,00	317.849.768.100,00
III.1	Pendapatan Hibah	1.150.000.000,00	0,00	41.528.730.000,00	42.877.230.000,00	42.877.230.000,00
III.2	Dana Bagi hasil Dari Provinsi & Pemerintah Lainnya	13.950.000.000,00	13.950.000.000,00	14.294.500.000,00	20.794.500.000,00	36.119.511.500,00
III.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	145.467.320.000,00	82.699.467.000,00	108.278.314.000,00	161.438.577.000,00	223.212.661.000,00
III.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	16.493.796.172,00	20.549.903.282,00	24.102.813.980,00	21.540.540.640,00	15.640.365.600,00

Sumber: APBD Kabupaten Bulukumba 2011-2015

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata pertumbuhan total pendapatan Kabupaten Bulukumba selama 5 tahun terakhir sebesar 15,36 persen dimana rata-rata pertumbuhan terbesar di dominasi kelompok pendapatan dana perimbangan yakni sebesar 14,43 persen. Berikut disajikan grafik tingkat rata-rata pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Bulukumba 5 tahun terakhir.

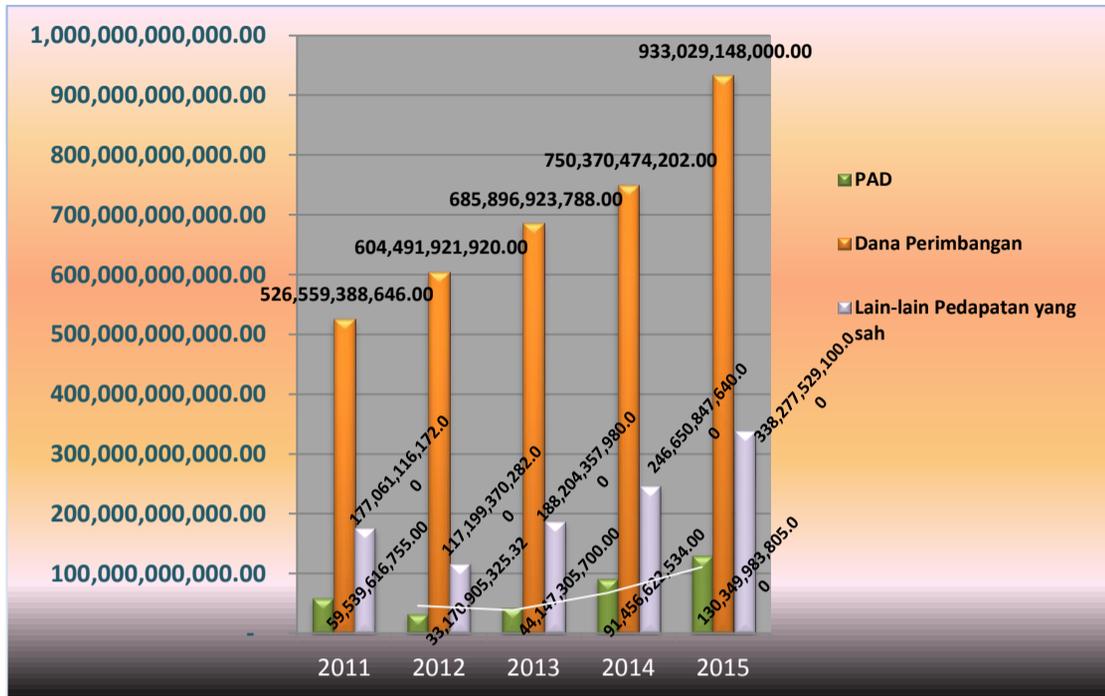
Gambar 3.1
Grafik Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba
Tahun 2011-2015



Sumber : Data diolah

Berdasarkan grafik diatas, tingkat kecendrungan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan dimana peningkatan paling besar terjadi pada tahun 2015 yakni mencapai Rp1.401.656.660.905,00 dibanding tahun 2014 yang hanya mencapai sebesar Rp1.088.477.944.376,00, dengan prosentase pertumbuhan sebesar 22,3 persen, penurunan pendapatan hanya terjadi pada tahun 2012, dimana pada tahun tersebut total pendapatan hanya sebesar Rp754.862.197.527,00 dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp763.160.121.573,00, dengan persentase penurunan sebesar 1,1 persen. Untuk pendapatan berdasarkan jenis kelompok pendapatan dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 3.2
Pendapatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015
Berdasarkan Jenis Kelompok Pendapatan



Jika dilihat dari grafik diatas, maka kontribusi jenis kelompok pendapatan terhadap total pendapatan didominasi oleh jenis kelompok pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan sedangkan kelompok pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah memberikan kontribusi yang terkecil, namun jika dilihat dari akumulasi keseluruhan jenis kelompok pendapatan khususnya kelompok pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

3.2.2 Kinerja Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih pada setiap periode tahun anggaran bersangkutan. Untuk belanja daerah Kabupaten Bulukumba selama kurun waktu 5 tahun terakhir yakni 2011-2015 adalah semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah periode 2011-2015 dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah periode sebelumnya. Belanja dalam rangka pendanaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah di Kabupaten Bulukumba 5 tahun terakhir adalah seluruh transaksi pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang telah dituangkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba dan tercatat pada neraca keuangan daerah yang telah diaudit oleh lembaga auditor negara.

Klasifikasi belanja menurut jenis belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dipisahkan menjadi 2 komponen belanja yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung dimana belanja langsung adalah jenis belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari beberapa komponen belanja yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Untuk belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan Kabupaten Bulukumba selama 5 tahun terakhir yakni periode tahun 2011-2015 penerimaan pendapatan daerah terus meningkat dari tahun ketahun yang secara langsung juga mendorong belanja daerah pada periode yang sama. Jika dilihat dari total belanja maka besaran belanja daerah Kabupaten Bulukumba selama 5 tahun terakhir masih didominasi oleh belanja pegawai. Adapun perkembangan proporsi realisasi belanja Kabupaten Bulukumba 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

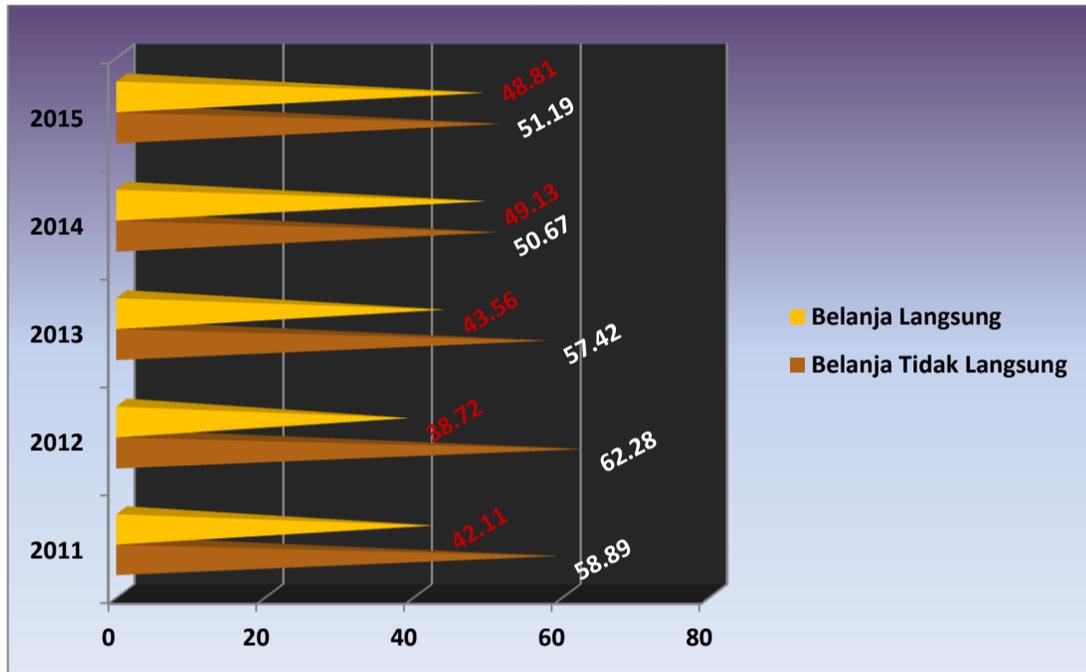
Tabel 3.2
Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba
Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Total Belanja		790.703.981.685,84	775.276.426.073,92	958.043.980.688,02	1.249.121.038.587,89	1.519.329.177.031,00
I	Belanja Tidak Langsung	479.895.676.996	516.168.090.654	565.864.654.205	630.475.208.208,89	777.767.554.325
I.1	Belanja Pegawai	442.742.222.702	474.423.452.277	521.703.469.273	584.614.750.810,89	658.877.250.696
I.2	Belanja Bunga	-	-	-	1.252.522.920,00	3.000.000.000
I.3	Belanja Hibah	7.877.601.000	5.458.000.000	4.375.500.000	3.975.500.000,00	3.413.500.000
I.4	Belanja Bantuan Sosial	1.729.751.040	1.735.053.162	1.971.474.380	1.455.302.122,00	488.500.000
I.5	Belanja Bagi Hasil	4.161.776.932	6.346.117.398	7.903.558.721	3.851.602.960,00	4.466.219.259
I.6	Belanja Bantuan Keuangan	22.884.325.322	26.725.141.803	28.667.293.580	31.115.464.599,00	107.022.084.370
I.7	Belanja Tidak Terduga	500.000.000	1.480.326.014	1.243.358.250	4.210.064.797,00	500.000.000
II	Belanja Langsung	310.808.304.689	259.108.335.419	392.179.326.483	618.645.830.379,00	657.784.597.280
II.1	Belanja Pegawai	39.772.693.464	46.200.607.192	62.940.799.072	65.829.792.364,00	48.491.115.380
II.2	Belanja Barang dan Jasa	102.581.858.252	106.455.306.977	173.803.146.575	229.947.094.400,00	291.982.502.591
II.3	Belanja Modal	168.453.752.973	106.452.421.250	155.435.380.836	322.868.943.614,57	317.310.979.309

Sumber: APBD Kab. Bulukumba 2011-2015

Berdasarkan tabel diatas, kinerja belanja daerah Kabupaten Bulukumba 5 tahun terakhir yang dipisahkan berdasarkan 2 kelompok belanja cenderung mengalami peningkatan dari tahun ketahun, penurunan terjadi hanya pada tahun 2012 dimana total belanja pada tahun bersangkutan hanya mencapai Rp775.276.426.073,92 lebih rendah jika dibandingkan dengan total belanja tahun 2011 yang mencapai Rp790.703.981.685,84. Penurunan belanja pada tahun tersebut disebabkan karena pada tahun bersangkutan juga terjadi penurunan pendapatan. Sedangkan untuk rata-rata persentase belanja 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.3
Grafik Rata-Rata Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba
Tahun 2011-2015



Sumber: Data Diolah

3.2.3 Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran selanjutnya. Secara garis besar, analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai salah satu metode untuk menentukan kebijakan pembiayaan tahun anggaran selanjutnya dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Kinerja pembiayaan Kabupaten Bulukumba kurun waktu tahun terakhir secara umum disajikan pada tabel berikut:

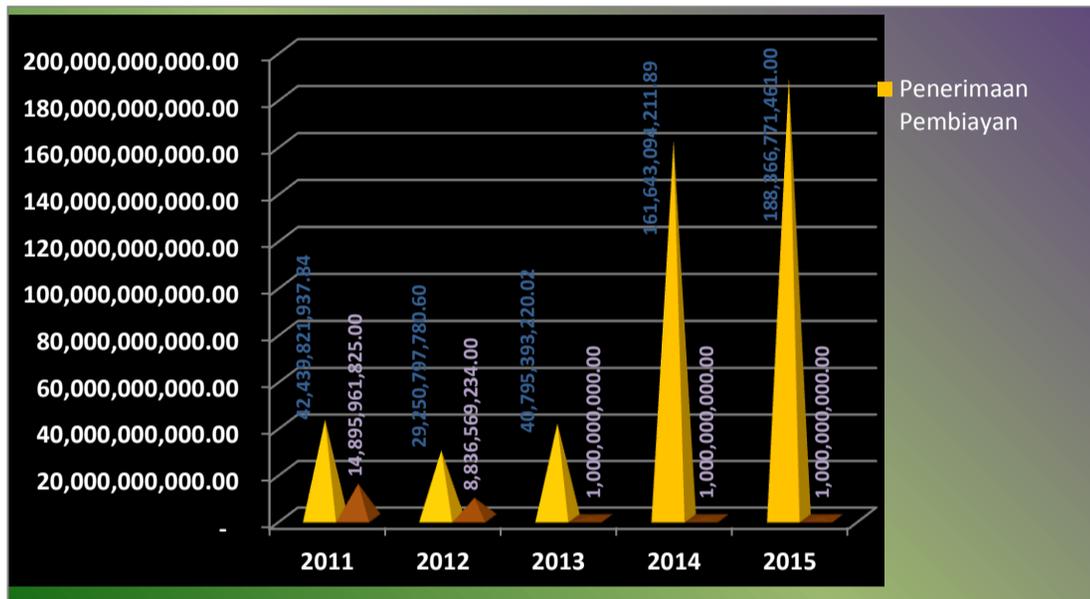
Tabel 3.3
Kinerja Pembiayaan Daerah Kabupaten Bulukumba
Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
I	Penerimaan Pembiayaan Daerah	42.439.821.937,84	29.250.797.780,60	40.795.393.220,02	161.643.094.211,89	188.366.771.461,00
I.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40.725.011.871,84	29.000.797.780,00	40.695.393.220,02	78.091.566.211,89	104.765.243.461,00
I.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	476.834.564,00	250.000.000,00	100.000.000,00	83.501.528.000,00	83.501.528.000,00
I.3	Penerimaan Piutang Daerah	1.237.975.502,00	0,00	0,00	50.000.000,00	100.000.000,00
II	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14.895.961.825,00	8.836.569.234,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
II.1	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	1.244.400.000,00	1.244.400.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
II.2	Pembayaran Pokok Utang	13.651.561.825,00	7.592.169.234,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: APBD Kab. Bulukumba 2011-2015

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pembiayaan daerah Kabupaten Bulukumba 5 tahun terakhir mengalami kenaikan khususnya pada penerimaan pembiayaan tahun 2015 dimana kenaikan tahun tersebut disebabkan silpa tahun bersangkutan mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang mencapai 25,46 persen. Untuk klasifikasi kinerja pembiayaan dari kelompok penerimaan pembiayaan dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.4
Grafik Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Kab. Bulukumba Tahun 2011-2015 (Rp)



Sumber: Data Diolah

Jika dilihat dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pembiayaan pada kelompok pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Bulukumba mengalami penurunan pada 3 tahun pertama, dimana penurunan terbesar terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 88,68 persen.

3.2.4 Neraca Daerah Kab. Bulukumba

Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dimana secara umum transaksi yang paling mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Analisis kinerja neraca daerah Kabupaten Bulukumba 3 tahun terakhir, yakni pada tahun 2012-2015 secara eksplisit dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.4
Kondisi Neraca Daerah Kabupaten Bulukumba
Tahun 2012-2015

Uraian	Saldo audited			
	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5
Aset				
Aset Lancar				
Kas Di Daerah	40.646.634.581,02	78.091.566.211,89	100.883.766.048,86	107.461.339.043,78
Kas Di Bendahara Penerimaan	88.701.115,00	0,00	-	-
Kas Di Bendahara Pengeluaran	51.461.005,00	219.100,00	20.966.662,00	669.980,00
Kas Di BLUD	0,00	0,00	3.661.120.100,19	158.400.317,40
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	199.700.150,00	687.235.948,00
Kas lainnya-Kas Dana Bos	0,00	0,00	-	1.065.618.671,00
Setara Kas				0
Investasi Jangka Pendek				0
Piutang Pajak	685.687.234,09	776.096.046,52	10.427.026.152,52	9.619.050.021,28
Piutang Retribusi	0,00	0,00	-	26.377.000,00

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
serta Kerangka Pendanaan

Uraian	Saldo audited			
	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5
Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	-	-
Piutang DAU	0,00	0,00	-	-
Piutang DAK	0,00	0,00	-	-
Piutang TP/TPGR	0,00	188.533.584,00	39.789.750,00	67.708.026,00
Piutang Lain-lain	5.547.556.425,10	5.265.741.875,50	6.738.356.587,50	21.401.087.649,50
Penyisihan Piutang tak tertagih	(2.650.697.513,35)	(3.043.810.201,51)	(3.321.040.116,15)	-
Persediaan	17.678.903.916,00	7.872.801.036,08	7.257.081.779,83	9.671.157.884,26
Jumlah Asset Lancar	62.048.246.762,86	89.151.147.652,48	125.906.767.114,75	142.461.153.956,04
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Dalam Surat Utang Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Permanen	3.214.400.001,00	4.214.400.001,00	5.214.400.001,00	6.214.400.001,00
Penyertaan Modal Pemerintah daerah	3.214.400.001,00	4.214.400.001,00	5.214.400.001,00	6.214.400.001,00
Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen	3.214.400.001,00	4.214.400.001,00	5.214.400.001,00	6.214.400.001,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang	3.214.400.001,00	4.214.400.001,00	5.214.400.001,00	6.214.400.001,00
Aset Tetap	176.380.200.992,00	169.092.343.852,00	170.613.254.402,00	182.667.945.115,00
Tanah	176.380.200.992,00	169.092.343.852,00	170.613.254.402,00	182.667.945.115,00
Peralatan & Mesin	171.546.222.536,03	159.058.249.991,00	187.653.828.258,00	239.555.606.239,00
Gedung & Bangunan	624.784.117.671,00	661.485.293.911,00	759.500.261.571,00	825.674.094.795,00
Jalan, Jaringan & Instalasi	905.868.528.951,00	992.766.710.520,00	1.097.756.202.453,00	1.362.236.393.572,00
Aset tetap lainnya	21.893.657.221,97	20.047.913.424,00	20.717.883.720,00	21.326.252.220,00
Konstruksi dalam pengerjaan	13.261.722.911,00	1.295.742.444,00	18.632.125.358,00	62.428.065.007,00
Akumulasi Penyusutan	(1.022.778.273.029,80)	(1.080.763.506.087,86)	(1.181.208.734.101,22)	(1.152.836.466.884,00)
Jumlah Aset Tetap	890.956.177.253,20	922.982.748.054,14	1.073.664.821.660,78	1.541.051.890.064,00
Dana Cadangan	-	-	-	0
Dana Cadangan	-	-	-	0
Jumlah Dana Cadangan	-	-	-	0
Aset Lainnya	-	62.400.000,00	46.800.000,00	31.200.000,00
Tagihan Jangka Panjang	-	62.400.000,00	46.800.000,00	31.200.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	168.400.800,00	900.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00
Aset Tidak Berwujud	-	375.000.000,00	785.936.341,00	807.920.451,00
Aset Lain-lain	-	503.511.341,00	75.405.430.666,00	70.845.883.822,00
Jumlah Aset Lainnya	42.512.737.766,00	79.796.043.353,00	76.613.167.007,00	71.808.131.897,52
Jumlah Aset	998.899.962.583,00	1.096.144.339.060,62	1.281.399.155.783,53	1.761.535.575.918,56
Kewajiban	2.702.366,00	219.000,00	309.500,00	176.250,00
Kewajiban Jangka Pendek	2.702.366,00	219.000,00	309.500,00	176.250,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.702.366,00	219.000,00	309.500,00	176.250,00
Utang Bunga	-	-	-	702.231.010,84
Utang Pajak	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Bank	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Obligasi	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Pusat	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Kab/Kota	-	-	-	-
Pendapatan Diterima dimuka	-	-	-	-
Utang Beban	-	-	-	2.361.546.942,25
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	5.298.737.796,00	11.021.735.920,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	225.188.217,00	1.303.343.742,00	5.299.047.296,00	14.085.690.123,00
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	44.081.663.537,00
Utang Dalam Negeri	-	-	-	44.081.663.537,00
Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-
Utang Pemerintah Pusat	-	-	-	-
Utang Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
Utang Pemerintah Kab/Kota	-	-	-	-
Utang Luar Negeri - Sektor Perbankan	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	44.081.663.537,00
Jumlah Kewajiban	227.890.583,00	1.303.343.742,00	5.299.047.296,00	58.167.353.660,09
Ekuitas Dana	40.695.93.220,02	78.091.566.311,89	104.765.243.461,05	13.884.132.372,87
SILPA	40.695.93.220,02	78.091.566.311,89	104.765.243.461,05	13.884.132.372,87
Cadangan Untuk Piutang	3.582.546.145,84	3.186.561.304,51	13.884.132.372,87	-
Cadangan Untuk Persediaan	17.678.903.916,00	7.872.801.036,08	7.257.081.779,83	-
Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(225.188.217,00)	(1.303.343.742,00)	(5.298.737.796,00)	-
Pendapatan yang Ditangguhkan	88.701.115,00	-	-	-
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	61.820.356.179,86	87.847.584.910,48	120.607.719.818,75	-
Ekuitas Dana Investasi	-	-	-	-

Uraian	Saldo audited			
	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	3.214.400.001,00	4.214.400.001,00	5.214.400.001,00	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	890.956.177.253,20	922.982.748.054,14	1.073.664.821.660,78	
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk dana Cadangan)	42.681.138.566,00	79.796.043.353,00	76.613.167.007,00	
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-	-	
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	936.851.715.820,20	1.006.993.191.408,14	1.155.492.388.668,78	
Ekuitas Dana Cadangan				
Ekuitas Dana Cadangan	-	-	-	
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	-	-	-	
Jumlah Ekuitas Dana	998.672.072.000,06	1.094.840.776.318,62	1.276.100.108.487,53	1.703.368.222.258,47
Jumlah Kewajiban & Ekuitas Dana	998.899.962.583,06	1.096.144.339.060,62	1.281.399.155.783,53	1.761.535.575.918,56

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bulukumba

Jika dilihat tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah asset mengalami peningkatan dari tahun ketahun, begitupun dengan jumlah kewajiban mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Selain itu untuk pembayaran utang daerah yang belum selesai pada akhir periode pemerintahan sebelumnya akan dibayarkan pada periode pemerintahan selanjutnya dengan mekanisme pembayaran yang disesuaikan dengan petunjuk teknis yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3. Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bulukumba

Dalam menghitung proyeksi pendapatan Kabupaten Bulukumba 5 tahun kedepan, yakni tahun 2017-2021 maka digunakan beberapa asumsi dan pertimbangan mengingat banyaknya perubahan regulasi yang tentunya berpengaruh pada beberapa sumber pendapatan. Secara umum pendapatan di Kabupaten Bulukumba diproyeksi mengalami peningkatan dari tahun ketahun dengan besaran kenaikan mencapai 10 persen. Untuk pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya komponen pendapatan asli daerah dari pajak penerangan jalan ditargetkan mengalami kenaikan yang signifikan, dimana untuk tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp. 11.500.000.000,- dan untuk tahun-tahun selanjutnya akan dikaji lebih lanjut dengan memperhatikan beberapa aspek yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pada komponen pendapatan asli daerah tersebut. Beberapa asumsi yang digunakan dalam menghitung proyeksi pendapatan selama 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Adanya kenaikan inflasi yang diperkirakan mencapai 7-10 persen per tahun.
2. Adanya penambahan beberapa obyek/subyek pajak dan retribusi.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.
4. Sistem pengelolaan keuangan yang semakin efektif dari tahun ketahun.

5. Koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap SKPD pengelola pendapatan.
6. Membuat regulasi terkait retribusi dan pajak.
7. Peningkatan Manajemen dan SDM pengelola keuangan.
8. Perbaikan infrastruktur daerah.
9. Meningkatkan koordinasi kepada sumber-sumber pendapatan ditingkat pusat dan provinsi.

Berdasarkan beberapa asumsi diatas maka proyeksi pendapatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pendapatan Kab. Bulukumba Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
		Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah
Total Pendapatan		1.571.933.173.254,46	1.792.126.490.579,90	1.902.039.139.637,89	2.090.863.188.271,70	2.446.142.094.700,84
I	Pendapatan Asli Daerah	173.495.828.444,46	190.845.411.288,90	209.929.952.417,79	229.543.082.330,39	398.689.978.164,52
	Retribusi	22.140.005.734,00	24.354.006.307,40	26.789.406.938,14	29.468.347.631,95	32.415.182.395,15
	Pajak	37.305.372.608,61	41.035.909.869,48	45.139.500.856,42	49.653.450.942,06	54.618.796.036,27
	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.795.100.000,00	3.074.610.000,00	3.382.071.000,00	3.720.278.100,00	4.092.305.910,00
	Lain-Lain PAD yang sah:	111.255.350.101,84	122.380.885.112,03	134.618.973.623,23	146.701.005.656,38	161.371.106.222,02
	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	145.800.000,00	131.220.000,00	118.098.000,00	129.907.800,00	142.898.580,00
	Penerimaan Jasa Giro	1.064.800.000,00	1.171.280.000,00	1.288.408.000,00	1.417.248.800,00	1.558.973.680,00
	Penerimaan Bunga Deposito	13.310.000.000,00	14.641.000.000,00	16.105.100.000,00	17.715.610.000,00	19.487.171.000,00
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	9.715.985.307,82	8.774.386.777,04	7.869.948.099,33	8.656.942.909,26	9.522.637.200,19
	BLUD	57.778.663.415,00	63.556.529.756,50	69.912.182.732,15	76.903.401.005,37	84.593.741.105,90
	JKN	21.096.350.000,00	23.205.985.000,00	25.526.583.500,00	28.079.241.850,00	30.887.166.035,00
II	Dana Perimbangan	1.026.332.062.800,00	1.128.965.269.080,00	1.241.861.795.988,00	1.366.047.975.586,00	1.502.652.773.145,48
	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	25.850.000.000,00	28.435.000.000,00	31.278.500.000,00	34.406.350.000,00	37.846.985.000,00
	Dana Alokasi Umum	788.319.650.800,00	867.151.615.880,00	953.866.777.468,00	1.049.253.455.214,80	1.154.178.800.736,28
	Dana Alokasi Khusus	212.162.412.000,00	233.378.653.200,00	256.716.518.520,00	282.388.170.372,00	310.626.987.409,20
III	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	372.105.282.010,00	409.315.810.211,00	450.247.391.232,10	495.272.130.355,31	544.799.343.390,84
	Pendapatan Hibah	47.164.953.000,00	51.881.448.300,00	57.069.593.130,00	62.776.552.443,00	69.054.207.687,30
	Dana Bagi hasil Dari Provinsi & Pemerintah Lainnya	39.729.674.050,00	43.702.641.455,00	48.072.905.600,50	52.880.196.160,55	58.168.215.776,61
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus2	268.006.252.800,00	294.806.878.080,00	324.287.565.888,00	356.716.322.476,80	392.387.954.724,48
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	17.204.402.160,00	18.924.842.376,00	20.817.326.613,60	22.899.059.274,96	25.188.965.202,46

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

3.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

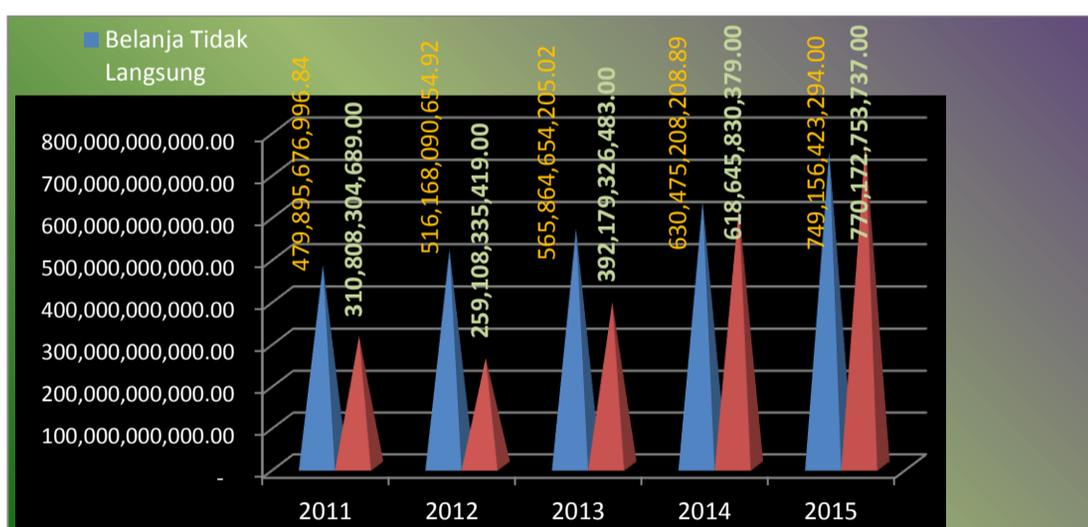
Dalam mengimplementasikan kebijakan keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba 3 tahun terakhir yakni tahun 2013-2015 terhadap kinerja keuangan periode tahun bersangkutan dapat dilihat pada beberapa komponen pengelolaan keuangan daerah, dimana berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap penganggaran harus berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai yang diamanatkan undang-undang tersebut diarahkan pada belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan belanja publik. Belanja aparatur dipergunakan untuk belanja gaji pegawai, sedangkan belanja publik ditekankan pada:

1. Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah;
2. Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan fokus pembiayaan secara proporsional;
3. Menjamin ketersediaan pendanaan khususnya untuk membiayai program pembangunan yang memiliki potensi besar bagi penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan;
4. Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah terjamin;
5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

3.4.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran Kabupaten Bulukumba 5 tahun terakhir berdasarkan 2 komponen belanja yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung, secara umum mengalami peningkatan, dimana proporsi belanja tidak langsung cenderung lebih tinggi dibanding belanja langsung yang disebabkan adanya penambahan pegawai tiap tahunnya selama periode tahun 2011-2015. Adapun proporsi penggunaan anggaran Kabupaten Bulukumba 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.5
Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Kabupaten Bulukumba Tahun 2011-2015



Sumber: Data Diolah

Berdasarkan grafik diatas proporsi belanja Kabupaten Bulukumba selama periode tahun bersangkutan cenderung mengalami kenaikan, sementara berdasarkan klasifikasinya, penurunan hanya terlihat pada kelompok belanja langsung yakni pada tahun 2012 dengan prosentase penurunan mencapai 19,95 persen. Untuk perbandingan besaran belanja tidak langsung terhadap belanja langsung, secara umum belanja tidak langsung mendominasi tingkat besaran belanja, namun pada tahun terakhir yakni tahun 2015 terjadi pergeseran komposisi belanja dimana belanja langsung lebih besar dibanding belanja tidak langsung.

BAB IV ANALISIS ISU STRATEGIS

Sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025, maka RPJM Daerah Tahap III (2016-2021) ditujukan untuk merealisasikan visi pembangunan daerah hingga tahun 2025 yaitu Kabupaten Bulukumba yang Sejahtera dan Mandiri. Perlu disadari bahwa pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang daerah belum sesuai dengan hasil yang diharapkan bersama

Dalam rangka penerapan rencana pembangunan daerah maka akan timbul berbagai permasalahan karena adanya kesenjangan espektasi antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan target perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah tertuang dalam RPJPD, RPJMD, dan RTRW.

Perspektif selama 5 tahun ke depan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 didasarkan pada kondisi obyektif saat ini, masa lalu, dan prediksi kedepan. Perspektif Kabupaten Bulukumba untuk lima tahun kedepan dijabarkan kedalam permasalahan pembangunan per urusan pemerintahan konkuren kewenangan daerah dan isu-isu strategis, yang diuraikan sebagai berikut.

4.1 Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan konkuren kewenangan daerah terdiri atas 3 yaitu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan. Adapun beberapa permasalahan urusan pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

- a. Tidak meratanya sebaran guru serta kurangnya tenaga pendidik (guru) PNS dan tenaga kependidikan (tenaga administrasi dan operator) PNS ditiap tingkat satuan pendidikan (TK, SD, SMP, dan SMA/SMK)
- b. Pemberlakuan dua kurikulum yaitu KTSP 2006 dan kurikulum 2013.
- c. Masih tingginya angka buta aksara.
- d. Belum terlayannya anak usia 3-6 tahun di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak;
- e. Masih adanya anak putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah terutama pada SMP/MTs dan SMA/SMK/MA;
- f. Masih kurangnya tenaga pendidik terutama untuk guru mata pelajaran dan guru produktif;
- g. Aksesibilitas terhadap sekolah belum merata di beberapa wilayah;
- h. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
- i. Sarana prasarana minimal pada jenjang SD/MI terutama perpustakaan dan laboratorium masih kurang;
- j. Kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing;
- k. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masih kurang;

2. Urusan Kesehatan

- a. Partisipasi masyarakat terhadap jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dalam menggunakan jaminan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmas) maupun BPJS kesehatan yang disediakan pemerintah masih rendah.
- b. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin masih rendah.

- c. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya kesehatan;
 - d. Peningkatan penyakit menular dan tidak menular yang berkontribusi besar terhadap kesakitan dan kematian;
 - e. Masih terbatasnya kemampuan manajemen informasi kesehatan meliputi pengelolaan administrasi dan regulasi kesehatan;
 - f. Kesadaran terhadap perilaku bersih dan sehat dari berbagai kelompok masyarakat masih belum optimal;
 - g. Fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan belum memadai;
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Kualitas infrastruktur daerah yang masih rendah.
 - b. Belum optimalnya penyebarluasan hasil penyusunan RTRW dan Rencana Ruang berdasarkan rencana detail per-Kecamatan yang dapat disosialisasikan pada masyarakat sebagai upaya pemanfaatan ruang.
 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a. Masih adanya beberapa lingkungan perumahan yang kumuh (tidak tertata baik) dan tidak sehat.
 - b. Rendahnya rasio saluran drainase dalam kondisi baik
 - c. Masih banyak rumah tangga yang belum memiliki instalasi limbah;
 - d. Masih rendahnya pelayanan persampahan
 5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Masih tingginya angka kriminalitas berupa gangguan keamanan dan ketertiban;
 - b. Penegakan peraturan daerah belum optimal;
 - c. Kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk mematuhi peraturan masih belum optimal;
 - d. Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi belum optimal.
 6. Urusan Sosial
 - a. Persentase KK miskin masih cukup tinggi;
 - b. Masih terdapat gelandangan, pengemis, dan anak jalanan;
 - c. Masih rendahnya kemandirian dan produktivitas penyandang cacat;
 - d. Masih rendahnya jumlah bantuan PMKS

b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja
 - a. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka.
 - b. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja.
 - c. Masih kurangnya ketersediaan lapangan kerja.
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih rendah;
 - b. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi;
 - c. Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak belum optimal;
 - d. Anak jalanan, anak korban narkoba, anak terlantar, dan anak putus sekolah masih ada.
3. Urusan Pangan
 - a. Masih kurangnya desa mandiri pangan yang dibina;
 - b. Pengelolaan, ketersediaan dan keamanan pangan belum optimal;
 - c. Sarana dan prasarana pendukung penyuluhan belum memadai

4. Urusan Pertanahan
 - a. Masih tingginya angka klaim atas tanah pemerintah daerah.
 - b. Pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi.
5. Urusan Lingkungan Hidup
 - a. BLHD Kabupaten Bulukumba belum memiliki pejabat pengawasan lingkungan hidup (PPLH) dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sebagai wujud pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
 - b. laboratorium lingkungan BLHD Kabupaten Bulukumba belum terakreditasi di Badan Akreditasi Nasional
 - c. Masih banyaknya aktivitas pencemaran lingkungan.
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Masih terdapatnya identitas ganda penduduk.
 - b. Masih terdapat penduduk usia 17 tahun atau wajib KTP yang belum mendaftarkan diri untuk memiliki dokumen kependudukan.
 - c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat
 - d. masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
 - e. Masih rendahnya tingkat kedisiplinan aparatur untuk melakukan update database kependudukan setiap saat.
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Belum maksimalnya pelaksanaan program peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
 - b. Masih belum optimalnya peranan kelembagaan ekonomi perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - d. Pengelolaan administrasi pemerintahan desa kurang tertib.
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dilapangan.
 - b. Kurangnya koordinasi lintas sektoral di tingkat kecamatan
 - c. Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi masih kurang
 - d. Tingginya angka drop out peserta KB
 - e. Tingkat partisipasi KB pria masih rendah
9. Urusan Perhubungan
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan raya dalam tertib berlalu lintas.
 - b. Masih adanya mobil pengangkut barang yang melakukan bongkar muat dan parkir di jalan protokol khususnya di pusat pertokoan kawasan pasar sentral.
10. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a. Struktur organisasi kesekretariatan KIPP yang belum definitif.
 - b. Kurangnya tenaga teknis dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pada media center.
 - c. Tidak berfungsinya media center karena anggaran pemeliharaan dan penguatan sangat minim.
11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - a. Masih rendahnya sumberdaya manusia pelaku koperasi dan UMKM;

- b. Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi dan daya saing produk UMKM;
 - c. Belum optimalnya kemitraan antarpelaku koperasi dan UMKM;
 - d. Masih rendahnya akses koperasi dan UMKM terhadap sumber daya produktif (bantuan modal, bahan baku, penerapan teknologi, sarana pemasaran dan informasi pasar).
12. Urusan Penanaman Modal
- a. Belum optimalnya data potensi unggulan dan promosi potensi investasi
 - b. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan penanganan pengaduan masyarakat;
13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
- a. Minimnya sarana dan prasarana olahraga baik tingkat satuan pendidikan (SD, SMP, dan SMA/SMK), maupun sarana dan prasarana olahraga prestasi di masyarakat
 - b. Masih rendahnya prestasi olahraga di tingkat regional Sulawesi Selatan.
14. Urusan Statistik
- a. Data sektoral dari SKPD tidak konsisten.
 - b. Sarana dan prasarana pengolahan data dan statistik tidak memadai
15. Urusan Kebudayaan
- a. Belum optimalnya pemanfaatan seni budaya daerah sebagai daya tarik wisata.
 - b. Belum optimalnya pengelolaan situs sejarah dan benda kepurbakalaan.
 - c. Belum tersedianya gedung kesenian dan kebudayaan daerah.
16. Urusan Perpustakaan
- a. Sarana dan prasarana pengelolaan perpustakaan belum memadai;
 - b. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia belum memadai
 - c. Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat.
17. Urusan Kearsipan
- a. Sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan belum memadai;
 - b. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia belum memadai
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan**
1. Urusan Kelautan dan Perikanan
- a. Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana budidaya perikanan
 - b. Masih rendahnya produksi perikanan.
 - c. Masih rendahnya jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan akses bantuan dari pemerintah daerah.
2. Urusan Pariwisata
- a. Belum optimalnya pengembangan dan penggalian destinasi pariwisata.
 - b. Masih belum optimalnya kemitraan dalam menunjang pengembangan pemasaran pariwisata;
 - c. Masih terbatasnya SDM kepariwisataan.
3. Urusan Pertanian
- a. Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura sangat dipengaruhi oleh cuaca dan iklim;
 - b. Sarana dan prasarana penunjang untuk peningkatan produksi dan produktivitas tanaman masih terbatas;
 - c. Keterbatasan bahan baku dan bibit ternak;
 - d. Belum optimalnya penyediaan pakan dan bibit ternak unggul;
 - e. Keterbatasan sumberdaya manusia bidang peternakan;

- f. Belum optimalnya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan infeksius, non infeksius, dan zoonosis;
 - g. Masih terbatasnya sarana dan prasarana peternakan;
 - h. Kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh belum memadai;
 - i. Kualitas sumberdaya manusia pelaku utama dan pelaku tambahan usaha masih rendah
 - j. Belum adanya zonasi kluster komoditas perkebunan unggulan;
 - k. Belum berkembangnya industri pengolahan hasil perkebunan;
 - l. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perkebunan;
 - m. Belum optimalnya sarana pemasaran
4. Urusan Kehutanan
- a. Masih luasnya areal lahan kritis
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan potensi hasil hutan.
 - c. Belum optimalnya Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan.
5. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
- Masih adanya lokasi tambang galian C yang tidak memiliki izin.
6. Urusan Perdagangan
- a. Belum optimalnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan;
 - c. Belum optimalnya pengelolaan pasar desa/rakyat.
7. Urusan Perindustrian
- a. Masih rendahnya daya saing produk industri kecil dan menengah;
 - b. Belum optimalnya promosi dan kerjasama antarpelaku UMKM
8. Urusan Transmigrasi
- a. Program transmigrasi masih sepenuhnya tergantung dari kebijakan pemerintah pusat;
 - b. Kabupaten Bulukumba bukan merupakan daerah tujuan transmigran.

4.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat dimasa yang akan datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah.

Analisis isu strategis diidentifikasi berdasarkan sintesa dari berbagai permasalahan pembangunan baik dalam skala global maupun lokal yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

Pernyataan isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu strategis yang dirumuskan merupakan isu yang jika diprioritaskan penanganannya, maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar. Sebaliknya, jika isu strategis ini tidak ditangani dengan baik, maka tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi sulit tercapai.

4.2.1 Isu Global

Isu global merupakan persoalan lintas budaya dan bangsa yang sedang hangat dibicarakan pada masa sekarang ini. Isu ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia saja, melainkan dihadapi oleh berbagai negara. Isu global yang berkembang merupakan kondisi eksternal yang dampaknya tidak dapat dikontrol oleh pemerintah daerah namun dapat diantisipasi dampaknya. Berikut beberapa kondisi ataupun isu global yang dapat mempengaruhi perjalanan kebijakan pemerintah daerah.

Stabilitas Politik dan Keamanan, Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan meningkatkan kesiapsiagaan lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi terorisme. Ancaman terorisme bersifat laten, tidak berpola, dan berpotensi mengganggu keamanan negara dan stabilitas sosial politik yang dapat menghambat proses pembangunan nasional.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparaturnya penegak hukum, khususnya Polri, juga merupakan tantangan serius yang harus diselesaikan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan. Kepercayaan merupakan modal penting dalam membangun kemitraan antara masyarakat dan Polri. Melalui upaya peningkatan profesionalisme anggotanya dengan fokus pada orientasi pelayanan publik, Polri akan dapat tumbuh menjadi institusi yang disegani dan dipercaya oleh masyarakat.

Kekuatan pertahanan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan. Semakin kuatnya pertahanan Indonesia ditunjukkan dengan meningkatnya kekuatan Alutsista pada seluruh matra. Dengan peningkatan tersebut, tantangan yang harus diantisipasi adalah jaminan kesiapan Alutsista untuk operasional dan tempur dan peningkatan profesionalisme prajurit sebagai elemen utama kekuatan pertahanan.

Tata Kelola: Birokrasi Efektif dan Efisien, Kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Proses demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah yang berlangsung sejak reformasi telah merubah struktur hubungan antar berbagai lembaga, khususnya antara legislatif dan eksekutif, antara pemerintah pusat dan daerah, dan antara pemerintah dan masyarakat. Sampai saat ini masih berlangsung proses mencari bentuk pola hubungan antar lembaga yang terbaik.

Pemberantasan Korupsi, Pemberantasan korupsi masih merupakan tantangan serius bagi pembangunan di Indonesia. Korupsi sangat menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumberdaya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini akan sangat menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan akan memunculkan beragam dampak buruk bagi masyarakat luas. Oleh karena itu korupsi dapat dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Tantangan utama untuk melaksanakan pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengefektifkan penegakan hukum. Hal ini memerlukan perbaikan kualitas dan integritas aparat penegak hukum dan menyempurnaan regulasi dan peraturan perundangan. Tantangan lain dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi serta lebih meningkatkan kepedulian dan keikutsertaan masyarakat luas melalui pendidikan antikorupsi bagi masyarakat luas.

Pertumbuhan Ekonomi, Pada tahun 2013, pendapatan perkapita Indonesia telah mencapai USD 3.500 yang menempatkan Indonesia berada pada lapis bawah negara-

negara berpenghasilan menengah. Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setara dengan negara maju. Pada saat yang sama, batas antara negara berpenghasilan rendah dan negara berpenghasilan tinggi juga bergerak karena perekonomian global juga tumbuh. Agar Indonesia mampu menjadi negara berpendapatan tinggi, tentu memerlukan pertumbuhan yang lebih tinggi dari pertumbuhan global yang didukung dengan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Percepatan Pemerataan dan Keadilan, Ketimpangan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menggambarkan masih besarnya kemiskinan dan kerentanan. Hal ini dicerminkan oleh angka kemiskinan yang turun melambat dan angka penyerapan tenaga kerja yang belum dapat mengurangi pekerja rentan secara berarti. Tiga kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah: (1) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (*under utilized*) yang terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (*part time worker*), termasuk di dalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan; (2) usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (*unpaid worker*); dan (3) penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan.

Ukuran kualitas pekerjaan berdasarkan status pekerjaan rumah tangga di atas, memberikan gambaran tentang kondisi pekerjaan dan kerentanan kehidupan masih mewarnai pekerjaan yang menyumbang sekitar 65,8 persen dari pekerja. Sehingga wajar jika pertumbuhan kelompok 40 persen terbawah relatif rendah, dibawah rata-rata nasional. Dengan kondisi seperti ini, laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,0-7,0 persen per tahun akan tetap menempatkan persoalan tenaga kerja menjadi masalah penting pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti demikian relatif hanya menguntungkan beberapa kelompok tertentu, setidaknya tenaga kerja upahan.

Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, Sumberdaya manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang dicapai melalui pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.

Kesenjangan Antar Wilayah, Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia masih merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan ke depan. Selama 30 tahun (1982-2012) kontribusi PDRB Kawasan Barat Indonesia (KBI), yang mencakup wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali sangat dominan, yaitu sekitar 80 persen dari PDB, sedangkan peran Kawasan Timur Indonesia (KTI) baru sekitar 20 persen. Kesenjangan pembangunan antarwilayah dalam jangka panjang bisa memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Kesenjangan antarwilayah juga dapat dilihat dari masih terdapatnya 122 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota maupun antara kota-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan.

Kesenjangan tersebut berkaitan dengan sebaran demografi yang tidak seimbang, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai. Upaya-upaya pembangunan yang lebih berpihak kepada kawasan tertinggal menjadi suatu keharusan untuk menangani tantangan ketimpangan dan kesenjangan pembangunan.

Percepatan Pembangunan Kelautan, sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut yang sangat besar, percepatan pembangunan kelautan merupakan tantangan yang harus diupayakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tantangan yang dihadapi antara lain adalah

perlunya penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional perlu diperkuat sesuai dengan konvensi PBB tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi. Tantangan utama lainnya adalah bagaimana mengembangkan industri kelautan, industri perikanan, perniagaan laut dan peningkatan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya menjaga daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut juga merupakan tantangan dalam pembangunan kelautan.

4.2.2 Isu Strategis Daerah

Isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 disusun dengan melakukan formulasi dari fakta-fakta permasalahan pembangunan maupun permasalahan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan konkuren kewenangan daerah yang dipandang mendasar saat ini dengan metode analisis faktor internal (*strengthness* dan *weakness*) dan faktor eksternal (*opportunity* dan *threat*) yang akan dihadapi pada tahun 2016-2021.

Selain isu global, penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan dampak terhadap lingkungan hidup dari pelaksanaan program dan kegiatan seperti yang telah diamanahkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Isu strategis yang telah dirumuskan dalam dokumen KLHS sebagai berikut:

1. Meningkatnya angka kemiskinan.
2. Belum maksimalnya infrastruktur yang ada dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata.
4. Meningkatnya harga kebutuhan bahan pokok.
5. Rendahnya Produksi pertanian dan Menurunnya produksi hasil tangkap nelayan.
6. Meningkatnya penyakit menular seperti malaria, DBD, HIV/AIDS, penyalahgunaan Narkoba dan kenakalan remaja.
7. tingginya pengangguran
8. Rendahnya mutu pelayanan kesehatan.
9. Rendahnya akses air minum dan sanitasi yang layak serta masih banyak kawasan pemukiman kumuh.
10. Degradasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di masyarakat.
11. Kurangnya pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Meningkatnya kegiatan eksploitasi lahan dan SDA yang berlebihan
13. Peningkatan produksi sampah.
14. Penurunan kualitas dan kuantitas sumber air baku.
15. Meningkatnya kerusakan ekosistem pesisir, laut, dan hutan.

Setelah dilaksanakan analisis faktor lingkungan internal dan eksternal, maka isu strategis pembangunan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemerataan pembangunan daerah.

Isu strategis pemerataan pembangunan menjadi penting karena meskipun perekonomian daerah secara makro tetap menunjukkan pertumbuhan positif setiap tahunnya, namun peningkatan nilai tambah hasil produksi usaha masyarakat belum memberikan peningkatan yang signifikan yang merata pada 10 kecamatan. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan semua sektor agar hasil pemerataan pembangunan dapat dinikmati oleh semua masyarakat.

2. Penguatan ketahanan pangan daerah.

Isu strategis penguatan ketahanan pangan daerah menjadi penting oleh karena mengabaikan ketahanan pangan berarti membiarkan rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Masalah ketahanan pangan menjadi masalah yang sensitif karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Walaupun dilapangan terjadi peningkatan produksi pangan, namun tetap harus waspada terutama dalam aspek kestabilan pangan jangka panjang baik itu dari segi harga, volume, maupun kestabilan antarwilayah kecamatan.

3. Profesionalisme ASN dan reformasi birokrasi.

Isu profesionalisme aparatur sipil negara dan pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi penting karena reformasi birokrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk melakukan perubahan terhadap birokrasi, sehingga birokrasi secara terus menerus akan menunjukkan kinerja yang semakin baik. Pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan dapat mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan wewenang publik. Diharapkan juga, menjadikan pemerintah daerah memiliki birokrasi yang bersih, mampu, dan lebih meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program daerah. Melalui reformasi birokrasi, bukan hanya kualitas aparatur sipil negara diharapkan meningkat. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas pelayanan aparatur terhadap masyarakat

4. Peningkatan kualitas infrastruktur daerah.

Isu strategis ini merupakan faktor penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar tidak hanya dibutuhkan di wilayah perkotaan saja, tetapi juga sampai ke kecamatan dan desa. Peningkatan infrastruktur dan prasarana wilayah memiliki peran penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mendukung pembangunan sektor lainnya antara lain pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pelayanan publik, penataan ruang dan permukiman, pengentasan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

5. Peningkatan produktivitas potensi unggulan.

Sektor potensi unggulan di Kabupaten Bulukumba yaitu pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, dan kelautan dan perikanan. Wilayah Kabupaten Bulukumba terbagi menjadi 10 kecamatan yang masing-masing mempunyai karakteristik dan potensi wilayah yang berbeda-beda, baik potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, serta infrastruktur penunjang pembangunan. Hal ini mengisyaratkan adanya berbagai produk unggulan wilayah yang secara potensial dapat dikembangkan. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bulukumba dan menjadi sumber mata pencaharian terbesar masyarakat Kabupaten Bulukumba.

6. Peningkatan kehidupan sosial keagamaan.

Kehidupan sosial kemasyarakatan yang tenteram dan damai menjadi prasyarat utama untuk menciptakan penyelenggaraan pembangunan daerah yang kondusif. Hal tersebut perlu didukung oleh kehidupan keberagaman yang semakin baik, kesadaran akan pentingnya penegakan aturan, norma, dan pranata sosial, serta kehidupan sosial keagamaan yang dapat memperkuat jati diri masyarakat.

7. Peningkatan pelayanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan.

Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan menjadi isu strategis terkait dengan keberlangsungan hidup masyarakat dan tuntutan bahwa pembangunan daerah membutuhkan manusia yang sehat dan untuk itu dipandang penting tetap ditingkatkan setiap tahunnya. Peningkatan akses dan layanan pendidikan bersifat mendasar dan diyakini memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Bulukumba terkait dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia juga karena kondisi aktual daya dukungnya saat ini belum dapat memberikan akses dan layanan yang optimal;

8. Penataan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang.

Penataan ruang perlu mendapat perhatian pada periode 2016-2021 setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032, mengingat populasi penduduk semakin tinggi sementara ketersediaan ruang cenderung tetap, akan mengakibatkan kepadatan pada suatu

wilayah tertentu. Disamping itu, juga terkait dengan adanya wilayah rentan bencana banjir, kebersihan, dan penataan lingkungan.

9. Penanganan bencana secara terpadu.

Penanganan bencana menjadi penting terutama terkait dengan kecenderungan eksploitasi terhadap sumberdaya alam, pengrusakan lingkungan hutan dan lahan, serta penanganan bahaya kebakaran pada wilayah manajemen kebakaran. Bahaya bencana dari laut berupa abrasi pantai dan dari dataran tinggi berupa tanah longsor yang senantiasa terkait langsung dengan ketidakseimbangan lingkungan hidup.

10. Pengurangan angka kemiskinan.

Kemiskinan masih merupakan permasalahan yang dihadapi dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta peningkatan daya beli. Kondisi saat ini yang menunjukkan angka kemiskinan sebesar 34.131 jiwa (BPS Bulukumba, 2014) yang masih tinggi memerlukan penanganan secara terintegrasi dari setiap program pembangunan pada tahap 2016-2021 dalam rangka mengurangi angka kemiskinan setiap tahunnya.

11. Pengendalian kualitas lingkungan hidup.

Titik berat isu lingkungan hidup adalah persoalan lingkungan yang terkait dengan tekanan akibat aktivitas kegiatan manusia dan kerentanan yang terkait dengan bencana alam yang lebih disebabkan oleh proses alamiah. Pada Kabupaten Bulukumba, persoalan lingkungan tampaknya lebih banyak diakibatkan oleh aktivitas kegiatan manusia, terutama kegiatan di bidang pertambangan yang dilakukan oleh rakyat. Makin maraknya kegiatan penambangan batuan dan mineral yang dilakukan oleh masyarakat baik di daerah aliran sungai (DAS) maupun pada lahan kering lainnya, bila tidak memperhatikan lingkungan sudah tentu akan menimbulkan dampak negatif. Hal ini terjadi karena bekas-bekas galian tambang yang dilakukan masyarakat ternyata sebahagian besar ditinggalkan begitu saja. Kondisi yang demikian menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, pencemaran lingkungan pengelolaan juga dipengaruhi belum optimalnya penanganan sampah dan limbah rumah tangga.

12. Pengarusutamaan gender.

Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi pembangunan yang digunakan pemerintah daerah dalam upaya memperkecil atau menghilangkan kesenjangan gender diberbagai bidang pembangunan. Strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.

13. Peningkatan dan pembinaan pembangunan desa.

Isu strategis pembinaan pembangunan desa yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di Kabupaten Bulukumba, dengan melibatkan 3 pihak, yaitu pemerintah daerah, swasta, dan warga desa itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, peran dan prakarsa pemerintah daerah masih mendominasi dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dan aparat pemerintah desa dalam pembangunan desa. Pembinaan aparat pemerintah desa khususnya peningkatan kapasitas aparatur menjadi sangat penting dalam mewujudkan perencanaan penganggaran desa.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 Visi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulukumba tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan serta kondisi dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Bulukumba maka Visi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bulukumba periode 2016-2021 adalah:

“Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan Terdepan melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Dilandasi pada Pemerintahan yang Demokratis dan Religius”

Memperhatikan visi tersebut serta memperhitungkan perubahan paradigma, tantangan dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Bulukumba mampu menjadi salah satu daerah pendorong perubahan positif di tingkat nasional maupun regional. Adapun perumusan dan penjelasan pokok-pokok visi dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.1
Penjelasan Pokok-Pokok Visi dan Penjelasan Visi RPJMD
Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021**

Visi	Pokok-Pokok Visi		Penjelasan Visi
1	2		3
Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan Terdepan melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Dilandasi pada Pemerintahan yang Demokratis dan Religius	1.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Kondisi yang dimiliki, dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat/penduduk terhadap kebutuhan hak dasar hidupnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang martabat sudah tercukupi atau melebihi. Kebutuhan dasar tersebut antara lain : kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik bagi perempuan maupun laki-laki.
	2.	Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat.	Bulukumba memiliki potensi yang sangat besar dari berbagai sektor dibandingkan kabupaten lainnya di daerah selatan. Dengan potensi ini, sangat berpeluang lebih terdepan dalam pelayanan hak dasar masyarakat dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.

Visi	Pokok-Pokok Visi		Penjelasan Visi
1	2		3
	3.	Memaksimalkan Sumber Daya Daerah	Memaksimalkan sumberdaya yang ada kearah yang lebih baik
	4.	Perubahan ke arah lebih baik	Pertumbuhan dan perubahan kearah yang lebih baik dari kondisi sekarang.
	5.	Pengembangan berdasarkan potensi daerah	Bulukumba akan membangun berdasarkan aset yang dimilikinya. Strategi pembangunan diarahkan untuk pengembangan ekonomi dengan mengacu pada potensi yang ada dimasing-masing wilayah kecamatan
	6.	Ekonomi yang merata	Pendekatan pembangunan ekonomi yang secara nyata dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
	7.	Sistem Pemerintahan Demokratis	Suatu sistem dan tatanan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang dilaksanakan dengan cara transparan, partisipatif, akuntabel dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
	8.	Pengamalan Nilai-nilai moral kehidupan	Kondisi dan tatanan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama menuju pencapaian tujuan.

5.2 Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 berorientasi pada pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan seluruh aspek pembangunan lainnya sehingga dapat melahirkan masyarakat Bulukumba yang madani. Untuk mewujudkan visi pembangunan pemerintah kepala daerah terpilih, maka ditetapkan 8 misi pembangunan meliputi:

1. Meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merata dan berkeadilan;
2. Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah;
3. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berjiwa kompetitif;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*) serta penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia;
6. Meningkatkan kerjasama antardaerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antardaerah;
7. Penataan ruang dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, budaya, dan penanggulangan bencana;
8. Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman, tertib dan religius didalam kehidupan bermasyarakat;

RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 merupakan periode ketiga pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025 yaitu tahap yang diarahkan untuk:

1. Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bulukumba;
2. Memenuhi ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta;
3. Menetapkan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktifitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian;
4. Meningkatkan infrastruktur pertanian dan pengembangan pariwisata sektor unggulan di Kabupaten Bulukumba;
5. Meningkatkan sumberdaya manusia melalui pendidikan dan kesehatan;
6. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya penegakan hukum daerah dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah;
7. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tataruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi, terpenuhinya kebutuhan dasar air, listrik, saluran telekomunikasi dan gas.

Misi dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 tersebut mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025, dan olehnya itu terdapat hubungan yang kuat antara misi dalam RPJPD dengan misi dalam RPJMD sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Bulukumba 2005-2025 dengan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2016-2021

No	Misi RPJPD	No	Misi RPJMD
1.	Mewujudkan masyarakat Bulukumba yang sejahtera dan mandiri melalui pengembangan agroindustri	1.	Meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merata dan berkeadilan.
		2.	Mengoptimalkan potensi sumberdaya daerah pada sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan pariwisata.
		3.	Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah.
2.	Mewujudkan Kabupaten Bulukumba yang bersih lingkungan dan alam yang ramah mendukung Indonesia <i>go green</i>	4.	Penataan ruang dan Pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, budaya, dan penanggulangan bencana.
		5.	Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman, tertib dan religius didalam kehidupan bermasyarakat.
3.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	6.	Menciptakan sumberdaya manusia yang berjiwa kompetitif.
4.	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan amanah serta menjunjung tinggi supremasi hukum	7.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan bersih (<i>clean governance</i>) serta penegakan supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia
5.	Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah dengan meningkatkan kerjasama antarpulau yang berbasis regional dan nasional	8.	Meningkatkan kerjasama antardaerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antardaerah.

Untuk menjamin sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, berikut diuraikan keterkaitan visi dan misi sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Keterkaitan Visi Misi Kabupaten, Provinsi, dan Nasional

RPJMN 2015-2019		RPJMD SULSEL 2013-2018		RPJMD BULUKUMBA 2016-2021	
Visi		Visi		Visi	
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong		Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018		Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan Terdepan melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Dilandasi pada Pemerintahan yang Demokratis dan Religius	
Misi		Misi		Misi	
1.	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim	1.	Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama	1.	Meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merata dan berkeadilan;
2.	Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum	2.	Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama	2.	Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah.
3.	Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim	3.	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur wilayah	3.	Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah.
4.	Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera	4.	Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global	4.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berjiwa kompetitif.
5.	Mewujudkan bangsa yang berdayasaing	5.	Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum	5.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan bersih (<i>clean governance</i>) serta penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia.
6.	Mewujudkan indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional	6.	Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa	6.	Meningkatkan kerjasama antardaerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antardaerah.
7.	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam budaya	7.	Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik	7.	Penataan ruang dan Pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, budaya, dan penanggulangan bencana.
				8.	Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, Suasana aman, tertib dan religius didalam kehidupan bermasyarakat.

RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 memuat pula janji-janji politik yang dirumuskan dengan program prioritas selama masa kampanye dari Bupati dan Wakil

Bupati terpilih dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 5.4
Keterkaitan Program Prioritas Bupati/Wabup dengan Misi RPJMD

No	Misi RPJMD	Urusan	Program Prioritas
1.	Meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merata dan berkeadilan.	Kesehatan	Layanan Mobil Ambulance 24 Jam yang Dilengkapi dengan Dokter dan Paramedis.
		Kesehatan	Peningkatan Insentif Dokter dan Paramedis.
		Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Waduk dan Penyelesaian Jaringan Irigasi Induk, Sekunder dan Tersier untuk Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan.
		Perhubungan	Pembangunan/Penyiapan Ruang Publik dan Ruang Terbuka Berbasis Internet.
2.	Mengoptimalkan potensi sumberdaya daerah pada sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan pariwisata.	Pertanian	Asuransi Pertanian dan Peternakan.
		Pertanian	Penguatan Sistem Pertanian Organik dan Labelisasi Pupuk Organik/Bibit Lokal.
		Pariwisata	Pengembangan Pariwisata Inklusif Berbasis Masyarakat.
3.	Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah.	Pertanian	Pengembangan Rumah Produksi Petani, Peternak, dan Nelayan.
4.	Menciptakan sumberdaya manusia yang berjiwa kompetitif.	Pemerintahan Umum	Pengaturan Tenaga Honorer Pendidik dan Tenaga Kesehatan dengan Peraturan Bupati.
		Pendidikan	Revitalisasi SKB Bulukumba Sebagai Pusat Pengembangan Kapasitas SDM Tenaga Pendidik yang Terintegrasi dengan Pusat Kegiatan PGRI.
		Pemuda dan Olahraga	Penguatan Fungsi Stadion Mini Bulukumba Sebagai Pusat Olahraga Masyarakat.
		Pemuda dan Olahraga	Penyiapan Sarana dan Prasarana Olahraga Baru Dalam Rangka Penyiapan Bulukumba Sebagai Tuan Rumah Porda.
5.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance) serta penegakan supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Santunan Kematian bagi Masyarakat yang Tidak Mampu berupa pemberian akta kematian gratis.
		Pemerintahan Umum	Pendelegasian Kewenangan kepada Kecamatan dan Desa Dalam Rangka Kreatifitas Pelayanan.
		Pemerintahan Umum	Peningkatan Pendapatan Tetap dan Tunjangan Aparatur Desa/Kelurahan.
		Pemerintahan Umum	Alokasi 12 Persen Dana Bagi Hasil Untuk Alokasi Dana Desa (ADD).
		Pemerintahan Umum	Dana Infrastruktur Dasar Pedesaan/Kelurahan.
		Pemerintahan	Insentif Berbasis Kinerja Bagi PNS, Unit

No	Misi RPJMD	Urusan	Program Prioritas
		Umum	Kebencanaan, dan Keamanan.
		Pemerintahan Umum	Layanan Prima (Bebas KKN dan Pungli) Masyarakat.
		Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Pembaharuan Unit Pemadam Kebakaran dan Penempatan Unit Kebakaran di Kecamatan.
6.	Meningkatkan kerjasama antardaerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antardaerah.	Pemerintahan Umum	Pengembangan Sentra Kemaritiman Selatan-Selatan.
7.	Penataan ruang dan Pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, budaya, dan penanggulangan bencana.	Kebudayaan	Penguatan Kebudayaan Daerah melalui Pembangunan Gedung Kesenian dan Museum.
8.	Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman, tertib dan religius didalam kehidupan bermasyarakat	Sosial	Bantuan Modal untuk Kelompok Perempuan/Majelis Taklim, Pemuda, Kelompok Wanita Tani, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
		Pemerintahan Umum	Program Memakmurkan Masjid dan Peningkatan Insentif Imam Masjid Serta Guru TK/TPA.
		Sosial	Pengarusutamaan Penyandang Cacat, Gender dan Masyarakat Marginal dalam Akses Pelayanan Publik.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan keterkaitan dan konsistensi antara visi, misi, tujuan, sampai pada sasaran perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penyusunan kerangka kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan, yang mencakup strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, program dan kegiatan prioritas serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai implementasi pelaksanaan misi pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 maka perlu ditetapkan melalui tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai selama kurun waktu 5 tahun kedepan. Adapun penetapan tujuan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai arah bagi pelaksanaan program pembangunan secara umum serta untuk menjamin konsistensi pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai tolok ukur dan kepastian implementasi keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan maka secara eksplisit diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.5
Matriks Hirarki Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021

Visi		<i>"Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan Terdepan Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Yang Dilandasi Pada Pemerintahan Yang Demokratis Dan Religius"</i>		
No	Misi	Tujuan	Sasaran	
1	2	3	4	
1.	Meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merata dan berkeadilan;	1. Mewujudkan pembangunan, penguatan, dan pemerataan infrastruktur dasar masyarakat yang berdayaguna.	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik daerah yang berkeadilan.	2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman.
		2. Mewujudkan penyelenggaraan kesehatan masyarakat yang berkualitas.	3. Meningkatnya kualitas, kuantitas, dan cakupan infrastruktur kesehatan masyarakat.	4. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat pada tingkat dasar dan rujukan.
		3. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas	5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta cakupan infrastruktur pendidikan masyarakat.	6. Meningkatnya mutu pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.
2.	Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah.	4. Mewujudkan penataan dan pengelolaan potensi daerah.	9. Meningkatnya produktivitas komoditi pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan masyarakat dalam mendorong ketahanan pangan daerah.	10. Berkembangnya potensi dan daya tarik wisata.
3.	Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah.	5. Peningkatan pendapatan masyarakat.	11. Menurunnya angka kemiskinan masyarakat.	12. Menurunnya tingkat pengangguran daerah.
		6. Peningkatan daya saing dan mendorong pengembangan ekonomi kreatif.	13. Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat.	14. Meningkatnya daya saing dan produktivitas UMKM.

Visi		"Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan Terdepan Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Yang Dilandasi Pada Pemerintahan Yang Demokratis Dan Religius"	
No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
		7. Meningkatkan iklim dan minat investasi.	15. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang profesional. 16. Meningkatkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN.
4.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berjiwa kompetitif.	8. Menciptakan sumberdaya manusia yang berjiwa entrepreneur. 9. Meningkatkan kreativitas pemuda dan prestasi olahraga.	17. Meningkatnya daya saing dan pengembangan kewirausahaan. 18. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.
5.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan bersih (<i>clean governance</i>) serta penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia.	10. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih 11. Penegakan Supremasi Hukum dan HAM.	19. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah daerah dan pemerintah desa. 20. Meningkatnya efektivitas kelembagaan pemerintah 21. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. 22. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan. 23. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan. 24. Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum, dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum. 25. Meningkatnya kualitas pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, dan kesejahteraan sosial.
6.	Meningkatkan kerjasama antardaerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antardaerah.	12. Meningkatkan jejaring kerjasama antar daerah dan dengan stakeholder dalam pembangunan daerah	26. Meningkatnya kerjasama antar daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
7.	Penataan ruang dan Pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, budaya, dan penanggulangan bencana.	13. Mewujudkan penataan ruang dan pelestarian lingkungan hidup, budaya, dan penanggulangan bencana.	27. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang secara optimal. 28. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah. 29. Meningkatnya infrastruktur dan kesiapsiagaan bencana.

Visi		<i>"Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan Terdepan Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Yang Dilandasi Pada Pemerintahan Yang Demokratis Dan Religius"</i>		
No	Misi	Tujuan	Sasaran	
1	2	3	4	
			30. Memajukan seni dan budaya serta memelihara dan melindungi situs sejarah maupun benda-benda kepurbakalaan.	
8.	Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, Suasana aman, tertib dan religius didalam kehidupan bermasyarakat.	14. Menciptakan iklim demokrasi dan politik yang kondusif	31. Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik	
		15. Mewujudkan ketertiban dan ketenteraman serta suasana religius dalam kehidupan bermasyarakat.	32. Terciptanya ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat. 33. Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama	

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Bulukumba mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi dan perbaikan kinerja birokrasi Kabupaten Bulukumba secara berkelanjutan.

6.1 Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Ia merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan pertimbangan aspek efektifitas dan efisiensi.

Dalam kaitan ini, arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua: (1) perencanaan strategi yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi pembangunan daerah; (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksud untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis, ini dijalankan melalui program pembangunan daerah dan program prioritas berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui program prioritas masing-masing urusan. Dalam perumusan strategi pembangunan daerah ada empat perspektif yang digunakan dalam mengarahkan keselarasan dan pilihan program pembangunan daerah yakni (1) perspektif masyarakat/layanan (2) Perspektif internal ; (3) perspektif kelembagaan; (4) perspektif keuangan.

Berdasarkan pemahaman demikian, strategi pembangunan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Bulukumba
Tahun 2016-2021

Visi: Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan Terdepan melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Dilandasi pada Pemerintahan yang Demokratis dan Religius			
Misi 1: Meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merata dan berkeadilan;			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3	4
1.	Mewujudkan pembangunan, penguatan, dan pemerataan infrastruktur dasar masyarakat yang	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik daerah yang berkeadilan.	Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas infrastruktur publik berbasis simpul jaringan intra dan ekstra Kabupaten Bulukumba.

	berdayaguna.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman.	Penyediaan sarana dasar permukiman.
			Penyediaan dan penguatan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian masyarakat
	Mewujudkan penyelenggaraan kesehatan masyarakat yang berkualitas.	Meningkatnya kualitas, kuantitas, dan cakupan infrastruktur kesehatan masyarakat.	Penyediaan infrastruktur kesehatan masyarakat, dan pemerataan penyebaran tenaga medis dan paramedis pada seluruh tingkatan layanan.
		Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat pada tingkat dasar dan rujukan.	Melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan secara optimal.
	Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta cakupan infrastruktur pendidikan masyarakat.	Penyediaan dan pemerataan infrastruktur pendidikan yang berkualitas
		Meningkatnya mutu pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.	Memantapkan pelaksanaan wajib pendidikan dasar 9 tahun.
			Penerapan dan pengembangan kurikulum berstandar nasional, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna pada proses penyelenggaraan pendidikan.
			Pemberian bea siswa pada siswa miskin, siswa berprestasi serta mahasiswa dan atlet olahraga berprestasi.
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga	Peningkatan pola pengawasan terpadu terhadap proses penyelenggaraan pendidikan	
		Peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui diklat sertifikasi serta pemerataan penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan.	

		kependidikan.	
		Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat.	Penuntasan buta huruf secara terpadu.
Misi 2: Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
2.	Mewujudkan penataan dan pengelolaan potensi daerah.	Meningkatnya produktivitas komoditi pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan masyarakat dalam mendorong ketahanan pangan daerah.	Penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
		Berkembangnya potensi dan daya tarik wisata.	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata.
			Peningkatan angka kunjungan obyek wisata di Kabupaten Bulukumba
Misi 3: Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
3.	Peningkatan pendapatan masyarakat.	Menurunnya angka kemiskinan masyarakat.	Peningkatan pendapatan masyarakat kurang mampu
			Pemberdayaan Kelompok usaha masyarakat miskin
		Menurunnya tingkat pengangguran daerah.	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sehingga mempunyai keterampilan yang cukup untuk bersaing dalam dunia kerja.
	Peningkatan daya saing dan mendorong pengembangan ekonomi kreatif.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat.	Penguatan dukungan permodalan dan manajemen koperasi yang disertai dengan peningkatan daya saing pasar.
		Meningkatnya daya saing dan produktivitas UMKM.	Peningkatan kualitas hasil industri UMKM
	Meningkatkan iklim dan minat investasi.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang profesional.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perizinan

		Meningkatkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN.	Pemberian kemudahan investasi bagi investor dalam menanamkan modalnya.
Misi 4: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berjiwa kompetitif.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
4.	Menciptakan sumberdaya manusia yang berjiwa enterpreneur.	Meningkatnya daya saing dan pengembangan kewirausahaan.	Pengembangan kewirausahaan.
	Meningkatkan kreativitas pemuda dan prestasi olahraga.	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.	Pembinaan kelompok pemuda kreatif dalam mendukung program pembangunan daerah. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga
Misi 5: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan bersih (<i>clean governance</i>) serta penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
5.	Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah daerah dan pemerintah desa.	Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis terkait tugas pokok dan fungsi dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur.
		Meningkatnya efektivitas kelembagaan pemerintah	Penguatan dan penataan organisasi perangkat daerah dan perbaikan sistem pelayanan masyarakat.
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.	Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan secara terpadu, partisipatif, akuntabel, dan responsif gender.
			Menyediakan data statistik yang valid dan reliabel sebagai bahan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan.	Menerapkan pelayanan prima dan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.
		Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana administrasi kependudukan
Penegakan Supremasi Hukum dan HAM.	Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum, dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum.	Melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal dan horizontal dalam rangka penegakan hukum daerah.	

		Meningkatnya kualitas pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, dan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan secara terkoordinasi dengan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.
Misi 6: Meningkatkan kerjasama antardaerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antardaerah.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
6.	Meningkatkan jejaring kerjasama antar daerah dan dengan stakeholder dalam pembangunan daerah	Meningkatnya kerjasama antar daerah, masyarakat, dan dunia usaha.	Meningkatkan pengembangan kawasan terpadu yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
Misi 7: Penataan ruang dan Pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, budaya, dan penanggulangan bencana.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
7.	Mewujudkan penataan ruang dan pelestarian lingkungan hidup, budaya, dan penanggulangan bencana.	Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang secara optimal.	Menciptakan perencanaan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah.	Peningkatan upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup.
		Meningkatnya infrastruktur dan kesiapsiagaan bencana.	Penguatan kerjasama pemerintah daerah dan lembaga yang terkait dengan penanganan bencana dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana.
		Memajukan seni dan budaya serta memelihara dan melindungi situs sejarah maupun benda-benda kepurbakalaan.	Melaksanakan even seni secara berkala yang mengangkat budaya dan kearifan lokal dan memelihara situs sejarah dan benda kepurbakalaan.
Misi 8: Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, Suasana aman, tertib dan religius didalam kehidupan bermasyarakat.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
8.	Menciptakan iklim demokrasi dan politik yang kondusif	Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik	Meningkatkan pembinaan pada partai politik dan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula dan masyarakat.

	Mewujudkan ketertiban dan ketenteraman serta suasana religius dalam kehidupan bermasyarakat.	Terciptanya ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat	Memperkuat sistem terpadu antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketenteraman lingkungan masing-masing.
		Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama	Penguatan kerjasama pemerintah daerah dan tokoh agama dalam meningkatkan pelayanan kehidupan beragama.

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD . dengan prioritas kebijakan tersebut bukan berarti program/kegiatan pembangunan operasional SKPD di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, ia tetap berjalan tetapi dengan tekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua SKPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Selain itu semua arah kebijakan pembangunan daerah di harapkan akan mengarah pada pengelolaan keuangan yang makin berkualitas, sehingga dapat mempertahankan predikat WTP dari tahun ke tahun.

Arah kebijakan pembangunan lima tahun Kabupaten Bulukumba priode 2016-2021 adalah sebagai berikut.

a. Arah kebijakan Pembangunan Tahun 2016

Pembangunan tahun 2016 merupakan tahun awal dari priode RPJMD. Fokus pembangunan selain melanjutkan pencapaian priode RPJMD sebelumnya, juga meletakkan dasar-dasar bagi fokus pembangunan periode RPJMD saat ini. Kebijakan pembangunan pada tahun 2016 diarahkan kepada:

1. Pengembangan ekonomi kerakyatan:
 - a. Pembinaan UMKM dan koperasi;
 - b. Penguatan permodalan dan manejerial UKM serta koperasi;
 - c. Penumbuhan wirausaha baru;
 - d. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja;
 - e. Peningkatan akses masyarakat miskin usaha produktif;
 - f. Peningkatan bantuan dan jaminan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

2. Optimalisasi potensi unggulan daerah:
 - a. Peningkatan produksi pertanian dan tanaman pangan;
 - b. Peningkatan populasi ternak;
 - c. Peningkatan produksi perikanan dan rumput laut;
 - d. Peningkatan produksi tanaman perkebunan;
 - e. Pembangunan sektor pariwisata.
3. Pembangunan bidang pendidikan:
 - a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. Peningkatan mutu pendidikan;
 - c. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
 - d. Peningkatan akses dan jenjang layanan pendidikan;
 - e. Pemberantasan buta huruf;
 - f. Pengembangan organisasi dan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
4. Pembangunan bidang kesehatan:
 - a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
 - c. Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan;
 - d. Peningkatan kesehatan ibu dan anak;
 - e. Peningkatan upaya kesehatan preventif dan promotif;
 - f. Penguatan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
5. Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemandirian desa:
 - a. Penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan;
 - b. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa;
 - c. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat;
 - d. Penanggulangan kemiskinan.
6. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah:
 - a. Pembangunan dan peningkatan jalan;
 - b. Pembangunan dan peningkatan jembatan;
 - c. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pemukiman;
 - d. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pemerintah;
 - e. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang mendukung sektor unggulan, seperti irigasi, waduk, embung dll;
 - f. Dukungan pembangunan bandara.
7. Reformasi birokrasi dan penguatan good governance:
 - a. Penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan daerah;
 - b. Peningkatan kompetensi aparatur;
 - c. Pengembangan transparansi birokrasi;
 - d. Penguatan manajemen pembangunan dan pengendalian tata ruang;
 - e. Penertiban pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - f. Perbaikan administrasi pemerintahan umum;
 - g. Penguatan dokumen perencanaan.
8. Pengembangan kerjasama antar daerah dan daya saing daerah:
 - a. Kerjasama dengan kab/kota atau dengan propinsi lain;
 - b. Kerjasama dengan lembaga atau stakeholder lain.

b. Arah kebijakan Pembangunan Tahun 2017

Kebijakan pembangunan tahun 2017 diarahkan kepada:

1. Peningkatan kapasitas infrastruktur daerah:
 - a. Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan;
 - b. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
 - c. Pengembangan perumahan dan pemukiman;
 - d. Pengelolaan sumber daya air dan peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi;
 - e. Pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat;
 - f. Peningkatan kapasitas penangan bencana;
 - g. Dukungan pembangunan bandara.
2. Optimalisasi potensi unggulan daerah:
 - a. Peningkatan produksi pertanian dan tanaman pangan;
 - b. Peningkatan populasi ternak;
 - c. Peningkatan produksi perikanan dan rumput laut;
 - d. Peningkatan produksi tanaman perkebunan;
 - e. Pembangunan sektor pariwisata.
3. Reformasi birokrasi dan penguatan *Good Governance*:
 - a. Penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan daerah;
 - b. Peningkatan kompetensi aparatur;
 - c. Pengembangan transparansi birokrasi;
 - d. Penguatan manajemen pembangunan dan pengendalian tata ruang;
 - e. Penertiban pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - f. Perbaikan administrasi pemerintahan umum;
 - g. Penguatan dokumen perencanaan.
4. Peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan:
 - a. Perlindungan fungsi lingkungan;
 - b. Penanganan dampak lingkungan;
 - c. Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan;
6. Pembangunan bidang pendidikan;
7. Pembangunan kepemudaan, olahraga dan kebudayaan;
8. Pembangunan bidang kesehatan;
9. Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi.

c. Arah kebijakan Pembangunan 2018:

Kebijakan yang diprioritaskan pada tahun 2018 adalah:

1. Pengembangan kerja sama Daerah dan daya saing daerah;
 - a. Pengembangan kerjasama dengan kabupaten / kota lain;
 - b. Pengembangan iklim investasi, sarana dan prasarana pendukung investasi daerah;
 - c. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja.
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan;
3. Optimalisasi potensi unggulan daerah
4. Pembangunan bidang pendidikan;
5. Pembangunan kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan ;
6. Peningkatan infrastruktur daerah;
7. Pembangunan bidang kesehatan.

d. Arah kebijakan tahun 2019:

Kebijakan pembangunan tahun 2019 diarahkan kepada:

1. Pembinaan ketertiban dan pengembangan demokrasi:

- a. Penegakan hukum dan norma sosial;
 - b. Dukungan penyelenggaraan pemilu;
 - c. Pembinaan partai politik;
 - d. Pemberdayaan perempuan;
 - e. Pemeliharaan ketertiban dan keamanan;
 - f. Penguatan wawasan dan kesatuan bangsa.
2. Pemantapan kehidupan beragama:
 - a. Pemenuhan sarana/ prasarana ibadah;
 - b. Pemeliharaan kerukunan beragama.
 3. Pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, dan kesejahteraan sosial.
 4. Peningkatan kapasitas infrastruktur daerah:
 - a. Dukungan pembangunan jalur kereta api (Makassar-Bulukumba-Bone);
 - b. Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan;
 - c. Pengembangan kawasan strategis;
 - d. Peningkatan kapasitas pelabuhan;
 - e. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
 - f. Pengembangan perumahan dan pemukiman;
 - g. Pengelolaan sumber daya air dan peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi;
 - h. Peningkatan kapasitas penanganan bencana.
 5. Reformasi birokrasi dan penguatan *good governance*:
 - a. Peningkatan kompetensi aparatur;
 - b. Penertiban pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. Peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan:
 1. Penanganan dampak lingkungan;
 2. Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
 6. Pembangunan bidang kesehatan;
 7. Pembangunan bidang pendidikan;
 8. Optimalisasi potensi unggulan daerah;
 9. Pengembangan ekonomi kerakyatan;
 10. Pembangunan kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan.

e. Arah kebijakan pembangunan tahun 2020

Pada tahun 2020 akselerasi dilakukan pada kebijakan-kebijakan yang target kinerjanya masih jauh dari pencapaian guna mengejar pencapaian target kinerja tersebut pada akhir periode RPJMD. Adapun prioritas kebijakan pada tahun ini adalah:

- a. Pengembangan ekonomi kerakyatan;
- b. Optimalisasi potensi unggulan daerah;
- c. Pembangunan bidang pendidikan;
- d. Pembangunan kepemudaan dan olahraga dan kebudayaan;
- e. Pembangunan bidang kesehatan;
- f. Peningkatan kapasitas infrastruktur daerah;
- g. Peningkatan kapasitas biokrasi dan kelembagaan.

f. Arah kebijakan pembangunan tahun 2021

Tahun 2021 adalah tahun terakhir dari periode RPJMD 2016-2021. Pada tahun tersebut akan terselenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara bersamaan dengan beberapa kabupaten/kota. Karena itu kebijakan terakhir ketertiban dan demokrasi kembali menjadi prioritas pada tahun 2021. Selain itu, prioritas juga diberikan kepada target kinerja kebijakan yang belum tercapai pada tahun 2020. Adapun prioritas kebijakan pada tahun 2021 adalah:

- a. Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi;
- b. Optimalisasi potensi unggulan daerah;
- c. Pengembangan ekonomi kerakyatan;
- d. Pengembangan bidang pendidikan;
- e. Pembangunan bidang kesehatan;
- f. Peningkatan kapasitas biokrasi dan kelembagaan;
- g. Pemantapan infrastruktur daerah.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1: Meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merata dan berkeadilan									
1.	Mewujudkan pembangunan, penguatan, dan pemerataan infrastruktur dasar masyarakat yang berdayaguna.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik daerah yang berkeadilan.	Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas infrastruktur publik berbasis simpul jaringan intra dan ekstra Kabupaten Bulukumba.	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah;					
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman.	Penyediaan sarana dasar permukiman. Penyediaan dan penguatan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian masyarakat						
2.	Mewujudkan penyelenggaraan kesehatan masyarakat yang berkualitas.	Meningkatnya kualitas, kuantitas, dan cakupan infrastruktur kesehatan masyarakat.	Penyediaan infrastruktur kesehatan masyarakat, dan pemerataan penyebaran tenaga medis dan paramedis pada seluruh tingkatan layanan.	Pembangunan bidang kesehatan					

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat pada tingkat dasar dan rujukan.	Melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan secara optimal.							
3.	Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta cakupan infrastruktur pendidikan masyarakat.	Penyediaan dan pemerataan infrastruktur pendidikan yang berkualitas	Pembangunan bidang pendidikan	Pembangunan bidang pendidikan	Pembangunan bidang pendidikan	Pembangunan bidang pendidikan	Pembangunan bidang pendidikan	Pembangunan bidang pendidikan	
		Meningkatnya mutu pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.	Memantapkan pelaksanaan wajib pendidikan dasar 9 tahun.	Pembangunan bidang pendidikan	Pembangunan bidang pendidikan	Pembangunan bidang pendidikan	Pembangunan bidang pendidikan	Pembangunan bidang pendidikan	Pembangunan bidang pendidikan	
			Penerapan dan pengembangan kurikulum berstandar nasional, serta pemaanan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna pada proses penyelenggaraan pendidikan.		Pembangunan bidang pendidikan				Pembangunan bidang pendidikan	
			Pemberian bea siswa pada siswa miskin, siswa berprestasi serta mahasiswa dan	Pembangunan kepemudaan dan olahraga dan kebudayaan				Pembangunan kepemudaan dan olahraga dan kebudayaan		

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
			atlet olahraga berprestasi.						
			Peningkatan pola pengawasan terpadu terhadap proses penyelenggaraan pendidikan	Pembangunan bidang pendidikan		Pembangunan bidang pendidikan			
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan.	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui diklat sertifikasi serta pemerataan penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan.	Pembangunan bidang pendidikan		Pembangunan bidang pendidikan			Pembangunan bidang pendidikan
		Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat.	Penuntasan buta huruf secara terpadu.						
Misi 2: Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah.									
2.	Mewujudkan penataan dan pengelolaan potensi daerah.	Meningkatnya produktivitas komoditi pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan masyarakat dalam mendorong ketahanan pangan daerah.	Penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.	Optimalisasi potensi unggulan daerah	Pengembangan ekonomi kerakyatan	Optimalisasi potensi unggulan daerah			

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Berkembangnya potensi dan daya tarik wisata.	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata.						
			Peningkatan angka kunjungan obyek wisata di Kabupaten Bulukumba						
Misi 3: Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah.									
3.	Peningkatan pendapatan masyarakat.	Menurunnya angka kemiskinan masyarakat.	Peningkatan pendapatan masyarakat kurang mampu	Pengembangan ekonomi kerakyatan		Pengembangan ekonomi kerakyatan			Pengembangan ekonomi kerakyatan
			Pemberdayaan Kelompok usaha masyarakat miskin	Pengembangan ekonomi kerakyatan		Pengembangan ekonomi kerakyatan			Pengembangan ekonomi kerakyatan
		Menurunnya tingkat pengangguran daerah.	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sehingga mempunyai keterampilan yang cukup untuk bersaing dalam dunia kerja.	Pengembangan ekonomi kerakyatan		Pengembangan ekonomi kerakyatan			Pengembangan ekonomi kerakyatan
	Peningkatan daya saing dan mendorong pengembangan ekonomi kreatif.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat.	Penguatan dukungan permodalan dan manajemen koperasi yang disertai dengan		Pengembangan ekonomi kerakyatan		Pengembangan ekonomi kerakyatan		

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
			peningkatan daya saing pasar.						
		Meningkatnya daya saing dan produktivitas UMKM.	Peningkatan kualitas hasil industri UMKM	Pengembangan ekonomi kerakyatan			Pengembangan ekonomi kerakyatan		
	Meningkatkan iklim dan minat investasi.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang profesional.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perizinan	Pengembangan ekonomi kerakyatan			Pengembangan ekonomi kerakyatan		
		Meningkatkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN.	Pemberian kemudahan investasi bagi investor dalam menanamkan modalnya.		Pengembangan ekonomi kerakyatan			Pengembangan ekonomi kerakyatan	
Misi 4:									
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berjiwa kompetitif.									
4.	Menciptakan sumberdaya manusia yang berjiwa entrepreneur.	Meningkatnya daya saing dan pengembangan kewirausahaan.	Pengembangan kewirausahaan.						
	Meningkatkan kreativitas pemuda dan prestasi olahraga.	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.	Pembinaan kelompok pemuda kreatif dalam mendukung program pembangunan daerah.						
			Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga		Pembangunan kepemudaan dan olahraga dan kebudayaan	Pembangunan kepemudaan dan olahraga dan kebudayaan	Pembangunan kepemudaan dan olahraga dan		

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
							kebudayaan			
Misi 5: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan bersih (<i>clean governance</i>) serta penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia.										
5.	Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah daerah dan pemerintah desa.	Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis terkait tugas pokok dan fungsi dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur.	Reformasi birokrasi dan penguatan Good Governance						
		Meningkatnya efektivitas kelembagaan pemerintah	Penguatan dan penataan organisasi perangkat daerah dan perbaikan sistem pelayanan masyarakat.	Reformasi birokrasi dan penguatan Good Governance				Reformasi birokrasi dan penguatan Good Governance		
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.	Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan secara terpadu, partisipatif, akuntabel, dan responsif gender.	Reformasi birokrasi dan penguatan Good Governance						
		Menyediakan data statistik yang valid dan reliabel sebagai bahan perencanaan dan pengendalian		Reformasi birokrasi dan penguatan Good Governance						

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
			pembangunan daerah.						
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan.	Menerapkan pelayanan prima dan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.	Reformasi birokrasi dan penguatan Good Governance	Reformasi birokrasi dan penguatan Good Governance	Reformasi birokrasi dan penguatan Good Governance	Reformasi birokrasi dan penguatan Good Governance	Reformasi birokrasi dan penguatan Good Governance	Reformasi birokrasi dan penguatan Good Governance
		Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana administrasi kependudukan	Reformasi birokrasi dan penguatan Good Governance	Reformasi birokrasi dan penguatan Good Governance	Reformasi birokrasi dan penguatan Good Governance	Reformasi birokrasi dan penguatan Good Governance	Reformasi birokrasi dan penguatan Good Governance	Reformasi birokrasi dan penguatan Good Governance
	Penegakan Supremasi Hukum dan HAM.	Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum, dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum.	Melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal dan horizontal dalam rangka penegakan hukum daerah.		Pembinaan ketertiban dan pengembangan demokrasi (penegakan hukum dan norma sosial)		Pembinaan ketertiban dan pengembangan demokrasi (penegakan hukum dan norma sosial)		
		Meningkatnya kualitas pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, dan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan secara terkoordinasi dengan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.	Pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, dan kesejahteraan sosial				Pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, dan kesejahteraan sosial	
Misi 6: Meningkatkan kerjasama antardaerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antardaerah.									
6.	Meningkatkan	Meningkatnya	Meningkatkanpen	Pengembangan		Pengembangan			

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	jejaring kerjasama antar daerah dan dengan stakeholder dalam pembangunan daerah	kerjasama antar daerah, masyarakat, dan dunia usaha.	gembangkawas anterpadu yang melibatkanmasya rakatdanduniausaha.	kerjasama antar daerah dan daya saing daerah		kerjasama antar daerah dan daya saing daerah				
Misi 7: Penataan ruang dan Pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, budaya, dan penanggulangan bencana.										
7.	Mewujudkan penataan ruang dan pelestarian lingkungan hidup, budaya, dan penanggulangan bencana.	Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang secara optimal.	Menciptakan perencanaan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.		Reformasi birokrasi dan penguatan Good Governance (Penguatan Manajemen Pembangunan dan pengendalian penataan ruang)			Reformasi birokrasi dan penguatan Good Governance (Penguatan Manajemen Pembangunan dan pengendalian penataan ruang)		
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah.	Peningkatan upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup.		Peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan			Peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan		

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		Meningkatnya infrastruktur dan kesiapsiagaan bencana.	Penguatan kerjasama pemerintah daerah dan lembaga yang terkait dengan penanganan bencana dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana.		Peningkatan kapasitas infrastruktur daerah (Peningkatan kapasitas penanganan Bencana)		Peningkatan kapasitas infrastruktur daerah (Peningkatan kapasitas penanganan Bencana)			
		Memajukan seni dan budaya serta memelihara dan melindungi situs sejarah maupun benda-benda kepurbakalaan.	Melaksanakan even seni secara berkala yang mengangkat budaya dan kearifan lokal dan memelihara situs sejarah dan benda kepurbakalaan.	Pembangunan kepemudaan dan olahraga dan kebudayaan		Pembangunan kepemudaan dan olahraga dan kebudayaan				
Misi 8:										
Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, Suasana aman, tertib dan religius didalam kehidupan bermasyarakat.										
8.	Menciptakan iklim demokrasi dan politik yang kondusif	Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik	Meningkatkan pembinaan pada partai politik dan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula dan masyarakat.			Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi				Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi
	Mewujudkan ketertiban dan ketenteraman	Terciptanya ketertiban dan ketenteraman	Memperkuat sistem terpadu antara			Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan				Pemeliharaan ketertiban dan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	serta suasana religius dalam kehidupan bermasyarakat.	dalam masyarakat.	pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketentraman lingkungan masing-masing.			demokrasi				pengembangan demokrasi
		Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama	Penguatan kerjasama pemerintah daerah dan tokoh agama dalam meningkatkan pelayanan kehidupan beragama.		Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi				Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi	

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan strategi kedalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan pada rencana strategis (Renstra) SKPD.

Program-program strategis yang ditampilkan pada bagian ini merupakan program-program yang secara langsung mendukung pencapaian visi, misi pembangunan daerah.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka kebijakan umum pembangunan jangka menengah 2016-2021 Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Bulukumba 2016-2021

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						2015/(2016)	2021		
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik daerah yang berkeadilan.	Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas infrastruktur publik berbasis simpul jaringan intra dan ekstra Kabupaten Bulukumba.	Meningkatkan status dan kualitas jalan, jembatan, dan irigasi.	Program pembangunan infrastruktur	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	55,30%	100%	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga
					Persentase jembatan dalam kondisi baik	82%	100%	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga
				Program pembangunan irigasi induk, sekunder, tersier, embung, dan sumur dalam untuk optimalisasi produksi pertanian.	Persentase luas jaringan irigasi yang terpelihara dan direhabilitasi	Terdapat 70 buah dari 154 daerah irigasi dalam kondisi baik, 46 dalam kondisi rusak sedang, selebihnya berupa bangunan semi permanen.	100 persen dalam kondisi baik.	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas PSDA
			Meningkatkan sarana dan prasarana air bersih masyarakat.	Program pengembangan pengelolaan air minum.	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	72,14%	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman.	Penyediaan sarana dasar permukiman.	Meningkatkan sarana dan prasarana dasar permukiman yang	Program pengembangan sarana dan prasarana dasar	Rasio rumah layak huni	84,41	91,38	Perumahan Rakyat dan Pemukiman	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						2015/(2016)	2021		
			berwawasan lingkungan	permukiman.					
					Persentase kawasan kumuh	0,18%	0,06%	Perumahan Rakyat dan Pemukiman	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
			Ditambah data terkait KK yang belum mendapatkan fasilitas listrik		Jumlah rumah tangga pengguna listrik	91.919	93.519	Perumahan Rakyat dan Pemukiman	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Intamben
					Persentase rumah tangga bersanitasi	57%	80%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Penyediaan dan penguatan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian masyarakat	Meningkatkan kualitas pasar modern dan tradisional.	Program revitalisasi pasar.	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/ direhabilitasi	15buah	45 buah	Perdagangan	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Intamben
			Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelabuhan rakyat	Program peningkatan pelabuhan rakyat.	Jumlah pelabuhan rakyat yang direhabilitasi	1 buah	3 buah	Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo
			Meningkatkan kualitas dan kapasitas terminal angkutan dan komunikasi dan informatika.	Program peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan dan komunikasi dan informatika.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,17	0,13	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga
					Jumlah terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	1 buah	3 buah	Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Kominfo

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						2015/(2016)	2021		
					Jumlah penyiaran TV/ Radio Lokal	11 buah	11 buah	Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan dan Kominfo
2.	Meningkatnya kualitas, kuantitas, dan cakupan infrastruktur kesehatan masyarakat.	Penyediaan infrastruktur kesehatan masyarakat, dan pemerataan penyebaran tenaga medis dan paramedis pada seluruh tingkatan layanan.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur kesehatan pada seluruh jenjang layanan	Program upaya kesehatan masyarakat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	83%	95%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	89%	97%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Cakupan pelayanan nifas	92%	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Persentase cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)	95%	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Persentase cakupan pelayanan anak balita	64%	90%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan sederajat	87%	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	13%	50%	Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						2015/(2016)	2021		
					Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	11%	60%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	15%	50%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Cakupan pelayanan kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat	19%	50%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	15%	40%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	5,5%	26%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Cakupan desa yang melaksanakan STBM	84%	98%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat pada tingkat dasar dan rujukan.	Melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan secara optimal.	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	Program revitalisasi rumah sakit dan puskesmas.	Persentase Pemberi pelayanan GD yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	68,5%	100%	Kesehatan	RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
					Persentase kepuasan pelanggan rawat jalan dan rawat inap	82,6%	95%	Kesehatan	RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab		
						2015/(2016)	2021				
					Jumlah puskesmas yang terakreditasi	0 unit	20 unit	Kesehatan	Dinas Kesehatan		
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta cakupan infrastruktur pendidikan masyarakat.	Penyediaan dan pemerataan infrastruktur pendidikan yang berkualitas	Meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan	Program pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik			Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga		
					a. ruang kelas	18.03%	23.67%				
					b. perpustakaan	40.00%	45.00%				
					Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik					Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
					a. ruang kelas	20.07%	33.18%				
Sekolah pendidikan SMA kondisi bangunan baik			Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga							
a. ruang kelas	65,45%	75,67%									
b. perpustakaan	74,90%	79,00%									
c. laboratorium	71,92%	76,00%									
Revitalisasi dan peningkatan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	45%	90%			Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga					
Meningkatnya mutu pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.	Memantapkan pelaksanaan wajib pendidikan dasar 9 tahun.	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pendidikan.	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.	Angka Partisipasi Kasar (APK)			Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga			
				a. SD sederajat	140.87%	100%					
				b. SMP sederajat	146.26%	100%	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga			
				c. SMA sederajat	126.06%	100%					
				Angka Partisipasi Murni (APM)			Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga			
				a. SD sederajat	123.43%	98.00%					
				b. SMP sederajat	102.46%	98.22%					
				c. SMA sederajat	91.93%	98.25%					

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						2015/(2016)	2021		
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) a. SD sederajat b. SMP sederajat c. SMA sederajat	134.63% 111.08% 96.52%	100.50% 100.25% 98.60%	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
					Angka Putus Sekolah (APTS) a. SD sederajat b. SMP sederajat c. SMA sederajat	0.09% 0.22% 0.22%	0.04% 0.10% 0.05%	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
					Angka Melanjutkan (AM) a. SD ke SMP b. SMP ke SMA	103.58% 93.39%	99.68% 98.75%	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
					Persentase kelulusan a. SD sederajat b. SMP sederajat c. SMA sederajat	98.66% 98.84% 89.19%	100% 100% 100%	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
					Rasio siswa/kelas a. SD sederajat b. SMP sederajat c. SMA sederajat	1:23 1:23 1:21	1:30 1:30 1:30	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
					Rasio guru dan murid a. SD sederajat b. SMP sederajat c. SMA sederajat	1:24 1:22 1:22	1:30 1:30 1:30	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Penerapan dan pengembangan kurikulum berstandar nasional, serta pemaanaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna pada proses penyelenggaraan pendidikan.	Menerapkan kurikulum berstandar nasional pada seluruh jenjang pendidikan.	Program manajemen pelayanan pendidikan.		Persentase jumlah satuan pendidikan yang sudah terakreditasi a. SD sederajat b. SMP sederajat c. SMA sederajat	69.54% 43.05% 33.33%	98.00% 60.00% 50.00%	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						2015/(2016)	2021		
			Mendorong pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam proses penyelenggaraan pendidikan.	Program peningkatan kualitas kependidikan berbasis teknologi.	Persentase sekolah yang memanfaatkan pembelajaran berbasis TIK.	33,33%	38%	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
		Pemberian bea siswa pada siswa miskin, siswa berprestasi serta mahasiswa dan atlet olahraga berprestasi.	Mendorong peningkatan daya saing anak didik dan atlet olahraga.	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga.	Jumlah siswa miskin yang memperoleh beasiswa a. SD sederajat b. SMP sederajat c. SMA d. SMK	13.615 4.626 3.574 754	20.000 6.000 5.000 1.000	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
					Jumlah medali peserta didik pada kejuaraan/lomba tingkat regional dan nasional.	3 buah	10 buah	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
		Peningkatan pola pengawasan terpadu terhadap proses penyelenggaraan pendidikan	Mendorong peran serta masyarakat, swasta dan lembaga pengawas pendidikan nonformal dalam upaya peningkatan mutu pendidikan	Program pendidikan non formal.	Jumlah kegiatan pembinaan pendidikan non formal.	27 kegiatan	42 kegiatan	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan.	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui diklat sertifikasi serta pemerataan penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan.	Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan	Program peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan.	Persentase pendidik yang tersertifikasi pada satuan pendidikan. a. SD sederajat b. SMP sederajat c. SMA d. SMK	48.30% 53.41% 84.44% 38.95%	65.00% 70.55% 95.00% 60.00%	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						2015/(2016)	2021		
	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat.	Penuntasan buta huruf secara terpadu.	Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat melalui perpustakaan daerah, perpustakaan desa/kelurahan secara terpadu dengan program pendidikan luar sekolah dalam rangka mengurangi angka buta aksara.	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.	Angka melek huruf	92,48%	92,48%	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
					Jumlah perpustakaan yang dibina	600 unit	900 unit	Perpustakaan	Badan Litbang, Perpustakaan, dan Kearsipan
2.	Meningkatnya produktivitas komoditi pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan masyarakat dalam mendorong ketahanan pangan daerah.	Penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.	Program peningkatan produksi pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.	Pertumbuhan PDRB	8,21%	8,5%		
					PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)	8.345.258,97	14.526.785,63		
					PDRB perkapita	20.465.352,15	32.904.996,77		
					Rata-rata pendapatan perkapita masyarakat petani	99,500	109,450	Pertanian dan Kehutanan	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						2015/(2016)	2021		
					Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan terhadap PDRB	45,020	49,522	Pertanian dan Kehutanan	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura
					PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan atas dasar harga berlaku (ADHB).	3.757.187,30	4.132.906,03	Pertanian dan Kehutanan	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura
					PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan atas dasar harga konstan (ADHK).	2.856.608,02	3.142.268,82	Pertanian dan Kehutanan	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura
					Cakupan pembinaan kelompok tani	0,12%	0,13%	Pertanian	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura
					Jumlah tempat pengolahan padi yang menggunakan teknologi	9 unit	24 unit	Pertanian	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura
					Pertumbuhan populasi ternak	Sapi potong= 68.344; Kerbau= 1.570; Kuda= 27.246; Kambing= 32.130; Ayam Buras= 684.793; Ayam Ras Pedaging= 2.040.000; Ayam Ras Petelur= 257.922; Itik= 17.483	Sapi potong= 92.110; Kerbau= 1.727; Kuda= 30.146; Kambing= 44.928; Ayam Buras= 1.255.623; Ayam Ras Pedaging= 3.613.984; Ayam Ras Petelur= 456.924; Itik=	Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						2015/(2016)	2021		
							37.042		
					Jarak rekonstruksi tata batas Tahura.	Luas lahan Tahura = 3.475 ha dan 10 spesies flora dan fauna	Rekonstruksi tata batas Tahura Bontobahari ±30 km dan 25 spesies flora dan fauna.	Pertanian dan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
					Luas areal komoditi perkebunan	Luas areal komoditi perkebunan adalah 38.237,5 ha. Kondisi produk olahan 1 produk (coklat) dan 7 unit UPH	Luas areal komoditi perkebunan adalah 39.237,5 ha. Kondisi produk olahan 16 produk dan 17 unit UPH	Pertanian	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
					Jumlah desa mandiri pangan yang dibina	5 unit	10 unit	Pangan	Badan Ketahanan Pangan dan PP
					Jumlah lumbung pangan yang dibangun	10 unit	35 unit	Pangan	Badan Ketahanan Pangan dan PP
					Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	10 ton	150 ton	Pangan	Badan Ketahanan Pangan dan PP
					Jumlah cadangan pangan masyarakat	44 ton	250 ton	Pangan	Badan Ketahanan Pangan dan PP
					Pembinaan kelompok wanita tani	31 kelompok	101 kelompok	Pangan	Badan Ketahanan Pangan dan PP

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						2015/(2016)	2021		
					Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dibentuk	60 desa	109 desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
					Cakupan pembinaan kelompok nelayan	65,62%	65,62%	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Jumlah produksi perikanan	164.402 ton	205.502 ton	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Berkembangnya potensi dan daya tarik wisata.	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung obyek wisata.	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah obyek wisata yang dikelola dan dikembangkan	9 buah	12 buah	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Peningkatan angka kunjungan obyek wisata di Kabupaten Bulukumba	Melaksanakan promosi wisata pada tingkat regional dan nasional untuk memperkenalkan obyek wisata.	Program pengembangan pariwisata inklusif berbasis masyarakat;	Jumlah kunjungan wisatawan	184.150 orang	400.000 orang	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Menurunnya angka kemiskinan masyarakat.	Peningkatan pendapatan masyarakat kurang mampu	Pengurangan angka kemiskinan daerah.	Program penanggulangan kemiskinan daerah	Jumlah penduduk miskin	34.131 jiwa	12.176 jiwa	Sosial	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
		Pemberdayaan Kelompok usaha masyarakat miskin	Melaksanakan pembinaan kepada kelompok usaha masyarakat miskin berupa modal, sarana, dan akses pemasaran.		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang dibina	300 kelompok	500 kelompok	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Intamben
	Menurunnya tingkat pengangguran daerah.	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sehingga mempunyai keterampilan yang	Peningkatan kompetensi tenaga kerja.	Program peningkatan kualitas tenaga kerja.	Angka partisipasi angkatan kerja	90	97	Tenaga Kerja	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						2015/(2016)	2021		
		cukup untuk bersaing dalam dunia kerja.							
					Angka pengangguran terbuka	1,35%	0,64%	Tenaga Kerja	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
					Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	1 kasus	2 kasus	Tenaga Kerja	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat.	Penguatan dukungan permodalan dan manajemen koperasi yang disertai dengan peningkatan daya saing pasar.	Memperkuat permodalan dan manajemen koperasi yang sehat.	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.	Persentase koperasi berprestasi	2,44%	3,11%	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Intamben
	Meningkatnya daya saing dan produktivitas UMKM.	Peningkatan kualitas hasil industri UMKM	Melaksanakan pembinaan terhadap industri UMKM dalam bentuk modal, sarana, dan akses pemasaran.	Program pengembangan sarana pemasaran UMKM.	Jumlah UMKM aktif non BPR/LKM	10.215 unit	11.200 unit	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Intamben
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang profesional.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perizinan	Pemberian pelayanan perizinan yang cepat, tepat, murah, dan profesional.	Program peningkatan pelayanan perizinan	Jumlah perizinan yang diterbitkan tepat waktu	1.197 buah	6.671 buah	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Perizinan
					Jumlah produk hukum daerah terkait perizinan.	3 buah	11 buah	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Perizinan
					Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	1 aplikasi	1 aplikasi	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Perizinan

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						2015/(2016)	2021		
	Meningkatkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN.	Pemberian kemudahan investasi bagi investor dalam menanamkan modalnya.	Peningkatan promosi potensi daerah pada even-even nasional	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi daerah	Jumlah nilai investasi	PMDN Rp50 milyar PMA \$2 juta	PMDN Rp160 milyar PMA \$6,4 juta	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Perizinan
4.	Meningkatnya daya saing dan pengembangan kewirausahaan.	Pengembangan kewirausahaan.	Pelatihan entrepreneurship bagi wirausahawan baru.	Program pengembangan kewirausahaan dan UMKM.	Jumlah usahawan yang dibina	344 orang	544 orang	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Intamben
	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.	Pembinaan kelompok pemuda kreatif dalam mendukung program pembangunan daerah.	Pembinaan kelompok pemuda.	Program Penguatan kapasitas pemuda	Jumlah organisasi pemuda	48 unit	53 unit	Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
					Jumlah prestasi karya ilmiah remaja	3 kali	10 kali	Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga		Pengembangan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pengembangan prestasi pemuda dan olahraga	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah organisasi olahraga	25 unit	36 unit	Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
					Jumlah prestasi olahraga yang dicapai	13 kali	13 kali	Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
5.	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah daerah dan pemerintah desa.	Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis terkait tugas pokok dan fungsi dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur.	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya aparatur pemerintah daerah dan pemerintah	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan pemerintah desa.	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang menyelesaikan jenjang pendidikan formal S1, S2, dan S3.	S1= 125 orang S2= 25 orang S3= 5 orang	S1= 125 orang S2= 25 orang S3= 5 orang	Kepegawaian {Urusan Penunjang}	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						2015/(2016)	2021		
			desa.						
					Jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	563 orang	805 orang	Kepegawaian {Urusan Penunjang}	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
					Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	204 orang	1.020 orang	Kepegawaian {Urusan Penunjang}	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
					Jumlah aparatur yang memperoleh penghargaan	1.250 orang	1.250 orang	Kepegawaian {Urusan Penunjang}	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
					Jumlah aparatur yang mendapatkan penjatuhan hukuman disiplin	60 orang	60 orang	Kepegawaian {Urusan Penunjang}	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
	Meningkatnya efektivitas kelembagaan pemerintah	Penguatan dan penataan organisasi perangkat daerah dan perbaikan sistem pelayanan masyarakat.	Penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi.	Program penataan dan reorganisasi perangkat kelembagaan daerah	Jumlah produk hukum yang terkait dengan kelembagaan	3 buah	3 buah	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.	Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan secara terpadu, partisipatif, akuntabel, dan responsif gender.	Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas sebagai bahan pengambilan	Program perencanaan pembangunan daerah	Dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.	1 dok	1 dok	Perencanaan {Urusan Penunjang}	Bappeda

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						2015/(2016)	2021		
			kebijakan strategis bagi stakeholders.						
					Dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.	1 dok	1 dok	Perencanaan {Urusan Penunjang}	Bappeda
					Dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan bupati.	1 dok	1 dok	Perencanaan {Urusan Penunjang}	Bappeda
					Konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	94,31%	100%	Perencanaan {Urusan Penunjang}	Bappeda
	Menyediakan data statistik yang valid dan reliabel sebagai bahan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.		Meningkatkan kualitas data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Program pengembangan data dan informasi.	Jumlah buku profil daerah yang diterbitkan.	1 dok	1 dok	Statistik	Bappeda

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						2015/(2016)	2021		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan.	Menerapkan pelayanan prima dan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara terpadu dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP	WTP	Keuangan	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
				Program pengelolaan keuangan daerah.	Persentase pertumbuhan jumlah pendapatan daerah.	5,27%	10,48%	Keuangan	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
					Dokumen APBD	2 dok	2 dok	Keuangan	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana administrasi kependudukan	Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara gratis	Program penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	Cakupan penerbitan kartu keluarga (KK)	96,68%	95%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Cakupan penerbitan KTP-el	68,89%	100%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Jumlah kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	199,35	220	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Cakupan penerbitan akta kematian.	0,18%	0,9%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						2015/(2016)	2021		
	Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum, dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum.	Melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal dan horizontal dalam rangka penegakan hukum daerah.	Penataan kebijakan yuridis pemerintah daerah dan peningkatan kualitas produk hukum daerah.	Program penataan produk hukum daerah.	Jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan	419 buah	3.200 buah	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
				Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian penyelesaian kebijakan kepala daerah.	Persentase tindak lanjut temuan	80%	100%	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah
					Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) instansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba	58,42	100	Pemerintahan Umum	Inspektorat Kabupaten
					Penyelesaian sengketa tanah aset pemerintah daerah	5	5	Pertanahan	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, dan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan secara terkoordinasi dengan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan anak dari kekerasan.	Program pengarusutamaan penyandang cacat, gender dan masyarakat marginal dalam akses pelayanan publik	Persentase cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif.	10,25 %	18,5%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						2015/(2016)	2021		
					Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi	155 set	142 set	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
					Cakupan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam Unit Pelayanan terpadu.	208 kasus	150 kasus	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
					Jumlah sarana sosial yang direhabilitasi	18 buah	23 buah	Sosial	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
					Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	5,83%	8,24%	Sosial	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
6.	Meningkatnya kerjasama antar daerah, masyarakat, dan dunia usaha.	Meningkatkan pengembangan kawasan terpadu yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha.	Pengembangan kerjasama pembangunan antar daerah dan antar stakeholders.	Program pengembangan kerjasama antar daerah	Jumlah kerjasama antar daerah	4 buah	7 buah	Pemerintahan Umum	Bappeda
7.	Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang secara optimal.	Menciptakan perencanaan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.	Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dan mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan kawasan ruang perkotaan dalam rangka	Program penataan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	14,08	30	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						2015/(2016)	2021		
			keseimbangan antara pengembangan permukiman, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.						
					Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah perkotaan	4	30	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah.	Peningkatan upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup.	Meningkatkan upaya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.	Persentase Penanganan Sampah	57,83%	100%	Perumahan Rakyat dan Pemukiman	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
					Persentase informasi kerusakan tanah untuk produksi biomassa baik potensi rusak IV, III, II, dan I	20%	100%	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup Daerah
					Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya, dan diinformasikan status mutu airnya	Pemantauan kualitas air sungai sebanyak 11 sungai (3 titik, 2 kali pantau/tahun) sebesar 90%	Pemantauan kualitas air sungai sebanyak 11 sungai (3 titik, 2 kali pantau/tahun) sebesar 100%	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup Daerah

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						2015/(2016)	2021		
	Meningkatnya infrastruktur dan kesiapsiagaan bencana.	Penguatan kerjasama pemerintah daerah dan lembaga yang terkait dengan penanganan bencana dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana.	Memperkuat fungsi dan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mendukung penanganan bencana.	Program Tanggap Darurat Kebencanaan	Jumlah aparaturnya yang mengikuti pelatihan tanggap darurat bencana	2 orang	10 orang	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Presentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Tingkat waktu tanggap (response time rate) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	58,6%	100%	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Memajukan seni dan budaya serta memelihara dan melindungi situs sejarah maupun benda-benda kepurbakalaan.	Melaksanakan even seni secara berkala yang mengangkat budaya dan kearifan lokal dan memelihara situs sejarah dan benda kepurbakalaan.	Revitalisasi dan pengembangan kekayaan budaya dan perlindungan terhadap situs sejarah dan benda kepurbakalaan.	Program pengelolaan kekayaan budaya daerah.	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	20 buah	25 buah	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	2 kali	4 kali	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8.	Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik	Meningkatkan pembinaan pada partai politik dan pendidikan demokrasi bagi	Pendidikan politik dan demokrasi.	Program pendidikan politik masyarakat.	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	5 kali	25 kali	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
						2015/(2016)	2021		
		pemilih pemula dan masyarakat.							
	Terciptanya ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.	Memperkuat sistem terpadu antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketenteraman lingkungan masing-masing.	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan melaksanakan pencegahan berkembangnya kelompok paham radikal.	Program pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal.	Jumlah peraturan daerah/ peraturan bupati yang diawasi dan dipantau	11 buah	16 buah	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama	Penguatan kerjasama pemerintah daerah dan tokoh agama dalam meningkatkan pelayanan kehidupan beragama.	Mendorong masyarakat untuk menjalankan kehidupan yang religius sesuai dengan agama yang dianutnya.	Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama dan kesra.	Jumlah pemuka agama/ lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan/fasilitas.	385 orang	484 orang	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah
			Fasilitasi sarana dan prasarana ibadah dan pembinaan pemuka agama	Program pengembangan sarana dan prasarana ibadah.	Jumlah sarana dan prasarana ibadah yang mendapatkan bantuan	70 buah	75 buah	Pemerintahan Umum	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, indikasi rencana program prioritas Kabupaten Bulukumba berisi program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah dan pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah konkuren. Sementara itu, pagu indikatif merupakan jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis SKPD (Renstra SKPD).

Pada bagian ini turut disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Setelah program prioritas diketahui, kemudian ditentukan alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga/standar biaya masukan yang ditetapkan sesuai peraturan bupati. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bulukumba, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Propinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan didalam tabel 8.1 hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Bulukumba. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	85%	100%	41.325	100%	18.097	100%	18.988	100%	21.115	100%	22.083	22.566	SKPD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	90%	100%	10.128	100%	14.652	100%	11.697	100%	13.173	100%	14.201	13.384	SKPD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	98%	100%	498	100%	1.840	100%	1.082	100%	1.295	100%	2.025	1.097	SKPD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	90%	100%	1.521	100%	3.243	100%	3.541	100%	3.884	100%	4.399	3.899	SKPD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan	95%	100%	1.910	100%	2.965	100%	2.951	100%	3.345	100%	3.424	5.474	SKPD
	Urusan Wajib														
I	Pendidikan														
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik a. ruang kelas b. perpustakaan	18.03% 40.00%	20.10% 41.00%	27.000	21.30% 42.00%	35.000	21.50% 43.00%	37.000	22.75% 44.00%	39.000	23.67% 45.00%	42.000	1.800.000	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
		Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik a. ruang kelas b. perpustakaan c. laboratorium	20.07% 13 20	25.12% 15 21	1.000	27.91% 18 22	7.500	30.24% 20 23	4.700	32.50% 21 24	2.300	33.18% 23 25	13.000	13.000	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
		Sekolah pendidikan SMA kondisi bangunan baik a. ruang kelas b. perpustakaan c. laboratorium	65,45% 74,90% 71,92%	67,65% 75,00% 72,00%	27.000	69,95% 76,00% 73,00%	35.000	70,45% 77,70% 74,00%	37.000	72,65% 78,00% 75,00%	39.000	75,67% 79,00% 76,00%	42.000	1.800.000	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
		Revitalisasi dan peningkatan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	45%	50%	0	60%	750	70%	1.000	80%	1.250	90%	1.350	4.350	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)	Target Kinerja	Rp (Juta)	Target Kinerja	Rp (Juta)	Target Kinerja	Rp (Juta)	Target Kinerja	Rp (Juta)		
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angkat Partisipasi Kasar (APK) a. SD sederajat b. SMP sederajat c. SMA sederajat	140.87% 146.26% 126.06%	130.10% 132.90% 115.89%	20.000	22.000	110.78% 110.90% 115.15%	23.000	103.81% 102.91% 101.41%	24.000	100% 100% 100%	25.500	25.500	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	
		Angka Partisipasi Murni (APM) a. SD sederajat b. SMP sederajat c. SMA sederajat	123.43% 102.46% 91.93%	119.00% 101.81% 92.34%	20.000	22.000	107.91% 99.00% 96.67%	23.000	104.81% 98.92% 97.65%	24.000	98.00% 98.22% 98.25%	25.500	25.500	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) a. SD sederajat b. SMP sederajat c. SMA sederajat	134.63% 111.08% 96.52%	132.25% 110.43% 97.59%	20.000	22.000	120.10% 104.75% 98.15%	23.000	110.25% 102.10% 98.40%	24.000	100.50% 100.25% 98.60%	25.500	25.500	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	
		Angka Putus Sekolah (APTS) a. SD sederajat b. SMP sederajat c. SMA sederajat	0.09% 0.22% 0.22%	0.08% 0.20% 0.20%	550	600	0.06% 0.16% 0.15%	625	0.05% 0.12% 0.10%	680	0.04% 0.10% 0.05%	710	710	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	
	Program Pendidikan Menengah	Angka Melanjutkan (AM) a. SD ke SMP b. SMP ke SMA	103.58% 93.39%	102.52% 96.08%	550	600	100.61% 97.50%	625	100.25% 98.65%	680	99.68% 98.75%	710	710	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	
		Angka Kelulusan a. SD sederajat b. SMP sederajat c. SMA sederajat	98.66% 98.84% 89.19%	99.23% 99.33% 97.00%	550	600	99.70% 99.85% 99.15%	625	99.85% 99.90% 99.95%	680	100% 100% 100%	710	710	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	
		Rasio Siswa/Kelas a. SD sederajat b. SMP sederajat c. SMA sederajat	1:23 1:21 1:21	1:25 1:26 1:26	120	133	1:28 1:28 1:28	140	1:29 1:29 1:29	156	1:30 1:30 1:30	166	715	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	
		Rasio Guru/Murid a. SD sederajat b. SMP sederajat c. SMA sederajat	1:24 1:22 1:22	1:26 1:25 1:25	120	134	1:30 1:30 1:30	140	1:30 1:30 1:30	158	1:30 1:30 1:30	168	717	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase jumlah satuan pendidikan yang sudah terakreditasi a. SD sederajat b. SMP sederajat c. SMA sederajat	69.54% 43.05% 33.33%	70.01% 48.00% 39.99%	120	133	75.90% 52.97% 42.88%	140	80.95% 57.17% 46.92%	156	96.75% 58.90% 48.43%	166	715	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	
	Program Pendidikan	Persentase sekolah	33.33%	34.00%	300	500	36.00%	550	37.00%	610	38.00%	680	680	Dinas	

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)	Target Kinerja	Rp (Juta)	Target Kinerja	Rp (Juta)	Target Kinerja	Rp (Juta)	Target Kinerja	Rp (Juta)		
	Menengah	yg memanfaatkan pembelajaran berbasis TIK													Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
		Jumlah siswa miskin yang memperoleh beasiswa a. SD sederajat b. SMP sederajat c. SMA d. SMK	13.615 4.626 3.574 754	15.000 4.800 3.987 835	16.000 17.000 5.300 4.347 903	17.000 18.000 5.500 4.742 953	18.000 19.000 5.800 4.897 978	19.000 20.000 6.000 5.000 1.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
		Jumlah medali peserta didik pada kejuaraan/lomba tingkat regional dan nasional.	3	4	180	7	220	8	280	9	310	10	380	1.370	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah kegiatan pembinaan pendidikan non formal.	27	30	550	35	650	37	690	40	790	42	325	325	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik yang berkualifikasi S1/D4: a. SD sederajat b. SMP sederajat c. SMA d. SMK	86.20% 89.83% 98.38% 94.99%	86.30% 90.10% 98.40% 96.70%	130.000	89.70% 92.30% 98.60% 97.45%	145.000	90.90% 93.90% 98.75% 98.35%	150.000	92.10% 94.50% 98.90% 98.90%	160.000	95.00% 95.50% 99.00% 99.00%	170.000	170.000	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase pendidik yang tersertifikasi pada satuan pendidikan. a. SD sederajat b. SMP sederajat c. SMA d. SMK	48.30% 53.41% 84.44% 38.95%	49.10% 57.33% 87.50% 44.00%	170.105	54.00% 62.50% 90.80% 49.90%	180.000	59.00% 65.90% 92.75% 54.85%	185.000	62.00% 68.60% 95.00% 60.00%	189.000	65.00% 70.55% 95.00% 60.00%	190.000	914.105	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
		Angka Melek Huruf	92,48%	92,50%	1.300	92,51%	1.400	92,56%	1.500	92,90%	1.600	93,00%	1.700	1.700	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya Persentase APK PAUD	92,61%	94,11%	100	95,55%	200	96,75%	250	97,34%	300	98,50%	350	350	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
		Persentase lembaga penerima Bantuan Operasional Pendidikan (PAUD)	75,56%	76,24%	4.692	78,26%	6.700	79,65%	7.000	81,88%	7.400	82,23%	7.900	7.900	

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
		Meningkatnya jumlah TK Negeri	2	2	0	3	2.450	4	2.670	5	2.922	6	3.112	3.112	
II	Kesehatan														
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	75%	75%	9.000	80%	11.000	85%	13.000	90%	15.000	93%	17.000	65.000	Dinas Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	83%	83%	200	85%	300	88%	350	91%	400	93%	450	1.700	Dinas Kesehatan
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	100%	200	100%	300	100%	350	100%	400	100%	450	1.700	Dinas Kesehatan
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Instalasi Farmasi yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin sesuai Standar	100%	100%	100	100%	125	100%	150	100%	175	100%	200	750	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas	20%	20%	30	30%	40	40%	45	45%	50	50%	55	220	Dinas Kesehatan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	52%	52%	175	60%	200	65%	250	70%	300	75%	350	1.275	Dinas Kesehatan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita yang ditimbang berat badannya (D/S)	73%	74%	150	77%	200	79%	200	82%	250	85%	300	1.100	Dinas Kesehatan
		Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan sederajat	87%	87%	100	90%	150	95%	200	100%	250	100%	300	1.000	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan desa yang melaksanakan STBM	18%	84%	120	87%	150	89%	180	92%	220	95%	250	920	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Cakupan desa/kelurahan	100%	100%	150	100%	175	100%	200	100%	225	100%	250	1.000	Dinas Kesehatan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
	Menular	mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam													
		Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	15%	15%	50	20%	100	25%	150	30%	200	35%	250	750	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	6,5%	6,5%	150	7%	175	10%	200	15%	225	20%	300	1.000	Dinas Kesehatan
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang terakreditasi	0	5	1.500	9	1.600	16	1.800	20	1.800	20	1.800	8.500	Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	Puskesmas dan jaringannya memenuhi persyaratan standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan	100%	30%	31.000	30%	33.000	30%	37.000	30%	40.000	30%	45.000	186.000	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase cakupan pelayanan anak balita	64%	64%	100	70%	150	75%	200	80%	250	85%	300	1.000	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	13%	135%	100	20%	150	25%	200	35%	250	40%	300	1.00	Dinas Kesehatan
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	15%	16%	50	20%	150	26%	175	32%	200	38%	225	800	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	98%	98%	200	91%	300	93%	350	95%	400	96%	450	1.700	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan nifas	92%	92%	200	94%	300	95%	350	97%	400	99%	450	1.700	Dinas Kesehatan
		Persentase cakupan kunjungan neonatal pertama (KNI)	95%	95%	100	97%	150	98%	200	100%	250	100%	300	1.000	Dinas Kesehatan
	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	11%	11%	120	20%	150	30%	180	40%	220	50%	250	920	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes	15%	15%	120	20%	150	25%	180	30%	220	40%	250	920	Dinas Kesehatan

*Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan*

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
		melitus													
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat	19%	19%	150	24%	175	29%	200	35%	225	40%	250	1.000	Dinas Kesehatan
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase penduduk yang menjadi peserta PBI melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	68,5%	52%	25.000	60%	29.000	70%	34.000	80%	38.000	90%	42.000	168.000	Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata	Kemampuan melayani life saving anak dan Dewasa	100	100%	4.502	100%	6.235	100%	16.578	100%	19.024	100%	23.375	100%	RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
		Jam buka pelayanan GD (kab/Kota)	24 jam	24 jam	2.502	24 jam	3.256	24 jam	13.003	24 jam	14.734	24 jam	17.227	24 jam	RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
	Program Revitalisasi Rumah Sakit	Pemberi pelayanan GD yang bersertifikat masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	68,5%	73,8%	135	79%	161	84,3%	193	89,5%	232	94,8%	279	100%	RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
		Waktu tanggap pelayanan dokter di GD	2,7 menit	2,7 menit	231	2,7 menit	255	2,5 menit	307	2,5 menit	368	2 menit	442	2 menit	RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
		Kepuasan pelanggan pada gawat darurat	72,7%	76,4%	674	80,1%	2.028	83,9%	2.440	87,6%	2.931	91,3%	3.517	95%	RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata	Kematian pasien 24 jam di Gawat Darurat	0,99%	0,83%	2.502	0,66%	3.256	0,50%	13.003	0,33%	14.734	0,17%	17.227	0,002%	RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
		Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	671	100%	3.976	100%	4.771	100%	5.725	100%	6.871	100%	RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Dokter pemberi pelayanan di poleknik spesialis	100%	100%	600	100%	720	100%	864	100%	1.036	100%	1.244	100%	RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
		Ketersediaan pelayanan rawat	100%	100%	520	100%	1.833	100%	2.200	100%	2.640	100%	3.168	100%	RSUD H. A. Sulthan Dg.

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
		jalan													Radja
		Waktu tunggu di rawat jalan	<38,2 menit	36,8 menit	3.821	35,4 menit	5.173	34 menit	6.166	32,6 menit	7.367	31,2 menit	8.826	30 menit	RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
		Kepuasan pelanggan pada rawat jalan	74,3%	78,6%	1.098	82,9%	2.524	87,1%	2.994	91,4%	3.563	95,7%	4.261	100%	RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata	Pemberi pelayanan rawat inap	100%	100%	419	100%	1.539	100%	1.787	100%	1.919	100%	2.233	100%	RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
		Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100%	419	100%	1.539	100%	1.787	100%	1.919	100%	2.233	100%	RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
		Ketersediaan pelayanan rawat inap	100%	100%	6.617	100%	8.593	100%	18.602	100%	21.000	100%	24.846	100%	RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
		Kematian pasien >48 jam	0,9%	0,24%	2.328	0,24%	2.901	0,24%	12.572	0,24%	14.214	0,24%	16.602	0,24%	RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
		Kejadian pulang paksa	7,6%	5,0%	5.494	5,0%	5.957	5,0%	16.240	5,0%	18.615	5,0%	21.884	5,0%	RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
		Kepuasan pelanggan rawat inap	76,2%	79,3%	1.098	82,5%	2.524	85,6%	2.994	88,7%	3.563	91,9%	4.261	95,0%	RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
		Waktu tunggu operasi elektif	19 jam	19 jam	4.172	19 jam	3.823	19 jam	13.684	19 jam	15.551	19 jam	18.207	19 jam	RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
		Kejadian kematian ibu karena persalinan	0,0%	0%	2.023	0,0%	5.530	0,0%	15.727	0,0%	18.000	0,0%	21.146	0,0%	RSUD H. A. Sulthan Dg.

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
															Radja
		Pemberi pelayanan persalinan normal	Tersedia	Tersedia	5.955	Tersedia	3.030	Tersedia	2.636	Tersedia	4.364	Tersedia	5.236	Tersedia	RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
		Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tersedia	Tersedia	119	Tersedia	6.061	Tersedia	7.273	Tersedia	8.728	Tersedia	10.473	Tersedia	RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
		Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	Tersedia	Tersedia	119	Tersedia	6.061	Tersedia	7.273	Tersedia	8.728	Tersedia	10.473	Tersedia	RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
		Kepuasan pelanggan	75,3%	77,8%	2.138	80,2%	3.131	82,7%	3.758	85,1%	4.509	87,6%	5.411	90,0%	RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
	Revitalisasi Rumah Sakit dan Puskesmas	Pemberi pelayanan unit intensif	100%	100%	368	100%	406	100%	488	100%	585	100%	702	100%	RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
		Baku mutu limbah cair			2.241		3.287		3.945		4.734		5.681		RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
		BOD	30,5 mg/l	30 mg/l		30 mg/l									
		COD	64 mg/l	60 mg/l		60 mg/l									
		TSS	8 mg/l	8 mg/l		8 mg/l									
		PH	7,8	7		7		7		6		6		6	
		Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan	0	100%	296	100%	369	100%	443	100%	531	100%	638	100%	RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
		Persentase anggota Tim PPI terlatih	6,33%	20,3%	111	34,2%	55	48,25	66	62,1%	79	76,1%	95	90%	RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja
		Persentase koordinasi APD	37,5%	50%	2.135	60%	2.689	70%	12.318	75%	13.909	90%	16.236	80%	RSUD H. A. Sulthan Dg.

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)	Target Kinerja	Rp (Juta)								
															Radja
III	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														
	Program Pembangunan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	55.30 % 574.630 Km	64,24 % 667.540 Km	102.465	73,18 % 760.450 Km	257.348	82,12 % 853.360 Km	406.376	91.06 % 946.270 Km	357.764	100.00 % 1030.170 Km	157.820	1.281.774	Dinas Bina Marga
	Program Pembangunan Jembatan	Persentase jembatan dalam kondisi baik	82% 331 Unit	85 % 346 Unit	9.775	89 % 361 Unit	10.595	93 % 376 Unit	18.700	96 % 391 Unit	24.480	100 % 406 Unit	20.550	84.460	Dinas Bina Marga
	Program Database Jalan dan Jembatan	Rasio Panjang Jajan perjumlah Kendaraan	0,174 5975 Unit	0,163 6375 Unit	16.390	0,153 6675 Unit	16.390	0,145 % 7175 Unit	3.000	0,137 7575 Unit	20.000	0,130 7975 Unit	1.000	40.390	Dinas Bina Marga
	Proram Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Jumlah alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	16	5	135	3	140	8	150	6	200	5	250	16	Dinas Bina Marga
	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Meningkatnya rehabilitasi dan pemeliharaan jalan	21,47	21,47	16.390	-	-	3	3.000	20	20.000	10	10.000	24.000	Dinas Bina Marga
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase luas jaringan irigasi yang terpelihara dan direhabilitasi	4 Lokasi	1 Lokasi	100.000	1 Lokasi	100.000	1 Lokasi	100.000	1 Lokasi	0	1 Lokasi	100.000	4Lokasi	Dinas PSDA
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Pembangunan Sumur-sumur Air	35 Lokasi	10 Lokasi	1.500.000	10 Lokasi	1.500.000	50 lokasi	Dinas PSDA						
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air	11 Lokasi	5 Lokasi	1.000.000	5 Lokasi	1.000.000	25 Lokasi	Dinas PSDA						
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Pembangunan Saluran Pembawa	4 Lokasi	2 Lokaisi	400.000	2 Lokaisi	400.000	10 Lokai	Dinas PSDA						
	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danaudan Sumber Daya Air Lainnya	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	5 Lokasi	5 Lokasi	500	5 Lokasi	750	5 Lokasi	750	5 Lokasi	750	25 Lokasi	3500	25 lokasi	Dinas PSDA
	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danaudan Sumber Daya Air Lainnya	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	4 lokasi	4 lokasi	400	5 lokasi	500	5 lokasi	500	5 lokasi	500	24 lokasi	2400	25 lokasi	Dinas PSDA
	Program Pengendalian Banjir	Pembangunan Pengendali Banjir	2 lokasi	2 lokasi	400	2 lokasi	400	4 lokasi	800	4 lokasi	800	6 lokasi	1200	3.600	Dinas PSDA

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
	Program Pengendalian Banjir	Pembangunan Saluran Pembawa	4 Lokasi	2 Lokaisi	400.000	2.000.000	Dinas PSDA								
	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Ketersediaan Air untuk Lahan pertanian Masyarakat	2 Lokasi	2 lokasi	400	3 lokasi	600	4 lokasi	800	5 lokasi	1000	16 lokasi	3200	6.000	Dinas PSDA
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	DED Normalisasi Saluran Sungai	10 dokumen	10 dokumen	500	50 dokumen	2500	4.500	Dinas PSDA						
		Normalisasi Saluran Sungai	15 Lokasi	15 Lokasi	3000	75 lokasi	15.000	16.200	Dinas PSDA						
	Program Perencanaan Tata Ruang	Dokumen penyusunan dan penetapan TDTR yang harus ada	0	2	1.100	5	3.000	5	3.500					7.500	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
		Jumlah perda tentang tata ruang	2	8	344	2	75	5	200	5	225			225	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
		Jumlah dokumen rencana investasi jangka menengah bidang keciptakaryaan	1	1	91	1	100	1	110	1	120	1	125	125	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio Rumah yang ber IMB	14,08	16,18%	737	18,52%	927	20,94	1.000	23,51%	1.025	26,16%	1.425	1.425	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
	Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rasio RTH per satuan luas wilayah perkotaan	4%	7%	2.500	11,2%	5.000	15%	7.500	20%	10.000	25%	12.500	12.500	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	72,149	72,99	8000	81,99	10000	91	10000	100	10000	100	3000	100	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
		Persentase rumah tangga bersanitasi	73,45%	74,9%	3.000	82,7%	10.000	91,35%	10.000	100%	10.000	100%	3.000	3.000	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	15.424 m	2.963 m	2.895	3.337 m	2.000	3.837,55 m	2.000	4.413 m	4.400	5.075 m	5.000	19.616 m	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
		Panjang drainase dalam kondisi baik	23.297 m	12.000 m	6.012	13.680 m	6.000	15.594 m	7.000	17.933 m	17.000	20.623	20.000	79.710 m	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
		Panjang jalan trotoar dalam kondisi baik	12.067 m	6.012 m	6.000	4.880 m	4.000	24.400 m	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya						
IV	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman														

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
	Program Pengembangan Perumahan	Rasio rumah layak Huni	89.419	89.56	1000	89.84	2000	90.26	3000	906.798	3000	91.24	4000	913801	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
		Persentase kawasan kumuh	0.18	0.17	4000	0.15	8000	0.13	10000	0.10	10000	0.08	10000	0.06	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Penangan Sampah	57.83	71.88	3700	85.81	4000	99.57	5000	100	6000	100	2000	100	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
		Persentase pelayanan TPA	90%	90%	1.100	90%	1.200	90%	1.500	90%	1.500	90%	1.500	1.500	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
V	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat														
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan tanggap darurat bencana	2	7	60	7	60	7	60	8	60	8	60	10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	342	100	342	100	266	100	293	100	322	354	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	58,6	60	2.276	70	2.504	75	2.755	80	3.030	90	2.333	2.333	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pendidikan Politik	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	5	5	100	5	100	5	100	5	100	5	100	500	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Linmas
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	Persentase terciptanya suasana kondusif dalam masyarakat	100	100	490	100	490	100	490	100	490	100	490	2.450	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Linmas
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terpeliharanya 4 pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	5 kali	5 kali	120	600	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Linmas								
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga	Persentase kesadaran	100%	100%	240	100%	240	100%	240	100%	240	100%	240	1.200	Badan Kesatuan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
	Keamanan dan Ketertiban	masyarakat dalam bela negara													Bangsa, Politik, dan Linmas
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	Perda Dan Perbup Yang diawasi/di Pantau	11	12	2.134	13	2.387	14	2.387	15	2.387	16	2.387	11.682	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terciptanya kantrantibmas pada pelaksanaan sistem demokrasi	100%	100%	55	100%	65	100%	75	100%	78	100%	80	353	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra	Jumlah pemuka agama/ lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan/fasilitas	385	385	679	484	781	484	859	484	945	484	1.039	4.304	Sekretariat Daerah
		Jumlah sarana dan prasarana ibadah yang mendapatkan bantuan	70	71	300	72	300	73	300	74	300	75	300	1.500	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya upaya penciptaan suasana kondusif melalui koordinasi Muspida	250	25	120	25	120	25	120	25	120	25	120	250	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Linmas
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kerukunan umat beragama	600	120	100	120	100	120	100	120	100	120	100	600	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Linmas
	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Desk Pemilu	1	0	0	0	0	0	0	1	150	1	150	2	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Linmas
VI	Sosial														
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah sarana sosial yang direhabilitasi	18	18	46	19	70	20	85	21	100	22	120	421	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS Lainnya	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh	5,83	5,83	264	6,20	283	6,61	303	7,07	323	7,61	335	1.508	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
		bantuan sosial													
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Jumlah orang penerima bantuan jaminan sosial dan UEP kepada penyandang disabilitas	5	5	65	10	90	15	120	20	150	25	180	75	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah orang peserta bimbingan sosial pencegahan peredaran narkoba dan HIV/AIDS	100	100	36	120	38	140	40	160	42	180	44	700	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
	Program Pembinaan Anak Terlantar	Meningkatnya pembinaan dan penanganan anak terlantar	18	18	120	18	140	18	160	18	180	18	200	180	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo	Jumlah panti asuhan yang dibina	20	30	46	40	70	50	85	60	100	70	120	421	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah bantuan UEP untuk pengembangan karang taruna, kemah bakti, dan PSM	2	2	115	4	135	6	160	8	185	10	210	30	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
	Non Pelayanan Dasar														
I	Tenaga Kerja														
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Angka partisipasi angkatan kerja	90	90	363	95	380	95,50	400	96	420	96,50	440	2.003	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Angka pengangguran terbuka	1,35	1,35	288	1,17	312	1,03	337	0,89	362	0,73	387	1.686	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	1	1	193	2	215	2	240	2	265	2	305	1.218	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
II	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
	Program Penguatan	Advokasi dan	5	-	-	1	35	1	40	1	45	1	50	10	Badan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
	Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Fasilitasi PUG bagi Perempuan													Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan	500	200	20	190	45	180	45	170	45	100	45	1500	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pelatihan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	5	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	5	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba PMS terhadap HIV/AIDS	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba PMS terhadap HIV/AIDS	5	1	75	1	75	1	75	1	75	1	75	10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Forum Anak yang terbentuk di Tingkat Kecamatan	0	2	55	2	290	2	325	2	360	2	385	10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
		Cakupan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam Unit Pelayanan terpadu P2TP2A	208	200	110	190	455	180	545	170	535	160	570	150	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender atau Anak	Jumlah Regulasi terkait PUG dan Perindungan Anak	1	-	-	1	85	1	90	1	95	1	85	1	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan Jumlah Kelompok UPPKS yang terbentuk dan terbina di Tingkat Kecamatan	22 klp	2	80	2	210	2	227	2	247	2	270	32	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Jumlah Kelompok PK Remaja yang terbina dan terbentuk disekolah (SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi)	35	5	20	5	270	5	275	5	290	5	290	80	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
III	Ketahanan Pangan														
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	5	6	150	7	150	8	150	9	150	10	150	10	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		Penanganan daerah rawan pangan	0	4	100	8	100	12	100	16	100	20	100	20	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		Jumlah desa mandiri pangan yang dibina	5	10	35	20	50	20	75	25	75	30	75	30	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		Replikasi pengembangan desa mandiri pangan	1	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		Pendampingan dan pembinaan desa mandiri pangan dan desa replikasi	1	0	0	1	40	0	0	0	0	1	40	1	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		Penyusunan neraca bahan makanan (food balance sheet) NBM	5	1	35	1	37	1	40	1	43	1	46	5	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		Penyusunan peta kerentanan pangan dan kerawanan pangan food security and furnability Atias (FSVA)	10	15	125	20	150	25	275	30	300	35	330	35	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		Penyusunan/sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)	44	25	112	50	225	150	750	200	1000	250	1375	250	Badan Ketahanan Pangan dan PP

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pengadaan bangunan lumbung pangan	10	15	25	20	30	30	50	50	75	50	80	50	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		Pengadaan cadangan pangan masyarakat (CPM)	10	30	250	60	275	90	300	120	325	150	350	150	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		Pendampingan/pe mbinaan kelompok lumbung pangan	5	10	2500	10	2500	10	2500	10	2500	10	2500	50	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah	0	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	5	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (PLDPM)	1	1	75	1	75	1	90	1	90	1	100	5	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		Pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM)/ Toko tani indonesia	31	15	750	20	1000	15	750	20	1000	20	1000	20	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		Pemantauan dan distribusi harga bahan pangan pokok	51	46	75	66	100	81	75	101	100	121	100	121	Badan Ketahanan Pangan dan PP
	Program Pengembangan Ketahanan Pangan	Pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL)	31	46	75	66	100	81	100	101	100	101	100	101	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		Promosi percepatan penganekaragaman dan konsumsi pangan (P2KP)	1	1	25	1	35	1	40	1	45	1	50	5	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		Cakupan pembinaan kelompok wanita tani	51	15	225	20	200	15	225	20	300	20	300	90	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		Lomba cipta menu (LCM) tingkat kabupaten, provinsi dan nasional	0	2	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2	2000	10	Badan Ketahanan Pangan dan PP
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Sosialisasi dan promosi percepatan penganekaragaman dan konsumsi pangan (P2KP)	100	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	Badan Ketahanan Pangan dan PP

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
		untuk SD/MI,SMP/MTS/S M/MAN/Pesantren													
		Model Pengembangan Pangan Lokal (MP3L)	3	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	5	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	50	24	100	24	100	24	100	24	100	24	100	120	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		Penyusunan /Analisis Pola Pangan Harapan (PPH)	39	12	100	12	120	12	140	12	150	12	160	60	Badan Ketahanan Pangan dan PP
	Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian Perkebunan Lapangan	Jumlah Data dan Informasi Pemberdayaan Penyuluh Pertanian melalui Pendidikan dan Pelatihan	10	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		Penyediaan Data dan Informasi mengenai Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluh Pertanian Swadaya	14	25	100	25	100	25	100	25	100	36	120	136	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		Penyediaan Data dan Informasi mengenai Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan	0	0	0	1	120	1	120	0	0	0	0	2	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		Penyediaan Data dan Informasi mengenai Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian (Posluhdes)	1		150	1	150	1	150	1	150	1	150	5	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		Jumlah Produk Hukum tentang Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan Petani	1	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	5	Badan Ketahanan Pangan dan PP

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
		(Posuhdes)													
		Tersusunnya Program Penyuluhan Tingkat Kabupaten	112	112	4480	112	4480	112	4480	96	3840	96	3840	96	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		Adanya Penyuluh Berprestasi	136	136	100	136	100	136	100	136	100	136	100	136	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		Jumlah Penyuluh Penerima Biaya Operasional Penyuluh	112	112	448	112	448	112	448	96	3840	96	3840	3840	Badan Ketahanan Pangan dan PP
	Program Peningkatan Program Kerja Penyuluh Pertanian	Tersusunnya Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Desa (RDKK)	831	731	100	631	100	531	100	431	100	273	100	115	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		Jumlah Kelompok Tani yang Naik Kelas :	894	892	100	890	100	887	100	885	100	882	100	879	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		- Klp Tani Pemula	320	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	100	Badan Ketahanan Pangan dan PP
		- Klp Tani Lanjut	14	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	10	Badan Ketahanan Pangan dan PP
IV	Pertanahan														
	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase penyelesaian sengketa tanah aset pemerintah daerah	100%	100%	142	100%	148	100%	152	100%	159	100%	167	770	Sekretariat Daerah
	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan,, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tersedianya lokasi pembangunan untuk kepentingan umum	100%	100%	1.629	100%	1.792	100%	1.972	100%	2.169	100%	2.386	9.949	Sekretariat Daerah
	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Tersedianya sistem pendaftaran tanah	100%	100%	100	100%	107	100%	124	100%	143	100%	152	628	Sekretariat Daerah
V	Lingkungan Hidup														
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah produksi sampah TPST minimal 0,5 ton/hari	20%	20%	100	50%	150	75%	200	100%	200	100%	200	850	Badan Lingkungan Hidup Daerah

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Optimalisasi Perbaikan Kriteria Penilaian Adipura Untuk Titik Pantau serta Penambahan Titik Wilayah Pantau	80%	80%	100	100%	120	100%	140	100%	160	100%	180	700	Badan Lingkungan Hidup Daerah
		Persentase informasi kerusakan tanah untuk produksi biomassa baik potensi rusak IV, III, II, dan I	40%	40%	100	60%	200	80%	200	100%	200	100%	200	900	Badan Lingkungan Hidup Daerah
		Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya, dan diinformasikan status mutu airnya	90%	90%	100	95%	150	100%	200	100%	250	100%	300	1.000	Badan Lingkungan Hidup Daerah
		Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya, dan diinformasikan status mutu airnya	20%	20%	100	50%	150	75%	200	85%	200	100%	200	850	Badan Lingkungan Hidup Daerah
		Persentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	20%	30%	50	50%	85	75%	125	85%	140	100%	170	570	Badan Lingkungan Hidup Daerah
	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Jumlah Produksi Sampah TPST Minimal 0,5 Ton/hari	20%	20%	100	50%	150	75%	200	100%	200	100%	200	850	Badan Lingkungan Hidup Daerah
		Jumlah Warga Sekolah ,Pemukiman yang diberikan Bintek	20%	30%	50	50%	50	75%	50	100%	50	100%	50	250	Badan Lingkungan Hidup Daerah

*Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan*

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
		Pengolahan Sampah													
		Tersedianya 7 SDM Pengelola Sampah TPST yang terampil	20%	40%	30	100%	40	-	-	-	-	-	-	70	Badan Lingkungan Hidup Daerah
	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Air Sungai sebanyak 11 Sungai	90%	90%	100	95%	150	100%	200	100%	250	100%	300	1.000	Badan Lingkungan Hidup Daerah
		Penataan Seluruh Usaha /Kegiatan Terhadap Dokumen LH yang dimiliki	30%	30%	100	50%	150	100%	200	100%	200	100%	200	850	Badan Lingkungan Hidup Daerah
		Tersedianya Informasi Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa	40%	40%	100	60%	200	80%	200	100%	200	100%	200	900	Badan Lingkungan Hidup Daerah
		Tersedianya produk hukum berupa 5 PERDA/Perbup Terkait Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	20%	20%	200	40%	200	60%	200	80%	200	100%	300	1.100	Badan Lingkungan Hidup Daerah
		Terlaksananya Proses Penilaian AMDAL oleh Komisi Penilai AMDAL	20%	20%	100	40%	100	60%	150	80%	150	100%	200	700	Badan Lingkungan Hidup Daerah
	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rehabilitasi Sumber Mata Air (5 Mata Air), Rehabilitasi Sempadan Sungai (5 Sungai)	20%	20%	200	40%	200	60%	200	80%	200	100%	300	1.100	Badan Lingkungan Hidup Daerah
		Terbentuknya 5 Kelompok Masyarakat Pengelola Kampung Iklim	0%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	500	Badan Lingkungan Hidup Daerah
	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Rehabilitasi pada 5 Kawasan Pesisir Pantai dengan Penanaman Mangrove dan 1 Lokasi Pembuatan	20%	20%	100	40%	150	60%	200	80%	200	100	200	850	Badan Lingkungan Hidup Daerah

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
		Rumah Ikan / Transplantasi Karang													
		Data Potensi Kerusakan 10 Kecamatan Peningkatan Pemahaman Kecamatan Tentang Upaya Pengendalian Kerusakan	0%	100%	200	100%	200	100%	200	100%	200	100%	200	1.000	Badan Lingkungan Hidup Daerah
		Tersedianya Taman Kehati	20%	20%	100	40%	150	60%	200	80%	200	100%	200	850	Badan Lingkungan Hidup Daerah
		Tersedianya TAHURA	20%	20%	100	40%	150	60%	200	80%	200	100%	200	850	Badan Lingkungan Hidup Daerah
	Program peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup	Pembinaan 15 Sekolah Adiwiyata Mandiri, 25 Nasional, 50 Adiwiyata Propinsi dan 200 Adiwiyata Kabupaten	20%	20%	100	40%	150	60%	200	80%	200	100%	200	850	Badan Lingkungan Hidup Daerah
		Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah Setiap Tahun	30%	30%	50	50%	50	70%	70	80%	70	100%	100	340	Badan Lingkungan Hidup Daerah
	Peningkatan Pengendalian Polusi	Pengujian seluruh kendaraan dinas pemda bulukumba dan angkutan umum	20%	50%	50	60%	50	70%	70	80%	70	100%	100	340	Badan Lingkungan Hidup Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup	Tersedianya sarana dan prasarana lingkungan hidup	20%	40%	1.829	50%	3.500	60%	4.000	70%	4.500	80%	5.000	18.829	Badan Lingkungan Hidup Daerah
VI	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan kartu keluarga (KK)	96.68	95	24	95	24	95	24	95	24	95	24	120	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan penerbitan KTP-el	68.89	50	322	60	322	65	322	65	322	70	322	1.610	Dinas Kependudukan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
															n dan Pencatatan Sipil
		Cakupan penerbitan akta kematian.	0.18	0.18	28	0.18	35	0.18	35	0.18	35	0.18	35	168	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	199.35	200	102	200	105	210	105	210	105	210	105	522	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rasio bayi berakta Kelahiran	0.06	0.06	102	0.06	105	0.06	105	0.06	105	0.06	105	522	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah buku argerat kependudukan yang terbitkan per tahun	2	2	37	2	37	2	40	2	40	2	40	184	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah penduduk yang mengikuti sosialisasi kebijakan penduduk	185	185	40	200	50	200	50	220	50	250	50	1055	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
VII	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparat Desa dan BPD yang mengikuti Pelatihan/Bintek	327 org	196 org	142	196 org	175	196 org	172	196 org	190	197 org	200	879	BPMPD
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah desa yang membentuk BUMDES	60	70	39	80	50	90	60	100	70	109	80	299	BPMPD
		Jumlah pengurus BUMDES yang mengikuti pelatihan kewirausahaan BUMDES	0	-	-	30 org	370	30 org	370	30 org	370	10 org	350	1.460	BPMPD
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah kecamatan yang membentuk posyantek/ Wartek	0	-	-	3 kecamatan	90	360	BPMPD						
		Jumlah kepala desa	76 Desa	33 Desa	513	-	-	14 Desa	564	-	-	65 Desa	1.539	2.616	BPMPD

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
		terpilih melalui kegiatan pemilihan kepala desa													
		Jumlah perbub/perda yang disusun	2 perda	4 perda/ perbub	87	8 perda/ perbub	162	7 perda/ perbub	179	6 perda/ perbub	197	4 perda/ perbub	197	822	BPMPD
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah desa yang menyusun profil desa/kelurahan	64 desa	64 desa	88	109 desa	150	109 desa	180	109 desa	210	109 desa	250	878	BPMPD
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Jumlah PKK aktif	136 Klpk	136 Klpk	30	136 Klpk	40	136 Klpk	50	136 Klpk	60	136 Klpk	70	250	BPMPD
		Jumlah posyandu aktif	544 Klpk	544 Klpk	30	545 klpk	40	546 klpk	50	547 klpk	60	548 klpk	70	250	BPMPD
		Jumlah pengurus BPS-PAMS yang mengikuti pelatihan produktifitas bagi BPS-PAMS	0	-	-	20 BPS-PAMS	40	19 BPS-PAMS	45	19 BPS-PAMS	50	19 BPS-PAMS	55	190	BPMPD
VIII	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
	Program Keluarga Berencana	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi	74,52	74,54	620	74,55	1.300	74,57	1.425	74,60	1.500	74,62	1.595	6.440	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif.dengan menggunakan MKJP (Metode Kontraseps ijangka Panjang)	10,25	12,5	400	12,5	495	15	605	16,5	640	18,5	715	2.855	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
		Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	1	100	135	100	150	100	175	100	175	100	195	830	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok atau Keluarga	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok atau Keluarga	1	1	25	2	50	2	50	2	50	2	50	225	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu	Pelatihan Tenaga Pendamping Model Operasional BKB	4	-	-	1	25	1	25	1	25	1	25	75	Badan Pemberdayaan Perempuan

*Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan*

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
		Posyandu Padu													dan Keluarga Berencana
	Program Kelembagaan dan Jaringan KB	Orientasi TNI Manunggal KB Kes	-	-	-	1	50	1	50	1	50	1	50	150	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Program Keluarga Berencana	Pelayanan KB melalui Kegiatan TNI melalui KB Kes ,Bulan Bakti Bayangkara,dan Pelayanan Kegiatan Kesatuan Gerak PKK	100%	100%	135	100%	150	100%	175	100%	175	100%	195	660	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Pembentukan Pelatihan dan Pembinaan Kelompok	100%	100%	25	100%	35	100%	400	100%	45	100%	55	560	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Terlaksananya orientasi pengelolaan KIE KRR	100%	100%	200	100%	250	100%	275	100%	300	100%	350	1.225	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Terlaksananya orientasi PIK KRR	100%	100%	25	100%	35	100%	40	100%	45	100%	35	180	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
IX	Perhubungan														
	Program Peningkatan Pelabuhan Rakyat	Jumlah pelabuhan rakyat yang direhabilitasi.	1	1	500	3	1.600	3	1.600	3	1.600	3	1.600	3	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dan Komunikasi dan Informasi	Jumlah terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	1	1	500	2	1.000	2	1.500	2	1.750	2	2.000	2	Dinas Perhubungan
	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah bandar udara perintis	1	1	750	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	2.000	1	Dinas Perhubungan
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase pembangunan prasarana dan fasilitas	100%	37%	387	100%	9.377	100%	9.208	100%	11.329	100%	7.508	32.992	Dinas Perhubungan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
		perhubungan													
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	100%	50%	20	100%	3.265	100%	2.680	100%	2.130	100%	2.045	10.141	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase peningkatan pelayanan angkutan	99%	46%	458	100%	664	100%	676	100%	676	100%	681	3.157	Dinas Perhubungan
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase pengendalian dan pengamanan lalu lintas	100%	80%	889	100%	3.979	100%	31.197	100%	27.247	100%	33.235	86.548	Dinas Perhubungan
	Program Transportasi Perkeretaapian	Terwujudnya perencanaan pembangunan rel kereta api.	1 paket			1	1.000	1	2.000					3.000	Dinas Perhubungan
X	Komunikasi dan Informatika														
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Jumlah penyiaran TV/Radio lokal	11	11	50	11	50	11	50	11	50	11	50	11	Dinas Perhubungan
XI	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah														
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Anggota Koperasi	37.27 %	37.35 %	219	37.44 %	294	37.52 %	333	37.60 %	333	37.69 %	333	1.512	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Intamben
	Program Penciptaan Iklim UKM yang kondusif	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang dibina	300	340	1.067	380	3.067	420	2.892	460	2.892	500	1.892	11.810	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Intamben
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Jumlah UMKM aktif non BPR/LKM	10.215	10.750	146	11.000	288	11.075	368	11.150	368	11.200	418	1.588	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Intamben
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Jumlah usahawan yang dibina	344	304	120	424	226	404	228	504	228	504	228	1.030	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Intamben
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	0	1	1.067	1	3.125	1	1.675	1	1.675	1	1.675	9.217	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Intamben

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	0	10	383	10	483	10	483	10	483	10	483	2.315	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Intamben
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	325	30	55	40	55	80	175	80	175	8140	225	685	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Intamben
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Penyelenggaraan Promosi Produksi Usaha Mikro Kecil Menengah	100%	100%	126	100%	226	100%	228	100%	228	100%	228	1.036	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Intamben
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi berprestasi	40	40	219	60	294	80	333	100	333	100	333	1.512	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Intamben
	Program Pembinaan Pedagang kakilima dan asongan	Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	100%	100%	75	100%	175	100%	175	100%	175	100%	175	775	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Intamben
XII	Penanaman Modal														
	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah perizinan yang diterbitkan tepat waktu	400	1.197	450	1.095	450	1.629	450	1.436	450	1.314	450	6.671	Badan Penanaman Modal dan Perizinan
		Jumlah produk hukum daerah terkait perizinan.	2	2	150	2	150	2	150	2	150	2	150	11	Badan Penanaman Modal dan Perizinan
		Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	1	1	450	1	450	1	450	1	450	1	450	5	Badan Penanaman Modal dan Perizinan
	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Nilai Investasi PMDN (RP)	50.000.000.000	50.000.000.000	450	50.000.000.000	450	50.000.000.000	450	20.000.000.000	450	20.000.000.000	450	160.000.000.000	Badan Penanaman Modal dan Perizinan
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Investasi PMA (Dollar)	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	100	\$ 2.000.000	100	\$ 2.000.000	100	\$ 200.000	100	\$ 200.000	100	\$ 6.400.000	Badan Penanaman Modal dan Perizinan
		Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi	2	3	350	3	350	3	350	3	350	3	350	15	Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)	Target Kinerja	Rp (Juta)	Target Kinerja	Rp (Juta)	Target Kinerja	Rp (Juta)	Target Kinerja	Rp (Juta)		
XIII	Kepemudaan dan Olahraga														
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda	42	43	1.100	44	1.200	45	1.300	46	1.400	47	1.500	1.500	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
		Lomba Karya Ilmiah Remaja	3	3	1.100	5	1.200	5	1.300	5	1.400	10	1.500	1.500	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga	21	24	1.350	27	1.460	30	1.500	33	1.550	36	1.600	1.600	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
		Jumlah sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan	57	57	1.350	60	1.350	62	2.660	66	2.800	69	2.950	10.510	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
XIV	Statistik														
	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah buku profil daerah yang diterbitkan.	1 Dokumen	1 Dokumen	78	1 Dokumen	86	1 Dokumen	94	1 Dokumen	104	1 Dokumen	114	605	Bappeda
	Program Pengembangan Data dan Informasi/Statistik Daerah	Jumlah buku PDRB yang diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen	21	1 Dokumen	23	1 Dokumen	25	1 Dokumen	28	1 Dokumen	31	164	Bappeda
XV	Kebudayaan														
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah	Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan	20	21	1.100	22	1.300	23	1.500	24	1.650	25	1.800	7.350	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya.	2	2	650	3	750	3	950	4	1.100	4	1.250	4.700	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	4	5	400	6	510	6	550	7	620	7	640	2.720	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
XVI	Perpustakaan														
	Program Peningkatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat.	Jumlah koleksi judul perpustakaan umu daerah	8.762 judul 16.281 eks	9.638 judul 17.250 eks	258	10.514 judul 18.250 eks	273	11.391 judul 19.250 eks	288	12.267 judul 20.250 eks	303	13.143 judul 21.250 eks	318	1.440	BP3K
		Jumlah Koleksi	65.087 judul	71.596 judul	3.686	78.104 judul	3.761	84.613 judul	3.836	91.122 judul	3.911	97.631	3.986	19.180	BP3K

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)	Target Kinerja	Rp (Juta)	Target Kinerja	Rp (Juta)	Target Kinerja	Rp (Juta)	Target Kinerja	Rp (Juta)		
		judul perputakaan milik pemerintah para satuan pendidikan SDMI Negeri	240.791 eks	245.791 eks		250.791 eks		255.791 eks		260.791 eks		judul 265.791 eks			
		Jumlah Koleksi Perpustakaan Desa/ Kelurahan	38.060 judul 71.345 eks	41.866 judul 72.345 Eks	1.085	45.672 judul, 74.345 eks	1.115	49.478 judul 76.345 eks	1.145	53.284 judul 78.345 eks	1.175	57.090 judul 80.345 eks	1.205	5.725	BP3K
		Jumlah perpustakaan yang dibina (Perpustakaan SD/MI, SMP/MTs, Perpustakaan Desa/Kel, Kecamatan, Perpustakaan Khusus	600 buah	660 buah	330	720 buah	360	780 buah	390	840 buah	420	900 buah	450	1.950	BP3 K
		Jumlah bangunan perpustakaan kecamatan	1 unit	1 unit	130	3 buah	390	6 buah	780	8 buah	1.040	10 buah	1.300	3.640	BP3 K
xvii	Kearsipan														
	Program Pemanfaatan Arsip dan Dokumentasi kepada Masyarakat	Penataan Arsip Daerah	1 unit	1 buah	170	1 buah	187	1 buah	205	1 buah	226	1 buah	248	1.036	BP3 K
		Jumlah Box Arsip	155 buah	200 buah	10	250 buah	12	300 buah	15	350 buah	17	400 buah	20	74	BP3 K
		Pengumpul Data Arsip yang bernilai sejarah	32 buah	35 judul	35	38 judul	38	41 judul	41	44 judul	44	47 judul	47	205	BP3 K
		Pengadaan sarana pengolahan dan Penyipanan Data	10 buah	11 buah	33	12 buah	36	13 buah	39	14 buah	42	15 buah	45	195	BP3 K
		Pembangunan Data Base Arsip	-	1 unit	25	1 unit	27	1 unit	30	1 unit	33	1 unit	36	199	BP3 K
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan														
xviii	Kepegawaian														
	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah aparaturn pemerintah daerah yang menyelesaikan jenjang pendidikan formal S1, S2, dan S3	155	31	375	31	375	31	375	31	375	31	375	155	BKDD

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti pendidikan dan struktural dan fungsional	1.063	563	3.158	563	3.158	563	3.158	563	3.158	563	3.158	2.815	BKDD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan	1.000	200	650	200	650	200	650	200	650	200	650	1.000	BKDD
		Jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	1.750	350	1.400	350	1.400	350	1.400	350	1.400	350	1.400	1.750	BKDD
		Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	1.020	204	816	204	816	204	816	204	816	204	816	1.020	BKDD
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Jumlah bangunan gedung diklat	0	3 Paket	3.000	3 Paket	3.000	2 Paket	2.000	2 Paket	2.000	2 Paket	2.000	12	BKDD
		Jumlah prasarana pendukung akses jaringan TIK	0	3 Paket	600	3 Paket	600	2 Paket	300	2 Paket	300	2 Paket	300	12	BKDD
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Jumlah prasarana pendukung Mebeleur gedung diklat	0	3 Paket	600	3 Paket	600	2 Paket	300	2 Paket	300	2 Paket	300	12	BKDD
		Jumlah aparatur yang memperoleh penghargaan	1250	250 Org	250	1250	BKDD								
		Jumlah aparatur yang mendapatkan penjatuhan hukuman disiplin	60	12	75	12	75	12	75	12	75	12	75	60	BKDD
XIX	Perencanaan														
	Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan Revisi RPJPD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.				1 Dokumen	150							150	Bappeda

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
		Dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.	0	1 Dokumen	369									369	Bappeda
		Dokumen perencanaan RRPD yang telah ditetapkan dengan peraturan bupati.	1 Dokumen	1 Dokumen	250	1 Dokumen	275	1 Dokumen	302	332	366	1 Dokumen	402	1.929	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RRPD	199/211	211/211	250	211/211	275	211/211	302	211/211	366	211/211	402	211/211	Bappeda
		Jumlah Dokumen Revisi RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020								1	150			150	Bappeda
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Jumlah RAD -AMPL Kabupaten	18	18	217	18	30	18	33	18	36	10	40	412	Bappeda
		Jumlah Profil Potensi SDA Kabupaten				1	150							150	Bappeda
		Jumlah Dokumen Momenandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Bulukumba		1	30	1	40							70	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen KLHS Revisi RPJPD, RPJMD, dan Revisi RPJMD	1	1	283	1	300			1	300			883	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Masterplan Pengembangan Ekonomi Daerah	1	49										49	Bappeda
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Dokumen Laporan SDGs	1	1	50	1	55	1	60	1	73	1	80	385	
		Dokumen Laporan Kinerja LP2KD	1	2	50	2	55	2	60	2	66	2	73	385	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	1	113	1	125	1	137	1	151	1	166	878	
		Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	174	1	191	1	210	1	231	1	254	1.342	Bappeda

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
		Dokumen Evaluasi RPJMD Kabupaten Bulukumba	1	1	118			1	100					218	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Bappeda Bappeda Daerah Tertinggal	1			20	50	20	55	20	60	20	66	305	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Fasilitasi Program Kab/Kota Sehat		18	123	18	136	18	149	18	164	18	181	955	Bappeda
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pamsimas		18	99	18	109	18	120	18	132	18	146	770	Bappeda
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Pengembangan SDA dan SD Hayati				20	150	20	165	20	181	20	199	915	Bappeda
XX	Keuangan														
	Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	7.278	100%	9.693	100%	10.662	100%	11.728	100%	12.901	52.262	DPKD
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Kabupaten	Jumlah dokumen keuangan yang dilaksanakan evaluasi	3 dokumen	3 dokumen	107	3 dokumen	253	3 dokumen	280	3 dokumen	308	3 dokumen	339	1.287	DPKD
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	1 kali	1 kali	70	1 kali	100	1 kali	110	1 kali	121	1 kali	133	534	DPKD
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	100%	100%	490	100%	990	100%	1.269	100%	1.205	100%	1.051	5.005	DPKD
XXI	Pemerintahan Umum														
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyediaan dokumen LKPJ	100%	100%	106	100%	136	100%	142	100%	160	100%	179	752	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	Persentase penyusunan dokumen LPPD	100%	100%	101	100%	140	100%	149	100%	170	100%	175	736	Sekretariat Daerah

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
		Persentase dialog audiens dengan tokoh masyarakat dan organisasi sosial	100%	100%	320	100%	385	100%	423	100%	423	100%	423	1.975	Sekretariat Daerah
		Persentase pelayanan kunjungan kerja pejabat negara/KL/ lembaga pemerintah non KL	100%	100%	290	100%	290	100%	290	100%	290	100%	290	1.454	Sekretariat Daerah
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	80%	80%	49	80%	53	80%	57	80%	61	80%	65	285	Sekretariat Daerah
		Tertatanya SOTK kelembagaan pemerintah daerah	2 jenis	2 jenis	63	2 jenis	135	2 jenis	145	2 jenis	150	2 jenis	170	663	Sekretariat Daerah
	Program Pembinaan Kecamatan	Terpahaminya PATEN bagi aparaturnya kecamatan	100%	100%	79	100%	80	100%	82	100%	80	100%	80	401	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase tertib penyaluran Raskin tiap desa/kecamatan	100%	100%	83	100%	92	100%	101	100%	111	100%	122	512	Sekretariat Daerah
	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah	Ketersediaan informasi produksi daerah	100%	100%	23	100%	25	100%	27	100%	30	100%	33	141	Sekretariat Daerah
	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Terbentuknya pelayanan pengadaan secara elektronik	100%	100%	219	100%	241	100%	265	100%	292	100%	321	1.340	Sekretariat Daerah
	Program Pembangunan/ Pengembangan Perencanaan Daerah	Jumlah laporan inflasi tingkat kabupaten	4	4	62	4	68	5	75	4	83	4	91	382	Sekretariat Daerah
	Program Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Ketersediaan informasi publik melalui PPID	100%	100%	250	100%	300	100%	350	100%	400	100%	450	1.750	Sekretariat Daerah
	Program Koordinasi Pengembangan Sumberdaya Kehumasan dan Keprotokoleraan	Meningkatnya kualitas pengelolaan acara pemerintahan dan kemasyarakatan	100%	100%	250	100%	300	100%	350	100%	400	100%	450	1.700	Sekretariat Daerah
	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Meningkatnya kerjasama informasi dengan media massa	100%	100%	500	100%	750	100%	1.000	100%	1.500	100%	2.000	5.750	Sekretariat Daerah

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyelesaian Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	100%	167	100%	184	100%	202	100%	223	100%	245	1.022	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Persentase tindak lanjut temuan	85%	85%	126	85%	157	85%	157	85%	157	100%	157	754	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut LHP APIP	80 LHP	45 LHP	126	85 LHP	157	90 LHP	157	85 LHP	157	90 LHP	157	755	Sekretariat Daerah
		Persentase Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah (TP-TGR)	85%	85%	234	85%	257	85%	283	85%	312	85%	343	1.429	Sekretariat Daerah
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan	419	650	92	650	110	650	110	650	110	650	110	3.200	Sekretariat Daerah
	Program Optimalisasi Pemahaman Teknologi Informasi	Jumlah evaluasi terhadap SKPD dalam penerapan SPMnya	2 kali	-	-	-	-	2 kali	55	2 kali	56	2 kali	75	186	Sekretariat Daerah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tersedianya dokumen analisis jabatan SKPD	18 dok	10 dok	55	10 dok	54	5 dok	55	3 dok	60	3 dok	60	284	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Peningkatan Unit Pelayanan Publik dalam Rangka RB	Terwujudnya evaluasi dan pembinaan UPP	1 kali									1 kali	75	75	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan	Persentase penyediaan kebutuhan bahan rumah tangga	100%	100%	1.386	100%	1.525	100%	1.525	100%	1.525	100%	1.525	7.486	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	9 kali	9 kali	5.280	9 kali	5.808	9 kali	6.389	9 kali	7.028	9 kali	7.730	32.235	Sekretariat DPRD
	Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	4 kali	4 kali	2.985	4 kali	3.283	4 kali	3.612	4 kali	3.973	4 kali	4.370	18.223	Sekretariat DPRD
	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Evaluasi Produk Hukum Daerah dan Koordinasi ke Tingkat Pusat dan Provinsi	4 kali	4 kali	3.590	4 kali	3.949	4 kali	4.343	4 kali	4.778	4 kali	5.256	21.916	Sekretariat DPRD

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
	Program dan Pengembangan Pengelolaan Asset Daerah	Pengelolaan Asset SKPD	3 kali	3 kali	89	3 kali	98	3 kali	107	3 kali	118	3 kali	130	542	Sekretariat DPRD
	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama antar daerah	4	4	7000	4	10000	5	12000	6	20000	6	20000	7	Bappeda
	Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase tindak lanjut temuan	60%	60%	75	70%	80	80%	85	85%	90	90%	90	420	Inspektorat
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah dalam Pengawasan SKPD yang dilakukan	WTP	WTP	1.400	WTP	1.400	WTP	1.500	WTP	1.700	WTP	2.000	8.000	Inspektorat
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengawasan Dalam Pengawasan SKPD terhadap pendampingan SKPD pada Evaluasi SAKIP	CC	CC	400	CC	420	B	440	B	470	B	500	2.230	Inspektorat
		Peringkat LPPD Kab.Bulukumba dalam Pengawasan SKPD terhadap Pendampingan SKPD atas Laporan Pertanggungjawabannya Pembangunan Daerah	-	R2	400	R3	420	R3	440	R3	470	R2	500	2.230	Inspektorat
		Tingkat /Level Kabupaten Bulukumba terhadap SPIP dalam pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan	-	L1	400	L3	420	L3	440	L3	470	L3	500	2.230	Inspektorat
		Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dilingkup Pemkab Bulukumba	20 kasus	20	300	20	350	18	400	18	450	15	500	2.000	Inspektorat
	Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosetase penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi instansi	58%	60 %	50	75%	50	75%	50	90%	50	90%	50	250	Inspektorat

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
		pemerintah Kabupaten Bulukumba													
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat /Level Inspektorat terhadap Kapabilitas APIP dalam pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan	Level 2	2	45	2	45	3	45	3	45	3	45	225	Inspektorat
		Jumlah APIP memiliki Sertifikasi Pengawasana	14 orang	5	238	10	298	10	298	10	298	21	348	1.480	Inspektorat
xxii	Penelitian dan Pengembangan														
	Program Kajian Penelitian dan Inovasi Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah kajian penelitian SDA	3 kajian	5 kajian	500	7 kajian	700	10 kajian	1.000	13 kajian	1.300	15 kajian	1.500	5.000	BP3K
		Jumlah kajian penelitian SDM	4 kajian	6 kajian	300	8 kajian	400	10 kajian	500	12 kajian	600	14 kajian	700	2.500	BP3K
		Terwujudnya pelayanan izin penelitian	1 kegiatan	1 kegiatan	60	1 kegiatan	66	1 kegiatan	73	1 kegiatan	80	1 kegiatan	88	367	BP3K
		Jumlah karya inovasi daerah melalui lomba riset	64 naskah	70 naskah	40	76 naskah	50	83 naskah	60	89 naskah	70	95 naskah	80	300	BP3K
		Jumlah jurnal yang diterbitkan	400 exp	420 exp	46	440 exp	51	460 exp	56	480 exp	61	500 exp	68	282	BP3K
	Layanan Urusan Pilihan														
I	Kelautan dan Perikanan														
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Cakupan pembinaan kelompok nelayan	65,62	65,62	240	65,62	250	65,62	250	65,62	250	65,62	250	1.240	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan	164.402	164.402	8.220	172.622	16.750	180.842	16.750	189.062	16.750	197.282	16.750	75.220	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Persentase Cakupan bina kelompok usaha	1,9	2	240	2	250	2	250	2	250	2	250	10	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam	Persentase kelompok masyarakat yang	42	47	95	52	100	57	100	62	100	67	100	67	Dinas Kelautan dan Perikanan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
	Penyalahgunaan Sumberdaya Kelautan	terbentuk													
	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Persentase kelompok pengolah	42	0	0	52	100	57	100	62	100	67	100	67	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Persentase kelompok pemasar	42	47	76	52	100	57	100	62	100	67	100	67	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar	Jumlah produksi perikanan (ton)	164.402	180.845	51	197.288,6	55	213.732	55	230.175	55	246.619	55	271.900	Dinas Kelautan dan Perikanan
II	Pariwisata														
	Program Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah obyek wisata yang dikelola dan dikembangkan	9	10	35.000	10	36.000	11	40.000	12	46.000	13	50.000	207	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	180.741	184.150	3.300	260.000	3.900	300.000	4.500	350.000	5.250	400.000	562.500	400.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah media Promosi pariwisata yang digunakan	7	9	900	9	950	9	1.000	9	1.100	9	1.200	5.150	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah pelatihan SDM Kepariwisataaan	1	1	150	2	350	2	375	3	420	4	425	1.720	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
III	Pertanian														
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rata-rata pendapatan perkapita masyarakat petani.	99.500	1	101.490	1	103.520	1	105.590	1	107.702	1	109.856	109.450	Dinas Pertanian dan TPH
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan terhadap PDRB	45.020	1	45.920	1	46.839	1	47.776	1	48.731	1	49.706	49.522	Dinas Pertanian dan TPH
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan atas dasar harga berlaku (ADHB).	43.757.187.30	1	3.832.331.05	1	3.908.977.67	1	3.987.157.22	1	4.066.900.36	1	4.148.238.37	4.132.906.03	Dinas Pertanian dan TPH
	Program Peningkatan Produksi Pertanian	PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan	2.856.608.02	1	2.913.740.18	1	2.972.014.98	1	3.031.455.28	1	3.092.084.39	1	3.153.925.08	3.142.268.82	Dinas Pertanian dan TPH

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
		perkebunan atas dasar harga konstan (ADHK).													
		Cakupan pembinaan kelompok tani	0,12	0,12	39	0,12	40	0,13	41	0,13	42	0,13	43	205	Dinas Pertanian dan TPH
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah tempat pengolahan padi yang menggunakan teknologi	9	12	5	15	6	18	8	21	9	24	10	38	Dinas Pertanian dan TPH
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian	20%	20%	270	20%	270	20%	270	20%	270	20%	270	1.350	Dinas Pertanian dan TPH
	Program Pengembangan Agribisnis	Meningkatnya pengembangan agribisnis	20%	20%	1.330	20%	2.670	20%	3.145	20%	3.510	20%	3.830	14.485	Dinas Pertanian dan TPH
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Ramah Lingkungan	Meningkatnya hasil produksi yang bermutu dan berkualitas ramah lingkungan	25%	25%	510	20%	510	20%	510	20%	510	20%	500	2.540	Dinas Pertanian dan TPH
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	Tersedianya infrastruktur pertanian mendukung produksi dan produktivitas	20%	20%	1.360	20%	1.360	20%	1.360	20%	1.360	20%	1.360	4.250	Dinas Pertanian dan TPH
	Program Peningkatan Produksi Ternak	Pertumbuhan populasi ternak			2.000		2.200		2.420		2.662		2.928	2.928	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Sapi potong	68.344	71.488		74.919		78.665		82.756		87.308		92.110	
		Kerbau	1.570	1.594		1.618		1.644		1.670		1.698		1.727	
		Kuda	27.246	27.682		28.125		28.603		29.089		29.613		30.146	
		Kambing	32.130	33.576		35.255		37.194		39.426		41.989		44.928	
		Ayam Buras	684.793	732.729		791.347		870.482		966.235		1.091.846		1.255.623	
		Ayam Ras Pedaging	2.040.000	2.244.000		2.468.400		2.715.240		2.986.764		3.285.440		3.613.984	
		Ayam Ras Petelur	257.922	283.714		312.085		343.294		377.623		415.385		456.924	
		Itik	17.483	19.581		22.029		24.893		28.254		32.210		37.042	
		Hasil Kelahiran inseminasi buatan	2.500	2.500	1.000	2.750	1.100	3.000	1.210	3.250	1.331	3.500	1.464	3.500	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Bertambahnya kawasan penyedia	456.924	312.085	137	5	125	5	137	5	151	5	166	5	Dinas Peternakan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
		pakan dan air bagi ternak													dan Kesehatan Hewan
	Peningkatan Sumberdaya Manusia Peternakan	Tertibnya administrasi kepemilikan ternak dimasyarakat	37.042	22.029	650	73.264	650	76.239	715	79.461	786	83.034	865	86.788	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Tertibnya administrasi ternak-ternak bantuan pemerintah	15.000	200	150	120	150	140	165	160	181	180	199	200	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Tertanganinya penyakit ternak	9.400	17.000	250	17.000	350	17.000	365	20.000	423	20.000	465	20.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terkendalinya penularan penyakit endemik	5.000	1.000	225	1.000	225	1.000	247.	1.000	272	1.000	299	1.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Tertanganinya hewan yang mengalami gangguan reproduksi	1.500	250	250	250	250	275	275	300	302	325	332	350	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Peningkatan mutu layanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	Tersedianya sarana dan prasarana Puskeswan	4	0	-	1	250	1	250	1	275	1	302	1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Tersedianya informasi Veteriner	4	0	-	1	25	1	25	1	27	1	30	1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya keamanan dan pengendalian penyakit hewan strategis	5	1	85	1	85	1	93	1	102	1	113	1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Produk Pangan dan Non Pangan Asal Hewan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana RPH	1	0	235	-	-	1	235	1	259	1	285	1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terjaminnya kesejahteraan hewan yang akan dipotong	13.458	2.734	300	2.734	300	2.850	333	2.674	363	2.750	399	2.650	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Terselamatkannya ternak betina yang akan dipotong	180	0	-	0	-	36	280	36	306	36	339	36	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
															Hewan
	Peningkatan Sumberdaya Manusia perikanan	Peningkatan status kelembagaan kelompok menjadi kelompok mandiri	150	20	105	20	105	25	115	30	127	35	139	45	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya kemampuan peternak dalam beternak	165	15	115	15	115	30	126	35	139	40	153	45	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya keahlian dan kemampuan teknis aparat peternakan	105	10	175	10	175	15	192	20	211	25	232	35	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Meningkatnya pertumbuhan usaha-usaha dibidang peternakan	50	10	250	10	250	10	275	10	302	10	332	10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Dikenalnya produk-produk peternakan unggulan daerah	15	3	75	3	75	3	82	3	90	3	99	3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Adopsi teknologi bidang peternakan	50	10	100	10	100	10	110	10	121	10	133	10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya pemanfaatan biogas dan pupuk organik dari limbah peternakan	50	10	150	10	150	10	165	10	181	10	199	10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Persentase pemenuhan ketersediaan pakan ternak	25	5	175	5	175	5	192	5	211	5	232	5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Meningkatnya kualitas olahan produk peternakan	10	2	75	2	75	2	82	2	90	2	90	2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Luas areal komoditi perkebunan	38.237,5		38.537,5		38.787,5		38.987,5		39.137,5		39.237,5		Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan jumlah areal komoditi unggulan perkebunan (ha):													Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		Lada	781	20	240	20	264	20	290	10	159	10	175	80	

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)	Target Kinerja	Rp (Juta)	Target Kinerja	Rp (Juta)	Target Kinerja	Rp (Juta)	Target Kinerja	Rp (Juta)		
		Kakao	8.424	150	1.800	120	1.584	75	990	25	363	0	0	370	
		Kopi	4.665	50	500	25	275	25	302	25	332	10	121	135	
		Kelapa	12.670	0	0	25	137	0	0	50	302	0	0	75	
		Cengkeh	6.183	20	100	25	137	25	151	0	0	20	121	90	
		Jambu mete	1.212	10	50	10	55	15	88	0	0	15	96	50	
		Kapas	700	50	300	25	165	40	280	40	308	45	372	200	
	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Jumlah unit pengolahan pupuk organik	3	1	630	1	645	1	665	1	685	1	705	5	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Mutu Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	Jumlah dan jenis produk olahan komoditi perkebunan	1	3	30	4	42	3	33	3	34	3	36	16	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Luas areal komoditi perkebunan adalah = 38.237,5 Ha. Kondisi produk olahan tahun 2016 adalah 1 produk (coklat) dan untuk penanganan pasca panen/unit pengolahan hasil adalah 7 unit UPH	Luas areal komoditi perkebunan adalah = 38.237,5 Ha. Kondisi produk olahan tahun 2016 adalah 1 produk (coklat) dan untuk penanganan pasca panen/unit pengolahan hasil adalah 7 unit UPH	1.930	Luas areal komoditi perkebunan adalah = 38.537,5 Ha. Kondisi produk olahan tahun 2016 adalah 4 produk (coklat dan kopi) dan untuk penanganan pasca panen/unit pengolahan hasil adalah 9 unit UPH	2.053	Luas areal komoditi perkebunan adalah = 38.787,5 Ha. Kondisi produk olahan tahun 2016 adalah 7 produk (komoditi perkebunan) dan untuk penanganan pasca panen/unit pengolahan hasil adalah 11 unit UPH	2.159	Luas areal komoditi perkebunan adalah = 38.987,5 Ha. Kondisi produk olahan tahun 2016 adalah 10 produk (komoditi perkebunan) dan untuk penanganan pasca panen/unit pengolahan hasil adalah 13 unit UPH	2.210	Luas areal komoditi perkebunan adalah = 39.137,5 Ha. Kondisi produk olahan tahun 2016 adalah 13 produk (komoditi perkebunan) dan untuk penanganan pasca panen/unit pengolahan hasil adalah 15 unit UPH	1.429	1.429	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan	100%	100%	2.841	100%	2.841	100%	3.088	100%	3.361	100%	3.646	14.332	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan	100%	100%	1.930	100%	2.053	100%	2.159	100%	2.210	100%	1.429	9.782	Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)	Target Kinerja	Rp (Juta)	Target Kinerja	Rp (Juta)	Target Kinerja	Rp (Juta)	Target Kinerja	Rp (Juta)		
	Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Mutu Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	Meningkatnya pasca panen dan pemasaran hasil	11 paket	15 paket	750	18 paket	952	15	873	15 paket	934	15 paket	1.027	4.537	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Tersedianya pasar komoditi unggulan	100%	100%	100	100%	110	100%	120	100%	130	100%	140	600	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Tembakau	Tersedianya bahan baku industri tembakau dengan kualitas yang sesuai standar yang telah ditetapkan.	38 unit	10 unit	905	10 unit	938	3 unit	505	1 unit	196	1 unit	208	2.752	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kesejahteraan petani	20%	20%	211	40%	221	60%	231	80%	241	100%	246	1.150	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
IV	Kehutanan														
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	- Klp Tani Utama'	Luas Lahan Tahura Bontobahari = 3.754 Ha dan 10 spesies flora dan fauna	Luas Lahan Tahura Bontobahari = 3.754 Ha dan 10 spesies flora dan fauna	50	Rekonstruksi tata batas Tahura Bontobahari ± 10 km dan peningkatan jumlah spesies flora dan fauna adalah 13 spesies	60	Rekonstruksi tata batas Tahura Bontobahari ± 20 km dan peningkatan jumlah spesies flora dan fauna adalah 16 spesies	70	Rekonstruksi tata batas Tahura Bontobahari ± 25 km dan peningkatan jumlah spesies flora dan fauna adalah 19 spesies	80	Rekonstruksi tata batas Tahura Bontobahari ± 30 km dan peningkatan jumlah spesies flora dan fauna adalah 22 spesies	90	350	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Kelestarian fungsi kawasan hutan dan keanekaragaman hayati (Flora dan Fauna)	95%	420	1.871	462	1.871	504	1.871	546	1.871	588	1.871	9.355	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Terjaganya sumberdaya hutan	95%	100%	304	100%	305	100%	305	100%	305	100%	305	1.525	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
V	Energi dan Sumberdaya Mineral														
	Program Pembinaan dan	Persentase rumah	91.919	92.319	0	92.719	85	93.119	85	93.519	85	93.919	85	340	Dinas

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
	Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	tangga pengguna listrik.													Koperasi, Perdagangan dan Intamben
	Program Pemantauan dan Penertiban Kegiatan Usaha Pertambangan	Terlaksananya pemantauan terhadap kegiatan pertambangan	100%	25%	335	30%	335	35%	335	35%	335	35%	335	1.675	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Intamben
	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Persentase data dan informasi daerah rawan bencana alam geologi	20%	35%	120	35%	125	35%	135	35%	140	35%	150	670	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Intamben
VI	Perdagangan														
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah pasar yang direhabilitasi.	10	6	500	4	650	4	650	4	650	4	750	3.200	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Intamben
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Pasar Tertib Ukur	0	1	5.000	2	3.000	3	1.500	4	1.500	5	1.500	12.500	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Intamben
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Peningkatan Perdagangan Barang dan Jasa	0	20	175	60	3.125	60	1.675	60	1.675	60	1.675	8.325	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Intamben
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Jasa	5	5	165	8	165	12	50000	15	55000	18	60000	163.300	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Intamben
VII	Perindustrian														
	Program Penataan Struktur Industri	Tersedianya sarana dan prasarana IKM	1	1	1.661	1	1.500	1	575	1	575	0	0	4.311	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Intamben
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Penguatan Kemampuan Industri berbasis Teknologi	100	40	85	40	45	40/	50	40	50	40	60	290	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Intamben
		Meningkatnya Produktifitas Sektor Industri	258.331.000	271.247.550	160.000	284.809.927	160.000	299.050.423	160.000	314.002.945	160.000	329.703.092	160.000	800.000	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Intamben
	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Tercapainya peningkatan omset IKM	0	3	150	3	200	3	250	3	250	3	250	1.100	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Intamben

*Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
yang Disertai Kebutuhan Pendanaan*

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (2015)	Target Kinerja		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggungjawab								
				2016		2017		2018		2019		2020			
				Target Kinerja	Rp (Juta)										
															dan Intamben
VIII	Transmigrasi														
	Program Transmigrasi Lokal	Jumlah peserta sosialisasi ketransmigrasian	30	40	20	50	25	60	30	70	35	80	40	300	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pelaksanaan visi dan misi bupati terpilih Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2021. Pencapaian visi dan misi diukur oleh akumulasi pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditentukan target dan dievaluasi pencapaian setiap tahunnya melalui Laporan Kinerja (LKj). Nilai akumulasi pada akhir tahun masa jabatan bupati menjadi indikator keberhasilan masa kepemimpinan bupati terpilih.

Penetapan indikator kinerja daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 dititik beratkan pada ukuran-ukuran kuantitatif dengan mempertimbangkan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025.
- b. Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- c. Indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
- d. Indikator yang telah dikembangkan SKPD secara mandiri berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- e. Indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
- f. Hasil analisis dan proyeksi lima tahun ke depan.

Indikator kinerja daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bulukumba

No	Fokus/Bidang Urusan/Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat.	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2015	Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	
ASPEK KESEJAHTERAAN									
I	Kemampuan Ekonomi Daerah								
1	Pertumbuhan PDRB	%	5,97	7	8	8,5	8,5	8,5	8,5
2	PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)	Rp	9.482.420,10	9.990.316,61	10.897.610,41	11.804.904,21	12.712.198,02	13.619.491,82	14.526.785,63
3	PDRB perkapita	Rp	23.100.527,78	23.212.469,61	24.350.975,04	26.489.480,47	28.627.985,90	30.766.491,34	32.904.996,77
4	Jumlah penduduk miskin	Jiwa	34.131	29.482	27.085	24.692	22.245	19.816	17.316
5	Persentase pertumbuhan jumlah pendapatan daerah.	%	5,27	5,27	10	10	10	10	10,48
II	Kesejahteraan Masyarakat								
A	Pendidikan								
1	Angka melek huruf	%	92,48	92,50	92,51	92,56	92,90	93,00	93,00
2	Angka Partisipasi Kasar (APK):								
	a. SD/MI	%	140,87	130,10	125,87	110,78	103,81	100	100
	b. SMP/MTs	%	146,26	132,90	127,78	110,90	102,91	100	100
	c. SMA//SMK/MA	%	126,06	115,89	111,89	115,15	101,41	100	100
3	Angka Partisipasi Murni (APM):								
	a. SD/MI	%	123,43	119,00	112,90	107,91	104,81	98,00	100
	b. SMP/MTs	%	102,46	101,81	100,01	99,00	98,92	98,22	100
	c. SMA//SMK/MA	%	91,93	92,34	95,24	96,67	97,65	98,25	100
B	Kesehatan								
1	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	%	83	83	85	88	91	93	95
2	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	89	89	91	93	95	96	97
3	Persentase cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)	%	95	95	97	98	100	100	100

No	Fokus/Bidang Urusan/Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat.	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2015	Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	
4	Persentase cakupan pelayanan anak balita	%	64	64	70	75	80	85	90
ASPEK PELAYANAN UMUM									
A	Layanan Urusan Wajib								
I	Pendidikan								
1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik								
	a. Ruang kelas	%	18,03	20,10	21,30	21,50	22,75	23,67	23,67
	b. Perpustakaan	%	40,00	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00	45,00
2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik								
	a. Ruang kelas	%	20,07	25,12	27,91	30,24	32,50	33,18	200
	b. Perpustakaan	Unit	13	15	18	20	21	23	23
	c. Laboratorium	Unit	20	21	22	23	24	25	25
3	Sekolah pendidikan SMA/SMK kondisi bangunan baik								
	a. Ruang kelas	%	65,45	67,65	69,95	70,45	72,65	75,67	75,67
	b. Perpustakaan	%	74,90	75	76	77,70	78	79	79
	c. Laboratorium	%	71,92	72	73	74	75	76	76
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS):								
	a. SD/MI	%	134,63	132,25	125,75	120,10	110,25	100,50	100
	b. SMP/MTs	%	111,08	110,43	106,10	104,75	102,10	100,25	100
	c. SMA//SMK/MA	%	96,52	97,59	97,89	98,15	98,40	98,60	
5	Angka Melanjutkan (AM)								
	a. SD ke SMP	%	103,58	102,52	100,75	100,61	100,25	99,68	99,68
	b. SMP ke SMA	%	93,39	96,08	97,35	97,50	98,65	98,75	98,75
6	Angka Putus Sekolah/Drop Out:								
	a. SD/MI	%	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04
	b. SMP/MTs	%	0,22	0,20	0,18	0,16	0,12	0,10	0,10
	c. SMA//SMK/MA	%	0,22	0,20	0,17	0,15	0,10	0,05	0,05
7	Rasio guru dan murid:								
	a. SD/MI	%	1:24	1:26	1:28	1:30	1:30	1:30	1:30

No	Fokus/Bidang Urusan/Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat.	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2015	Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	
	b.SMP/MTs	%	1:22	1:25	1:27	1:30	1:30	1:30	1:30
	c. SMA//SMK/MA	%	1:22	1:25	1:27	1:30	1:30	1:30	1:30
8	Persentase kelulusan:								
	a. SD/MI	%	98,66	99,23	99,40	99,70	99,85	100	100
	b. SMP/MTs	%	98,84	99,33	99,50	99,85	99,90	100	100
	c. SMA//SMK/MA	%	89,19	97,00	98,00	99,15	99,95	100	100
9	Persentase jumlah satuan pendidikan yang sudah terakreditasi:								
	a. SD/MI	%	69,54	70,01	75,90	80,95	96,75	98,00	98
	b. SMP/MTs	%	43,05	48,00	52,97	57,17	58,90	60,00	65
	c. SMA/SMK/MA	%	33,33	39,99	42,88	46,92	48,43	50,00	50
10	Persentase sekolah yang memanfaatkan pembelajaran berbasis TIK.	%	33,33	34	35	36	37	38	38
11	Jumlah siswa miskin yang memperoleh beasiswa								
	a. SD/MI	Org	13.615	15.000	17.000	18.000	19.000	20.000	20.000
	b. SMP/MTs	Org	4.626	4.800	5.300	5.500	5.800	6.000	6.000
	c. SMA/MA	Org	3.574	3.987	4.347	4.742	4.897	5.000	5.000
	d. SMK	Org	754	835	903	953	978	1.000	1.000
12	Jumlah medali peserta didik pada kejuaraan/lomba tingkat regional dan nasional.	Buah	3	4	7	8	9	10	10
13	Jumlah kegiatan pembinaan pendidikan non formal.	Keg.	27	30	35	37	40	42	42
14	Persentase pendidik yang tersertifikasi pada satuan pendidikan.								
	a. SD/MI	%	48,30	49,10	54,00	59,00	62,00	65,00	65,00
	b. SMP/MTs	%	53,41	57,33	62,50	65,90	68,60	70,55	70,55
	c. SMA/MA	%	84,44	87,50	90,80	92,75	95,00	95,00	95,00
	d. SMK	%	38,95	44,00	49,90	54,85	60,00	60,00	60,00
II	Kesehatan								
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Fokus/Bidang Urusan/Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat.	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2015	Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	
	ditangani								
2	Cakupan pelayanan nifas	%	92	92	94	95	97	99	100
3	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan sederajat	%	87	87	90	95	100	100	100
4	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	13	13	20	25	35	40	50
5	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	11	11	20	30	40	50	60
6	Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	%	15	15	20	25	30	40	50
7	Cakupan pelayanan kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat	%	19	19	24	29	35	40	50
8	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	%	15	15	20	25	30	35	40
9	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	5,5	5,5	7	10	15	20	26
10	Cakupan desa yang melaksanakan STBM	%	84	84	87	89	92	95	98
11	Persentase Pemberi pelayanan GD yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/ GELS/ALS	%	68,5	68,5	74,8	81,1	87,4	93,7	100
12	Persentase kepuasan pelanggan rawat jalan dan rawat inap	%	82,6	82,6	85,1	87,6	90	92,5	95
13	Jumlah puskesmas yang terakreditasi	Unit	0	0	5	9	15	20	20
III	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	55,30	64,24	73,18	82,12	91,06	100	100
2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	82	85	89	93	96	100	100
3	Persentase luas jaringan irigasi yang terpelihara dan direhabilitasi	%	45,45	45	10	15	15	14,55	100
4	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	0,174	0,163	0,153	0,145	0,137	0,130	0,130
5	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	%	72,14	72,14	81,99	91	100	100	100
6	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	14,083	16,19	18,52	20,94	23,51	26,16	30

No	Fokus/Bidang Urusan/Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat.	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2015	Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	
7	Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah perkotaan	%	4	7	11,25	15	20	25	30
IV Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	Rasio rumah layak huni	%	84,41	89,56	89,84	90,26	90,67	91,24	91,38
2	Persentase kawasan kumuh	%	0,18	0,17	0,15	0,13	0,1	0,08	0,06
3	Persentase rumah tangga bersanitasi	%	57	57	61	66	72	76	80
V Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
1	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan tanggap darurat bencana	Org	2	7	7	8	8	8	10
2	Presentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	58,6	60	70	75	80	90	100
4	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	Kali	5	5	5	5	5	5	25
5	Jumlah peraturan daerah/ peraturan bupati yang diawasi dan dipantau	Buah	11	12	13	14	15	16	16
6	Jumlah pemuka agama/ lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan/fasilitas.	Org	385	385	484	484	484	484	484
7	Jumlah sarana dan prasarana ibadah yang mendapatkan bantuan	Buah	70	71	72	73	74	75	75
VI Sosial									
1	Jumlah sarana sosial yang direhabilitasi	Buah	18	18	19	20	21	22	23
2	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	%	5,83	5,83	6,20	6,61	7,07	7,61	8,24

No	Fokus/Bidang Urusan/Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat.	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2015	Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	
	Non Pelayanan Dasar								
I	Tenaga Kerja								
1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	90	90	95	95,50	96	96,50	97
2	Angka pengangguran terbuka	%	1,35	1,35	1,17	1,03	0,89	0,73	0,64
3	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	Kasus	1	1	2	2	2	2	2
II	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Cakupan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam Unit Pelayanan terpadu.	Kasus	208	200	190	180	170	160	150
III	Ketahanan Pangan								
1	Jumlah desa mandiri pangan yang dibina	Unit	5	6	7	8	9	10	10
2	Jumlah lumbung pangan yang dibangun	Unit	10	15	20	25	30	35	35
3	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	Ton	10	30	60	90	120	150	150
4	Jumlah cadangan pangan masyarakat	Ton	44	25	50	150	200	250	250
5	Pembinaan kelompok wanita tani	Klp	31	46	66	81	101	101	101
IV	Pertanahan								
1	Penyelesaian sengketa tanah aset pemerintah daerah	Kasus	12	5	5	5	5	5	5
V	Lingkungan Hidup								
1	Persentase informasi kerusakan tanah untuk produksi biomassa baik potensi rusak IV, III, II, dan I	%	40	40	60	80	100	100	100
2	Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya, dan diinformasikan status mutu airnya	%	90	90	95	100	100	100	100

No	Fokus/Bidang Urusan/Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat.	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2015	Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	
3	Persentase Penanganan Sampah	%	57,83	71,88	85,81	99,57	100	100	100
VI Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Cakupan penerbitan kartu keluarga (KK)	%	96,68	96,68	95	95	95	95	95
2	Cakupan penerbitan KTP-el	%	68,89	68,89	50	60	65	70	100
3	Jumlah kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk		199,35	200	200	210	210	220	220
4	Cakupan penerbitan akta kematian.	%	0,18	0,18	0,25	0,25	0,30	0,50	0,9
VII Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dibentuk	Unit	60	70	80	90	100	109	109
VIII Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi	Set	155	27	65	71	83	105	142
2	Persentase cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif.	%	10,25	12,5	13,5	15	16,5	18,5	18,5
IX Perhubungan									
1	Jumlah pelabuhan rakyat yang direhabilitasi	Buah	1	2	3	3	3	3	3
2	Jumlah terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	Buah	1	1	2	2	3	3	2
X Komunikasi dan Informatika									
1	Jumlah penyiaran TV/ Radio Lokal	Buah	11	11	11	11	11	11	11
XI Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
1	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang dibina	Klp	300	340	380	420	460	500	500

No	Fokus/Bidang Urusan/Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat.	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2015	Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	
2	Persentase koperasi berprestasi	%	2,44	2,39	2,82	2,76	3,17	3,11	3,11
3	Jumlah UMKM aktif non BPR/LKM	Unit	10.215	10.750	11.000	11.075	11.150	11.200	11.200
4	Jumlah usahawan yang dibina	Org	344	384	424	464	504	544	544
XII Penanaman Modal									
1	Jumlah perizinan yang diterbitkan tepat waktu	Buah	1.197	1.197	1.095	1.629	1.436	1.314	6.671
2	Jumlah produk hukum daerah terkait perizinan.	Buah	3	2	2	2	2	2	11
3	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Apl.	1	1	1	1	1	1	1
4	Jumlah nilai investasi:								
	a. PMDN	Rp.	50 milyar	50 milyar	50 milyar	20 milyar	20 milyar	20 milyar	160 milyar
	b. PMA	\$	2 juta	2 juta	2 juta	2 juta	200 ribu	200 ribu	6,4 juta
XIII Kepemudaan dan Olahraga									
1	Jumlah organisasi pemuda	Unit	42	43	44	45	46	47	47
2	Jumlah prestasi karya ilmiah remaja	Kali	3	3	3	5	5	5	21
3	Jumlah organisasi olahraga	Unit	21	24	27	30	33	36	36
4	Jumlah prestasi olahraga yang dicapai	Kali	13	13	13	15	15	15	71
XIV Statistik									
1	Persentase tingkat keterisian data dalam system informasi pembangunan daerah	%	53	55	58	60	63	65	70
XV Kebudayaan									
1	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Buah	20	20	21	22	23	24	25
2	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	2	2	3	3	4	4	4
XVI Perpustakaan									
1	Jumlah perpustakaan yang dibina	Unit	600	600	660	720	780	840	900

No	Fokus/Bidang Urusan/Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat.	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2015	Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	
XVII	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
	Kepegawaian								
1	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang menyelesaikan jenjang pendidikan formal S1, S2, dan S3.	Org	155	31	31	31	31	31	31
2	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	Org	563	563	563	563	563	563	563
3	Jumlah aparatur yang memperoleh penghargaan	Org	1.250	250	250	250	250	250	250
4	Jumlah aparatur yang mendapatkan penjatuhan hukuman disiplin	Org	60	12	12	12	12	12	12
5	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	Org	204	204	204	204	204	204	1.020
XVIII	Perencanaan								
1	Persentase program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Kategori penilaian SAKIP dari kementerian PAN dan RB		CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
XIX	Keuangan								
1	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Dokumen APBD	Dok	2	2	2	2	2	2	2
XX	Pemerintahan Umum								
1	Jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan	Buah	419	600	650	650	650	650	3.200
2	Persentase tindak lanjut temuan	%	80	80	100	100	100	100	100
3	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) instansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba	%	58,42	58,42	60	70	80	90	100
4	Tingkat Maturitas SPIP Level 3	%	-	-	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
5	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan	%	-	-	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3

No	Fokus/Bidang Urusan/Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat.	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2015	Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	
	Intern Pemerintah Level 3								
6	Jumlah produk hukum yang terkait dengan kelembagaan	Buah	3	3	3	3	3	3	3
7	Jumlah kerjasama antar daerah	Buah	4	4	4	5	6	6	7
B	Layanan Urusan Pilihan								
I	Kelautan dan Perikanan								
1	Cakupan pembinaan kelompok nelayan	%	65,62	65,62	65,62	65,62	65,62	65,62	65,62
2	Jumlah produksi perikanan	Ton	164.402	164.402	172.622	180.842	189.062	197.282	205.502
II	Pariwisata								
1	Jumlah obyek wisata yang dikelola dan dikembangkan	Buah	9	9	10	10	11	12	12
2	Jumlah kunjungan wisatawan	Org	180.741	184.150	220.000	260.000	300.000	350.000	400.000
III	Pertanian								
1	Rata-rata pendapatan perkapita masyarakat petani	Rp.	99.500	101.490	103.520	105.590	107.702	109.856	528.158
2	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan terhadap PDRB	%	42,460	41.920	39.839	38.776	37.731	36.706	36.706
3	PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan atas dasar harga berlaku (ADHB).	Rp.	3.757.187,30	4.403.352,41	4.789.548,15	5.175.743,90	5.561.939,65	5.948.135,39	6.334.331,14
4	PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan atas dasar harga konstan (ADHK).	Rp.	2.856.608,02	3.127.730,02	3.288.833,90	3.449.937,78	3.611.041,66	3.722.145,54	3.933.249,42
5	Cakupan pembinaan kelompok tani	%	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	1
6	Jumlah tempat pengolahan padi yang menggunakan teknologi	Unit	9	12	15	18	21	24	90
7	Pertumbuhan populasi ternak:								
	a. Sapi potong	Ekor	68.344	71.488	74.919	78.665	82.756	87.308	92.110
	b. Kerbau	Ekor	1.570	1.594	1.618	1.644	1.670	1.698	1.727
	c. Kuda	Ekor	27.246	27.682	28.125	28.603	29.089	29.613	30.146

No	Fokus/Bidang Urusan/Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat.	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2015	Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	
	d. Kambing	Ekor	32.130	33.576	35.255	37.194	39.426	41.989	44.928
	e. Ayam Buras	Ekor	684.793	732.729	791.347	870.482	966.235	1.091.846	1.255.623
	f. Ayam ras pedaging	Ekor	2.040.000	2.244.000	2.468.400	2.715.240	2.986.764	3.285.440	3.613.984
	g. Ayam ras petelur	Ekor	257.922	283.714	312.085	343.294	377.623	415.385	456.924
	h. Itik	Ekor	17.483	19.581	22.029	24.893	28.254	32.210	37.042
8	Luas areal komoditi perkebunan	Ha	38.237,5	38.537,5	38.787,5	38.987,5	39.137,5	39.237,5	39.237,5
IV	Kehutanan								
1	Jarak rekonstruksi tata batas Tahura.	km	10	10	10	20	25	39	39
V	Energi dan Sumberdaya Mineral								
1	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	RT	91.919	92.319	92.719	93.119	93.519	93.519	93,519
VI	Perdagangan								
1	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/ direhabilitasi	Buah	15	20	25	30	35	45	45

BAB X PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba merupakan kerangka kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan selama lima tahun. Selanjutnya dokumen RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 secara teknis menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama lima tahun yang merupakan implementasi tahap III dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba sebagai dokumen perencanaan induk untuk masa waktu 20 tahun. Seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara dokumen RPJMD dengan RKPD sebagai implementasi tahunannya, agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

10.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah periode RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa transisi yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah periode berikutnya.

Selanjutnya RKPD pada masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya, yang kemudian akan direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan menjadi pedoman bagi setiap SKPD menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPD. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. SKPD serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
2. SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;
3. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD.